



REVISI ZONASI TAMAN NASIONAL SECARA PARTISIPATIF

Kajian dari Taman Nasional Lore Lindu,
Taman Nasional Sebangau dan Taman
Nasional Bukit Duabelas

Syafrizaldi Jpang
Alqaf Afandi
Fajar Septyono

USAID – BIJAK
2021

Pernyataan

Naskah ini dimungkinkan dengan dukungan Rakyat Amerika melalui Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID). Isi dari naskah ini adalah tanggung jawab Tim Penulis dan tidak mencerminkan pandangan USAID atau Pemerintah Amerika Serikat. Narasi dokumen ini sebagian merupakan proses salin-tempel dari dokumen berjudul Tata Sengketa yang juga disusun oleh Tim Penulis.

Revisi Zonasi Taman Nasional Secara Partisipatif

Kajian dari Taman Nasional Lore Lindu, Taman
Nasional Sebangau dan Taman Nasional Bukit
Duabelas

Penulis
Syafrizaldi Jpang
Alqaf Afandi
Fajar Septyono

USAID – BIJAK
2021

DAFTAR ISI

BAGIAN 1. RUMAH BERSAMA	1
BAGIAN 2. SENKETA TENURIAL	9
BAGIAN 3. REZONASI TAMAN NASIONAL	13
BAGIAN 4. KESERTAAN MASYARAKAT	17
BAGIAN 5. SENKETA ZONA TAMAN NASIONAL	19
BAGIAN 6. MENITI JALAN KELUAR	32
SIGI OBJEK SENKETA	32
SIGI SUBJEK SENKETA	33
SIGI FAKTOR SENKETA	36
JALAN KELUAR	37
BAGIAN 7. LANGKAH REVISI ZONASI (PARTISIPATIF)	39
BAGIAN 8. TEMA-TEMA LAPANGAN	41
MATA PENCAHARIAN DAN PERUBAHAN FUNGSI LAHAN	41
LAGA HAK DALAM OBJEK YANG SAMA	43
MEMPERKECIL KESENJANGAN	45
BAGIAN 9. PUNGKAS	46
SALURAN PERATURAN	46
SALURAN KERJASAMA ANTAR PIHAK	47
RAMBU-RAMBU	48
LAMPIRAN-LAMPIRAN	51
1. TENTANG USAID BIJAK	51
1.1. <i>Melestarikan Keanekaragaman Hayati dan Mengurangi Emisi</i>	51
1.2. <i>Kegiatan Program</i>	51
2. CATATAN DARI LAPANGAN	53
2.1. <i>Tata Zona Sebangau Rancak</i>	53
2.2. <i>Berbagi Relung Lore Lindu</i>	59
2.3. <i>Dilema Orang Rimba Bukit Duabelas</i>	65
3. TENTANG PENULIS	73
3.1. <i>Syafrizaldi 'Aal' Jpang</i>	73
3.2. <i>Alqaf Afandi</i>	74
3.3. <i>Fajar Septyono</i>	75
DAFTAR PUSTAKA	77

Bagian I. Rumah Bersama

Sebagai rumah bersama, hutan telah menyangga sistem kehidupan. Warga dunia mengambil manfaat yang tidak sedikit dari hutan. Mulanya, fungsi-fungsi hutan mungkin hanya sebatas lahan untuk kepentingan mengumpulkan bahan makanan. Perlahan peradaban berubah hingga hutan dibutuhkan bukan hanya untuk kepentingan pangan, tapi merambah pada kebutuhan-kebutuhan yang bersifat agraris. Selanjutnya, kepentingan ekonomi lebih banyak menyita perhatian. Belakangan, baru ada kesadaran yang muncul sebagai tanggung jawab manusia kepada sumber daya hutan. Lantas, kata konservasi dan berkelanjutan mulai banyak menghias ragam pembicaraan.

Di tanah air, UU 41/1999 membagi hutan berdasarkan fungsinya dalam 3 klasifikasi: *Pertama* Hutan lindung, yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah; *Kedua* Hutan produksi, yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan; dan *Ketiga* Hutan konservasi, yaitu kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

Hutan merupakan suatu ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan (UU 41, 1999). Menurut Kartodihardjo (2007) berdasarkan isi peraturan perundang-undangan yang berlaku, hutan dikonsepsikan sebagai suatu ekosistem yang mempunyai fungsi alami dan tergantung dari tipe ekologis dan karakteristik hubungan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Sebagai sebuah ekosistem, hutan memiliki arti yang sangat penting bagi kehidupan seluruh makhluk hidup di muka bumi karena merupakan sumber kebutuhan primer di bumi ini.

Eksplorasi besar-besaran hutan hujan Indonesia untuk kayu dimulai pada 1960-an. Hutan dataran rendah di Sumatra dan Kalimantan telah banyak ditebang, meskipun tutupan hutannya sangat luas. Eksplorasi sering kali merusak. Ketika jalan raya telah memberikan akses ke daerah yang sebelumnya tidak dapat diakses, para petani sering kali pindah setelah mendapatkan kayu perusahaan dan kemudian menebangi relik tersebut, meregenerasi hutan untuk penanaman permanen atau berpindah (Collins *et al*, 1991).

Namun sesungguhnya, eksploitasi hutan sudah dimulai sebelum era 60an. Sebagai contoh, Suharno (2020) menyebut, migrasi Suku Jawa, Sunda, dan Madura ke Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Migrasi pertama orang Madura ke bagian barat wilayah yang kini dikenal sebagai Kalimantan Tengah, terjadi pada tahun 1830 dalam kekuasaan Kesultanan Kotawaringin. Migrasi disponsori oleh Kesultanan karena orang-orang Madura dibutuhkan untuk menggarap banyak lahan yang tidak produktif dan mengawasi peternakan.

Hal ini mengindikasikan pembukaan hutan sudah terjadi. Kendati tidak ada angka yang pasti yang mencatat seberapa besar bukaan lahan hutan di masa itu. Namun keterangan tersebut setidaknya adalah indikasi awal terjadinya pembukaan lahan.

Versi lain menyebut migrasi orang Madura ke Kalimantan dimulai pada 1901, melalui program kolonisasi pemerintah Belanda. Para migran Madura sebagian besar direkrut untuk bekerja pada perkebunan karet atau di pertambangan emas (Suharno, 2020). Etnis Madura dibawa oleh orang-orang Belanda pada tahun 1920an sebagai buruh-buruh di perkebunan kelapa dan karet di Sampit. Setelah itu, baru menyusul etnis – etnis dari daerah lain utamanya Jawa, yang juga dibawa oleh Belanda sebagai buruh perkebunan, Banjar, kemudian Cina mulai ada saat Sampit mulai tumbuh menjadi kota kecil (Yogaswara, 2021).

Yogaswara melanjutkan, orang Dayak di Sampit mulai mulai mengenal adanya pemukiman orang Madura di sekitar tahun 1920an – 1930an. Saat itu, kelompok permukiman Madura yang dikenal adalah beberapa lokasi di Mentaya Seberang dan 1 (satu) lokasi di area perusahaan perkebunan Belanda yang biasa disebut *brengsel* oleh penduduk sekitarnya. Sekitar tahun 1940, pemukiman Madura berkembang di sekitar daerah Sawahan. Belanda membangun ragam fasilitas dan kedatangan para misionaris hingga tahun 1950 membuat kelompok etnis Madura berdatangan pada gelombang berikutnya, mereka mulai membuka lahan baru di daerah yang kini dikenal dengan Baamang.

Usaha kayu sebagai industri dimulai dengan kehadiran PT *Bruenzyl Dajak Houdbrijven* (BDH), sebuah usaha kayu milik swasta Belanda yang memfokuskan industri pengolahan kayunya di kota Sampit. PT BDH diberi monopoli konsesi hutan oleh Dewan Dayak Besar mulai tahun 1947. Konsesi yang diberikan meliputi tiga daerah aliran sungai, yaitu: Katingan, Mentaya dan Seruyan. Dewan Dayak Besar eksis sesuai dengan konteks dibentuknya Negara Indonesia Serikat (RIS) pada masa 1945-1949 (Yogaswara, 2021).

Kekeringan parah pada tahun 1982-1983 diikuti oleh kebakaran hutan di Kalimantan, yang sebagian besar dimulai secara tidak sengaja oleh para petani. Lebih tiga puluh ribu km persegi dibakar, sebagian besar merupakan hutan bekas tebangan yang mengandung banyak puing kering. Hutan juga telah hilang melalui konversi lahan untuk pertanian perkebunan dan transmigrasi (Collins *et al*, 1991).

Collins *et al* melanjutkan, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah semakin memperketat penegakan peraturan tentang eksploitasi hutan dan pengolahan kayu. Indonesia melarang ekspor kayu gelondongan pada tahun 1980, semua kayu yang diekspor sekarang digergaji atau diubah menjadi kayu lapis, dimana Indonesia merupakan pemasok utama dunia. Ekspor rotan mentah dilarang pada tahun 1986.

Jauh sebelum itu, Tindakan-tindakan perlindungan alam secara eksplisit telah tercermin pada pola perilaku sehari-hari masyarakat dalam berhubungan dengan alam yang merupakan warisan turun-temurun. Sebelum abad ke-15, tradisi sakral sangat mewarnai segenap kehidupan masyarakatnya. Perilaku keseharian masyarakat sangat kental dengan kepercayaan terhadap kekuatan alam dan mistikasi benda-benda, yang terwujud dalam penabuan terhadap benda-benda, situs-situs dan tindakan tertentu. Misalnya, larangan mengambil jenis-jenis pohon atau batu-batu tertentu, larangan memasuki kawasan tertentu, seperti gunung, rawa dan hutan tutupan (Wiratno *et al*, 2001).

Selanjutnya, kekosongan kebijakan dalam perlindungan alam selama 188 tahun (1714-1912) disebabkan oleh ekspansi perkebunan Belanda demi memulihkan perekonomian Pemerintahan Hindia Belanda. Munculnya kebijakan pada tahun 1896 dilatarbelakangi oleh keprihatinan terhadap eksploitasi besar-besaran terhadap burung cendrawasih oleh Pemerintah Kolonial Belanda dan ekspor bulunya dalam skala besar ke Paris dan London (Wiratno *et al*, 2001).

Pada tahun 1894, lanjut Wiratno, Gubernur Jenderal Jhr. C.H.A. van der Wijck melalui koran *Nieuwe Rotterdamsche Courant* mempertanyakan kasus-kasus perdagangan burung di Ternate dan Ambon serta meminta pejabat setempat (residen) agar melaporkan kasus-kasus tersebut beserta usulan penanganannya. Akan tetapi hal ini pun tidak memberikan hasil berarti.

Tidak adanya sikap yang jelas dan aksi konkret Pemerintah Kolonial, mengakibatkan datangnya tekanan dari para konservasionis dari luar Hindia Belanda pada tahun 1894. Pada bulan November, Menteri Kolonial di Den Haag menerima sebuah surat dari Ketua Pelaksana *Bond ter Bestrijdingeener Gruwelmode (Association to Combat a Revolting Fashion)* dan beberapa asosiasi sejenis yang menyesalkan adanya penyelundupan burung cendrawasih secara liar. Asosiasi tersebut mendesak agar Menteri Kolonial segera mencegah laju perburuan satwa ini.

Pada saat yang hampir bersamaan M. C. Piepers, seorang entomolog amatir yang juga mantan pegawai Departemen Hukum Hindia Belanda, mengusulkan tindakan perlindungan bagi burung-burung cendrawasih serta beberapa flora dan fauna lain yang terancam punah. Piepers menyarankan agar dibuat semacam kawasan konservasi seperti Taman Nasional Yellowstone yang secara resmi melindungi spesies-spesies yang terancam punah. Tekanan serupa juga dilakukan oleh P.J. van Houten (1896), seorang anggota asosiasi perlindungan satwa Belanda. Houten meminta agar pers Belanda menyuarakan kepada seluruh masyarakat bahwa laju kecepatan perburuan burung-burung cendrawasih akan menyebabkan kepunahan satu atau beberapa spesies burung lainnya.

Selama tahun 1896-1897, lanjutnya, Pemerintah Kolonial, terutama Kementerian Kolonial, mengusahakan penyelesaian masalah cendrawasih ini. Ide pelarangan ekspor burung cendrawasih memang sempat menjadi pertimbangan, tapi ide ini kemudian ditolak dengan alasan karena perburuan hanya dapat dibatasi, bukan diakhiri. Demikian juga pelarangan total menurut Pemerintah justru akan menimbulkan masalah baru yaitu maraknya penyelundupan.

Pada bulan Januari 1898 Pemerintah Kolonial mengirim Dr.J.C. Koningsberger, seorang zoolog pertanian, ke Kebun Raya Bogor untuk mencari masukan ilmiah sebab-sebab kepunahan burung cendrawasih. Masukan-masukan mengenai burung cendrawasih tersebut kemudian menjadi ide bagi pembuatan undang-undang perlindungan burung-burung lain. Ide ini lalu ditindaklanjuti dengan penerbitan *Staatsblad* 497 pada bulan Oktober 1909 dan *Staatsblad* 594 pada bulan Desember 1909 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 1910, dan akhirnya membuahkan hasil, yaitu *Ordonnantie tot Bescherming van sommige in het levende Zoogdieren en Vogels* (Undang-Undang Perlindungan bagi Mamalia Liar dan Burung Liar) yang dikeluarkan pada tahun 1910. Undang-undang ini berlaku di seluruh Indonesia. Selama periode 1898-1908 ini terjadi pertarungan ide antara keinginan untuk melindungi satwa burung di satu sisi, dengan keinginan mempertahankan perdagangannya di sisi lain. Secara ekonomi, perdagangan burung ini dianggap sangat menguntungkan Kawasan Timur Indonesia serta Pemerintah Hindia Belanda.

Sejak 1914, isu yang berawal dari keprihatinan akan kepunahan burung cendrawasih ini bergeser menjadi isu lingkungan yang diterima masyarakat secara luas, tidak hanya nasional tetapi juga internasional. Saat laju perburuan meningkat pada tahun 1912-1913, *American Ban* (pelarangan komersialisasi cendrawasih di Amerika) telah menyumbang banyak dalam hal ini, dibandingkan dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1912 (Wiratno et al, 2001).

Hutan Indonesia sangat beragam dan kaya akan spesies. Namun, kerusakan serius telah terjadi selama hampir lima puluh tahun terakhir. Pengembangan industri kayu dan perkebunan skala besar di hutan-hutan hujan dipterokarpa Indonesia di bagian barat disinyalir menjadi salah satu penyebabnya. Beberapa satwa liar diketahui terkena dampak serius, misalnya harimau sumatra, orangutan sumatra, orangutan kalimantan, macan dahan, badak sumatra, gajah sumatra dan belakangan ada orangutan tapanuli, berikut dengan spesies-spesies lain.

Upaya perlindungan harus benar-benar dilakukan jika Indonesia tak menginginkan kehancuran lebih parah pada hutan-hutannya. Upaya perlindungan, seperti yang dijelaskan Wiratno sebelumnya, tentulah pula bukan sebuah jalan yang sederhana. Hutan harus berfungsi lebih baik di satu sisi, dan memberikan dampak terhadap ekonomi dan sosial di sisi yang lain. Salah satu upaya konservasi terhadap kawasan hutan adalah dengan menetapkan Taman Nasional.

The International Union for Conservation of Nature (IUCN), pada 2008 mendefinisikan taman nasional sebagai area alami di daratan dan atau lautan yang ditunjuk untuk melindungi integritas ekologis dari satu atau lebih ekosistem untuk generasi sekarang dan yang akan datang; melarang eksploitasi dan okupasi yang bertentangan dengan tujuan peruntukkan kawasan dan; memberikan keuntungan untuk kegiatan spiritual,

ilmu pengetahuan, pendidikan, rekreasi dan peluang pengunjung wisata yang semuanya itu harus sesuai dengan lingkungan dan budaya setempat.

Taman nasional masuk kedalam kategori II kawasan konservasi yang merupakan area perlindungan yang dikelola dengan fungsi utama untuk konservasi spesies dan jenis habitat yang kaya serta untuk rekreasi. Prinsip pokok pengertian taman nasional adalah: 1. Suatu area yang memiliki keunikan yang tinggi nilai keberadaan jenis yang dikonservasi, layanan ekosistem, tipe habitat, bentangan alam yang menarik, pemandangan yang indah, budaya/tradisi masyarakat yang menarik. 2. Area yang luas cukup untuk menjamin kesendirian atau dengan dukungan tambahan dari sebuah jaringan kawasan lindung lainnya yang telah ditetapkan. 3. Konservasi dari kelangsungan hidup dan dinamika lingkungan alam dari keanekaragaman hayati yang sesuai dengan tujuan rancangan keruangan alam dan skala sementara di atas (IUCN, 2008).

Di Indonesia, kebijakan pembentukan taman nasional diawali dengan klaim kawasan sebagai hak milik negara (*state property right*) sehingga pemerintah menetapkan lokasi-lokasi yang dinilai memenuhi kriteria pembentukannya secara *top-down*. Di lain pihak masyarakat adat mengelola kawasan yang sama dengan kearifan tradisional yang bersifat lokalitas dan merupakan hasil adaptasi kehidupan terhadap kondisi lingkungan. Fakta lapang juga memperlihatkan bahwa pemerintah tidak dapat dengan leluasa mengelola kawasan karena terjadi konflik ruang dan sumber daya alam (Kosmaryandi *et al*, 2012).

Taman nasional sebagai manifestasi teritorialisasi negara mewujudkan dalam bentuk peniadaan pengakuan atas masyarakat asli atau masyarakat setempat. Status sebagai anggota masyarakat asli atau yang bertempat tinggal di sekitar taman nasional tidak secara otomatis akan mendapatkan hak atau keuntungan dengan adanya taman nasional. Alih-alih mereka justru diharapkan kesadarannya untuk menyerahkan sebagian wilayah adatnya bagi kepentingan nasional yang mempunyai nilai lebih luas di masa Orde Baru. Kuatnya dominasi negara menyebabkan adat termarginalkan. Baru pada paska rezim Orde Baru, bermunculan *klaim* dan *re-klaim* wilayah oleh masyarakat adat di wilayah taman nasional (Purwanto, 2005).

Menurut Kosmaryandi *et al* (2012), pola pikir pemerintah yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan dalam menyikapi keberadaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan taman nasional adalah dengan menempatkan masyarakat tersebut sebagai objek pengelolaan yang menjadi bagian dari potensi pengembangan wisata. Bahkan terkadang ditempatkan sebagai pihak yang berseberangan dengan kepentingan konservasi. Tradisi pemanfaatan sumber daya alam di dalam kawasan taman nasional oleh masyarakat adat untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya seringkali dinilai sebagai tekanan ataupun ancaman terhadap keutuhan ekologis kawasan hutan milik pemerintah.

Purwanto (2005) di empat taman nasional yaitu TNGP, TNGL, TNKS, dan TNK yang ditelitinya menemukan bahwa terdapat peran dominan negara dalam mengatur keseluruhan kegiatan dan gagasan mengenai pengelolaan lingkungan. Pengaturan Kawasan konservasi menitik beratkan perlindungan terhadap flora dan fauna beserta ekosistem di dalamnya, padahal tidak dapat dipungkiri bahwa kenyataannya dalam kawasan ini juga terdapat keberadaan manusia yang dari sudut pandang konservasi dapat menjadi ancaman dalam upaya perlindungan tersebut.

Konservasi adalah upaya yang dilakukan manusia untuk melestarikan atau melindungi alam. Secara harfiah, konservasi berasal dari bahasa Inggris *conservation*, yang artinya pelestarian atau perlindungan. Makna konservasi dapat meliputi seluruh kegiatan pemeliharaan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Kegiatan konservasi dapat pula mencakupi ruang lingkup preservasi, restorasi, rekonstruksi, adaptasi dan revitalisasi (Rachman, 2012). Menurut MacKinnon terdapat 14 kriteria penetapan suatu kawasan konservasi, yakni bentuk dan ukuran, kekayaan dan keanekaragaman, bersifat alami atau asli, kelangkaan,

keunikan dan kekhasan, kerapuhan, pelestarian plasma nutfah, catatan sejarah, posisi dalam unit ekologi atau geografi, kepentingan, nilai potensial, daya tarik intrinsik, modifikasi lanskap yang menambah nilai biologi dan kesempatan untuk pelestarian (Takandjandji & Kwatrina, 2011).

Menurut UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. Lebih lanjut UU mendefinisikan Konservasi sumber daya alam hayati adalah sebagai pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.

Tujuan konservasi sumber daya alam yang akan dilakukan adalah (1) Mempertahankan adanya kualitas lingkungan dengan memperhatikan estetika dan kebutuhan ekowisata maupun hasilnya, dan (2) Mempertahankan adanya kelanjutan dari pemanfaatan hasil tanaman, hewan dan bahan yang bermanfaat lainnya, dengan menciptakan siklus yang seimbang antara masa tanam atau pembiakan dengan pertumbuhan individu baru atau pembaharuan material. Oleh karena itu konservasi yang dilakukan juga meliputi kegiatan perlindungan terhadap sistem kehidupan, preservasi sumber daya genetik serta pemanfaatan flora dan fauna secara berkelanjutan.

Di Indonesia, hutan konservasi terdiri dari ; (1) Kawasan hutan suaka alam, yaitu hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan, seperti suaka margasatwa dan cagar alam; (2) Kawasan hutan pelestarian alam, yaitu hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, seperti kawasan Taman Hutan Raya (Tahura), taman nasional dan taman wisata; dan (3) Taman buru, yaitu kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.

Perkembangan pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia tidak lepas dari dinamika dan relasi positif negatif antara para pihak yang bersinggungan langsung di tingkat tapak. Lembaga pengelolaan kawasan konservasi, Balai Taman Nasional contohnya, tidak dapat menghindari interaksi sosial dan budaya dengan masyarakat adat maupun masyarakat lokal yang memang tidak dapat dipungkiri ada dan berada di dalam maupun di sekitar kawasan hutan konservasi tersebut.

Kesepakatan-kesepakatan global dalam pengelolaan taman nasional menuntut adanya perubahan cara pandang pengelolaan, di antaranya adalah hasil Kongres World Commission on Protected Areas (WCPA) di Caracas, Venezuela tahun 1993, yang menyepakati bahwa pengelolaan kawasan konservasi tidak bisa hanya dikelola oleh kelembagaan tunggal (*single institution*). Dalam IUCN (2003), dinyatakan hasil WPC tahun 2003 yang di antaranya adalah rekomendasi 5.24 tentang Masyarakat Adat, dan Kawasan-kawasan Konservasi yang mengadopsi resolusi World Conservation Congress (WCC) 1.53 yang mempromosikan suatu kebijakan yang berdasar pada prinsip-prinsip: 1 Mengenali hak-hak masyarakat adat tentang lahan atau wilayah dan sumber dayanya yang berada pada kawasan konservasi. 2 Mengenali keperluan persetujuan-persetujuan yang harus dibuat dengan masyarakat adat sebelum penetapan kawasan konservasi di lahan atau wilayah mereka; dan 3 Mengenali hak-hak masyarakat adat yang terkait dengan partisipasi secara efektif dalam pengelolaan kawasan konservasi yang ditetapkan di lahan atau wilayah mereka, dan membangun konsultasi untuk mengadopsi segala keputusan yang mempengaruhi hak-hak dan kepentingan mereka di lahan atau wilayahnya (Kosmaryandi *et al*, 2012).

Menurut (Dunggio dan Gunawan, 2009), Sejarah penetapan taman nasional untuk pertama kalinya dimulai di Amerika Serikat ketika Presiden Abraham Lincoln menetapkan Yellowstone sebagai kawasan perlindungan alam yang kemudian menjadi taman nasional pertama di dunia. Lebih lanjut, bahwa sejarah juga mencatat setidaknya ada lima tonggak penting dalam perkembangan pengelolaan kawasan konservasi yaitu:

1. Era Yellowstone dimana pembangunan taman nasional hanya ditujukan untuk perlindungan spesies tertentu sebagai prioritas utama sehingga “menyingkirkan” kepentingan kehidupan manusia.
2. Era 70-an, pada Kongres IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) di New Delhi (tahun 1969) menetapkan bahwa kawasan konservasi harus dikategorisasikan ke dalam beberapa kategori menurut kriteria tertentu, agar pengelolaannya lebih efektif dan efisien. Merujuk pada hasil kongres tersebut, pada tahun 1978, IUCN mengembangkan pedoman kategorisasi kawasan konservasi.
3. Era 80-an pada Kongres CNPPA (Commission on National Parks and Protected Areas) atau Kongres Taman Nasional ke-3 di Bali tahun 1982 yang bertema *Park for Sustainable Development*, memberikan pesan agar setiap unit kawasan konservasi harus dibuat rencana pengelolaan (*management plan*) sebagai panduan bagi pengelola untuk mencapai tujuannya.
4. Era 90-an pada Kongres WCPA (World Commission on Protected Areas) di Caracas, Venezuela tahun 1993, mengamanahkan bahwa pengelolaan kawasan konservasi tidak bisa hanya dikelola oleh *single institution*, melainkan harus melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan, khususnya masyarakat sekitar kawasan. Implikasinya, berbagai pendekatan pengelolaan seperti pendekatan partisipatif (*participatory approach*) dan pengelolaan bersama (*joint management* ataupun *collaborative management approaches*) menjadi acuan pengelolaan sumberdaya hutan, termasuk kawasan konservasi. Era ini juga ditandai dengan maraknya proyek *mega-juta* dollar seperti ICDP atau semacamnya.
5. Era 2000-an dari hasil Kongres WCPA terakhir di Durban, Yordania tahun 2003, dimandatkan bahwa pengelolaan kawasan konservasi harus mampu memberikan manfaat ekonomi bagi para pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan konservasi. Seiring dengan perkembangan terkini tersebut, maka berbagai kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan konservasi juga selayaknya mengikutinya. Hal ini penting, karena institusi konservasi yang ada di Indonesia saat ini masih mengikuti konsep eraera sebelumnya.

Secara bio-geografis, hutan Indonesia terpisah oleh batas-batas ekologis yang tajam. Perbedaan mencolok antara hutan Indonesia di bagian barat dengan bagian timur terletak pada jenis fauna, satwa dan tipe habitat. Batas yang cukup tajam itu dipisahkan sepanjang garis Wallace yang terletak di Kalimantan di tepi landas kontinen sunda. Keluarga pohon kayu tropis yang paling penting, dipterokarpa, ditemukan hampir seluruhnya di dataran rendah hujan hutan di sebelah barat garis Wallace.

Fakta bahwa Indonesia memiliki kawasan konservasi yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi, sebanyak 556 unit dengan luas mencapai 27,26 juta hektare, dimana seluas 5,32 juta ha merupakan kawasan konservasi perairan atau 21,26% dari total luas kawasan hutan dan kawasan konservasi perairan di Indonesia. Mewakili seluruh tipe ekosistem yang ada di wilayah Nusantara, mulai dari ekosistem pegunungan, hutan dataran rendah, savana, ekosistem pantai, padang lamun sampai ekosistem terumbu karang (Wiratno, 2017).

Hutan Indonesia diselimuti oleh hutan hujan tropis kecuali pulau Jawa bagian selatan dan timur, Madura, Bali dan pulau-pulau Sunda kecil yang memiliki hutan monsun tropis. Sabuk ini secara musiman membawa iklim kering dan meluas ke selatan Papua, dan ke utara ke bagian selatan Sulawesi. Di Sumatra, terdapat hutan hujan tropis dataran rendah didominasi oleh dipterokarpa. Terdapat pula hutan rawa gambut dan

bakau yang sangat luas di sepanjang pantai bagian timur. Tulang punggung Sumatra berupa pegunungan memiliki hutan hujan pegunungan yang luas dan sebagian besar masih utuh. Di bagian lembah intermontana tengah yang agak kering dan di jauh di utara terdapat satu-satunya hutan pinus alami (*Pinus merkush*) di Indonesia (Collins *et al*, 1991).

Selanjutnya Jawa, hutan hujan mungkin awalnya ditemukan di barat daya Jawa dan di daerah pegunungan, tetapi sekarang terbatas pada wilayah yang terisolasi pegunungan. Jati, kemungkinan dibawa oleh manusia dan banyak ditanam di dataran rendah musiman di bagian tengah dan timur. Hutan musim alami sebelumnya tersebar luas di utara dan Jawa bagian timur, sekarang semuanya sangat terganggu. Di mana api dikecualikan, hutan mulai berubah menjadi formasi hutan montana rendah dan hutan sub alpine. Di pegunungan tinggi terdapat formasi herba sedang. Sementara padang rumput pegunungan yang luas diakibatkan oleh kerusakan hutan karena kebakaran. Formasi karst batu kapur terjadi di pantai selatan dan timur laut, sebagian besar sekarang sudah ditanami jati. Sebagian kecil Jawa juga terdapat hutan rawa dan hutan bakau.

Di Kepulauan Sunda Kecil (Nusa Tenggara), lanjut Collins *et al* (1991), hutan sabana dengan cemara dan ekaliptus sekarang menutupi sebagian besar kepulauan ini. Hutan hujan tidak pernah luas dan hanya bertahan di dalam daerah terpencil di lembah curam di sisi gunung yang menghadap ke selatan. Di tempat lain, ada hutan monsun dan padang rumput yang luas. Timor pernah memiliki hutan kayu cendana alam yang luas (*Sanlalum album*). Sementara hutan hujan pegunungan tidak subur dan memiliki ciri khas dengan tidak adanya lumut, meskipun beberapa memiliki jenggot lumut *usnea*.

Di Kalimantan, lanjutnya, hutan hujan dataran rendah tumbuh hingga ketinggian 1000 meter dari permukaan laut. Di atas itu, terdapat formasi hutan pegunungan yang memiliki kelimpahan komunitas pohon *Fagaceae*, medang-medangan (*Lauraceae*) dan jambu-jambuan (*Myrtaceae*). Kalimantan memiliki hutan hujan dataran rendah yang sangat luas juga mangrove, hutan rawa gambut dan air tawar, dan hutan kerangas terbesar di Asia Tenggara. Degradasi cukup luas terjadi pada hutan di Kalimantan akibat eksploitasi berlebihan, kini kawasan terdegradasi banyak ditumbuhi alang-alang.

Di Sulawesi, lanjutnya, terdapat hutan hujan pegunungan yang luas. Jejak hutan hujan dataran rendah berkembang ekstensif, kecuali di semenanjung barat daya. Ada beberapa jenis dipterokarpa, termasuk spesies kayu utama *agathis dammara* dan *eboni diospyros spp*. Sementara flora kurang kaya dibanding pulau-pulau di barat. Sulawesi memiliki bidang hutan terluas yang terletak di atas bebatuan ultrabasa di (di ujung Teluk Bone). Sementara di barat daya, formasi hutannya khas dengan wilayah kapur karst. Hanya ada sebagian kecil dari hutan rawa pedalaman, dan mangrove tumbuh di petak-petak terisolasi di selatan. Iklim musiman mendukung hutan monsun terjadi, terutama di selatan.

Kepulauan Maluku terdapat hutan yang sebagian merupakan hutan monsun dan sebagian perhumid, baik di dataran rendah maupun pegunungan. Formasi lain termasuk hutan bakau dan air tawar rawa dengan tegakan sagu yang luas (*Meiroxylon sagu*). Di Irian Jaya, sekarang Papua, terlepas dari sabuk hutan monsun dan hutan sabana di selatan, vegetasinya adalah salah satu hamparan alam murni terbesar hutan hujan tropis di Asia Tenggara. Pohon kayu termasuk *Calophyllum* dan *Intsia* di dataran rendah dan *Agathis* dan *Araucana* di perbukitan, di mana mereka muncul sebagai tegakan yang padat. Hutan hujan pegunungan bagian bawah ditemukan pada ketinggian 1.400-3.000 m, sementara bagian atas hutan pegunungan hingga 3.400-3.600 m, ditemukan hutan sub alpine dan padang rumput alpine. Terdapat pula hutan rawa air tawar dengan pohon sagu dan bakau yang luas serta bidang besar hutan rawa gambut di pantai barat, yang baru ditemukan pada 1980-an. Di selatan adalah hutan monsun, hutan sabana dengan banyak hutan kayu putih, dan padang rumput. Pegunungan Fak Fak memiliki hutan kapur dan areal padang rumput yang luas. Sementara hutan pantai memiliki flora untai Indo-Pasifik yang khas (Collins *et al*, 1991).

Menurut Wiratno (2017), bahwa sebagian besar atau 60,19% kawasan konservasi berstatus sebagai taman nasional. Beberapa dari taman nasional memiliki pengakuan global seperti World Heritage, Biosphere Reserve, ASEAN Heritage dan Ramsar Site. Pengakuan global merupakan bukti bahwa kawasan konservasi di Indonesia memiliki nilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati secara global. Kawasan konservasi juga berfungsi sebagai daerah resapan air, 'pabrik air', perlindungan hidrologi, iklim mikro, kesuburan tanah, sumber mikroba, keseimbangan siklus air, penyimpan karbon dan menjaga kesehatan daerah aliran sungai dari hulu sampai ke hilir.

Wiratno juga mengurai fakta-fakta lain terkait fragmentasi habitat dan pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia. Selain adanya perubahan penggunaan lahan, konflik satwa liar, konflik sosial, ada pula usulan konversi kawasan menjadi hutan adat.

Menurutnya, pengelolaan kawasan konservasi tidak dapat dilakukan hanya terbatas pada teritori kawasan tanpa mempertimbangkan perubahan lahan, kerusakan habitat, sosial ekonomi, budaya dan pembangunan secara umum di daerah penyangganya dan atau pada skala lanskap yang lebih luas. Pengelolaan kawasan konservasi butuh ragam dukungan disiplin ilmu, pendekatan dan konsistensi kebijakan, berikutan dengan dukungan semua pihak di berbagai level. Dalam konteks ini, dukungan yang dibutuhkan adalah dukungan nyata yang diharapkan dapat mereplika berbagai keberhasilan pengelolaan kawasan konservasi pada titik-titik tertentu di Indonesia.

Setidaknya, kata Wiratno, diperlukan penerapan empat prinsip tata kelola yaitu transparansi, partisipasi, pertanggung jawaban kolektif dan akuntabilitas dalam rangka penyelesaian masalah dan pengembangan potensi di dalam kawasan konservasi dan di daerah penyangganya. Hal itu dilakukan dengan turut melibatkan desa dengan perangkat kelembagaannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan kawasan konservasi.

Menurutnya, cara pandang pengelolaan kawasan konservasi mestinya mengedepankan 10 prinsip, yakni: Prinsip 1, Masyarakat Sebagai Subjek. Prinsip 2, Pengormatan HAM. Prinsip 3, Kerjasama Lintas Eselon I. Prinsip 4, Kerjasama Lintas Kementerian. Prinsip 5, Penghormatan Nilai Budaya dan Adat. Prinsip 6, *Multilevel Leadership*. Prinsip 7, *Scientific Based Decision Support System*. Prinsip 8, *Resot (Field) Based Management*. Prinsip 9, *Reward and Mentorship*, dan Prinsip 10, *Learning Organization*.

Bagian 2. Sengketa Tenurial

Pada bagian ini, ada baiknya mengulang kembali narasi yang telah disampaikan dalam laporan mengenai tata kelola konflik tenurial. Mengapa penting, karena revisi zonasi yang dilakukan pada taman nasional yang menjadi subjek kajian ini adalah bagian tidak terpisahkan dari proses resolusi konflik tenurial di taman nasional.

Narasi sebelumnya dimulai dengan sebuah ayat di dalam QS. Ali Imran:140, yang artinya: *Jika kamu mendapat luka, maka merekupun mendapat luka yang serupa. Dan masa itu, Kami pergilirkan di antara manusia, dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman, dan agar sebagian kamu dijadikan-Nya syuhada. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim.* Petikan ayat suci tersebut relevan apa yang sedang didiskusikan dalam catatan ini. Begitulah kehidupan, sampai suatu ketika, kehacuran alam semesta terjadi.

Ingatan tentang ayat ini justru memicu pemikiran kritis untuk memahami lebih dalam mengenai konflik, mengapa konflik terjadi, bagaimana tipologinya, sejauh mana dia diselesaikan, upaya apa yang harus dilakukan, serta sederet pertanyaan menggantung lainnya. Di tahap awal, ada baiknya membuka catatan-catatan terdahulu mengenai konflik.

Konflik adalah percekocokan, perselisihan, atau pertentangan (KBBI Daring, 2016). Padanan kata lain yang sesuai dengan kata itu adalah perseteruan, perang, permusuhan, kontradiksi, perbantahan, cedera, percederaan, kelahi, kesumat, rivalitas, antagonisme, inkompatibilitas, paradoks, pertikaian, pertengkaran, sengketa, perpecahan, pergesekan, konfrontasi, friksi dan bentrokan.

Penting pula memahami lebih dalam bahwa konflik bukan hanya tindakan dari satu pihak, tapi juga respon yang diberikan pihak lain atas tindakan tersebut. Serangkaian tindakan dan respon ini memberikan skala atau level terhadap suatu konflik.

Dalam pengertian yang lebih bebas, konflik dapat diartikan sebagai sebuah keadaan atau fenomena yang melibatkan pertentangan internal maupun eksternal. Pertentangan internal hanya melibatkan satu pihak saja, misalnya; individu tertentu atau organisasi tertentu. Sementara pertentangan eksternal melibatkan dua pihak atau lebih, bisa antar individu, antara individu dengan organisasi maupun sebaliknya. Berbagai pertentangan itu dipicu oleh ragam kepentingan maupun ragam keinginan. Dengan demikian, konflik melibatkan serangkaian kepentingan, serangkaian keinginan dari pihak yang berkonflik. Indonesia tak lepas dari konflik. Berkait itu, dalam konteks buku ini, konflik yang dibahas adalah yang berhubungan dengan tenurial.

Tenure masuk ke dalam bahasa Jermanik yang pertama kali dituturkan di Inggris pada awal abad pertengahan. Terdapat 6 arti kata *tenure* di Kamus Bahasa Inggris Terjemahan Indonesia, yang masuk ke dalam kelas kata nomina (kata benda), yaitu; harta benda, masa jabatan, masa kepemilikan, pemilikan, kedudukan tetap, dan harta. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Tenure* menurut kamus Bahasa Inggris terjemahaan Indonesia diartikan sebagai *harta benda* (Lektur.id).

Di Indonesia kata *tenure* dalam bahasa Inggris, atau *tenere* dalam Bahasa Latin dikenal dengan istilah tenurial. Secara harfiah istilah tenurial berarti: memelihara, memegang dan memiliki. Schlager dan Ostrom, 1992, mengartikan tenurial sebagai sekumpulan hak yang mencakup hak mengakses dan hak pakai untuk mengelola, eksklusif, dan mengalihkan. Dikarenakan Tenurial merujuk pada kandungan atau hakikat dari hak dan jaminan atas hak. Hal ini berarti hak dari sudut pandang yang berbeda, yaitu terhadap hak yang tumpang-tindih (sewaktu dua orang atau lebih mengaku berhak atas sumber daya yang sama) dan terkadang juga konflik (Larson, 2013).

Sistem tenur merupakan sebuah sistem yang kompleks yang melibatkan berbagai kepentingan pada lahan atau lokasi yang bersamaan. Sistem tenur bukan hanya melulu berkaitan dengan penguasaan lahan, tapi lebih luas dari itu, sistem ini melibatkan semua kepentingan dalam pengelolaan lahan tersebut (Jpang, 2020).

Lebih jauh Jpang mengilustrasikan, di satu bentang alam, ada satu kesatuan hutan yang dimiliki oleh Suku Hajun. Hutannya bernama Hutan Jahun. Sementara sekelompok pencari madu telah mendapat izin dari pemangku adat Suku Hajun untuk memanen madu saban musim di dalam hutan Jahun. Izin tersebut diberikan oleh para pemangku adat dalam sebuah ritual adat pada tahun 1905. Saban musim panen, Orang Hajun yang ada di kawasan hutan Jahun mendapatkan bagiannya. Anak keturunan pencari madu tersebut meneruskan tradisi para pendahulunya.

Sebagian orang-orang Suku Hajun memang masih tinggal di dalam hutan Jahun. Mereka memanfaatkan sebagian wiayah hutan Jahun untuk bercocok tanam dan menggembala ternak. Beberapa tempat di kawasan Hutan Jahun merupakan tempat keramat yang kerap didatangi Suku Hajun. Di antaranya misalnya: Mata Air Akar Beringin, Makam Keramat Meranti Merah, dan Batu Besar Bertali Akar.

Para pencari rotan dan enau, kerap melewati tempat-tempat keramat ini. Tapi Suku Hajun yang tinggal di hutan Jahun hanya memperbolehkan kelompok ini mengambil rotan dan enau yang tidak terlalu dekat jaraknya dengan tempat-tempat keramat itu. Enau dan rotan yang jaraknya dekat, itu biasanya menjadi hak orang Hajun. Suku Hajun memanfaatkan rotan dan enau untuk kepentingan sehari-hari.

Di kawasan hutan Jahun terdapat beberapa sungai. Sungai-sungai ini dikuasai oleh Suku Nujah. Orang-orang Suku Nujah mencari ikan untuk keperluan mereka sendiri dan sebagian lagi dijual. Suku Hajun dan Suku Nujah telah memiliki kesepakatan untuk berbagi wilayah pengelolaan. Suku Nujah hanya diperbolehkan mencari ikan di sungai-sungai untuk kepentingan sendiri atau dijual, itu saja. Suku Nujah juga boleh mendiami daratan yang berada di tepi kiri-kanan sungai.

Beberapa orang pemangku adat Suku Hajun bukanlah orang yang berdomisili di kawasan hutan Jahun. Lebih dari setengah pemangku adat sudah tinggal jauh di kota atau bahkan di tempat lain, jaraknya mungkin berkilometer dari hutan Jahun. Sebagian kecil pemangku adat masih tinggal di kawasan Hutan Jahun.

Setengah Hutan Jahun merupakan kawasan hutan lindung dalam versi pemerintah. Hal ini ditandai dengan adanya patok batas yang telah dipasang sejak tahun 1980. Sebagian lagi merupakan hutan konversi terbatas dan sebagian kecil yang dekat dengan perumahan di batas luar hutan merupakan Areal Penggunaan Lain (APL). Hutan Jahun berbatasan langsung dengan kawasan produksi yang telah dikuasai oleh PT Plat Hitam Bara. Perusahaan ini ingin memperluas areal usahanya dengan menjadikan Hutan Jahun sebagai kawasan dengan Nilai Konservasi Tinggi.

Beberapa pendatang sudah bertani padi ladang di kawasan ini secara turun-temurun. Mereka datang dari pusat desa, sebagian mereka berasal dari suku Ngoal. Tapi pendatang ini hanya diberi izin oleh pemangku adat Suku Hajun untuk mengelola beberapa titik lahan dan tidak diperbolehkan lebih luas dari itu.

Suku Ngoal, adalah suku mayoritas di sekitar kawasan hutan Jahun. Suku ini mendiami sebagian besar wilayah kecamatan. Menurut versi orang terkemuka dari Suku Ngoal, mereka adalah satu-satunya suku yang memiliki bukti kepemilikan atas hutan Jahun. Dalam dokumen berbahasa Belanda, Suku Ngoal membuktikan bahwa mereka menguasai lahan hutan kecuali untuk daerah yang ditempati dan dikuasai oleh suku Hajun dan Suku Nujah.

Cukup kompleks bukan? Jika saja ada pihak yang berkepentingan membuat keputusan-keputusan baru di wilayah tersebut, maka siapa yang harus diajak bicara dan berunding? Apa yang harus dilakukan? (Jpang, 2020)

Sebelum jauh, sistem tenurial tentunya juga melibatkan beraneka sistem yang berlaku pada satu lokasi tertentu. Ada sistem adat, sistem sosial, sistem ekonomi, sistem penyangga kehidupan hingga pada sistem yang berkaitan dengan regulasi. Hal ini terlalu kompleks kalau hanya diartikan pada urusan kepemilikan, penguasaan dan pengelolaan lahan, karena sistem-sistem itu berada pada wilayah atau lokasi yang sama, dan berlaku pada waktu yang sama pula.

Di lain sisi, ada pula sistem yang berkaitan dengan pihak lain di luar manusia sebagai pengelola. Sistem penyangga kehidupan misalnya. Sistem ini memengaruhi secara tidak langsung, dengan menyediakan sumber-sumber pangan, air, udara dan jasa lingkungan lain. Bila sistem ini berubah, maka tentunya juga akan berdampak pada – setidaknya – sistem pengelolaan lahan.

Hutan menjadi sumber konflik karena banyak pihak yang berkepentingan dalam pengelolaannya, baik konflik antar pribadi maupun konflik dengan institusi negara atau perusahaan. Sebagian konflik yang terjadi dalam pengelolaan hutan adalah konflik penguasaan lahan (tenurial). Menurut Larson (2013) tenurial lahan hutan berkenaan dengan siapa yang memiliki lahan hutan, dan siapa yang memanfaatkan, mengelola, dan memutuskan perihal sumber daya hutan. Tenurial lahan hutan menentukan siapa yang diizinkan untuk menggunakan sumber daya, dengan cara bagaimana, selama berapa lama dan dengan syarat apa dan siapa yang berhak mengalihkan kepada pihak lain dan bagaimana caranya (Ambarwati *et al*, 2018).

Menurut Working Group Tenure (2012), sejak era reformasi, pembangunan dan pengelolaan hutan menghadapi berbagai tantangan baru. Dibandingkan dengan periode sebelumnya, laju kerusakan hutan semakin tinggi. Selama tahun 1997-2000, pada awal era otonomi daerah, angka kerusakan hutan meningkat dari 1,87 juta hektare menjadi 2,83 juta hektare karena euforia reformasi yang menyebabkan pembabatan hutan secara besar-besaran.

Dalam konteks ini, keberadaan pemangku kawasan seperti Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) dan Taman Nasional (TN), seringkali dibenturkan dengan proses penataan ruang yang kental dengan isu pelepasan kawasan hutan. Kawasan hutan yang *open access*, serta lemahnya kemantapan kawasan akibat rendahnya pengakuan oleh masyarakat, menyebabkan permasalahan sosial yang kompleks. Kondisi ini berakar pada kondisi sosial-budaya masyarakat adat, kebutuhan pokok untuk hidup layak dan kemiskinan, serta situasi ekonomi yang menggerakkan berbagai aktivitas haram (yang dilarang) di dalam kawasan hutan (Working Group Tenure, 2012).

Catatan mongabay.co.id (2014) menyebut ketidakpastian areal kawasan hutan merupakan salah satu yang menghambat efektifitas tata kelola hutan di Indonesia. Dari seluruh kawasan hutan – seluas 130 juta hektare – maka areal yang telah selesai ditatabatas (temu gelang) baru sekitar 12% (14,2 juta hektare). Ketidakpastian ini memicu munculnya konflik tenurial dengan berbagai pihak yang berkepentingan dengan kawasan hutan. Padahal setidaknya terdapat 50 juta orang yang bermukim di sekitar kawasan hutan dengan lebih dari 33 ribu desa yang berbatasan dengan kawasan hutan.

Persoalan ketidakpastian tata batas hutan ini tidak hanya menimpa masyarakat adat ataupun masyarakat lokal yang berdiam dan memanfaatkan lahan dan sumber daya di dalam kawasan hutan, tetapi juga institusi yang memiliki izin usaha kehutanan dan pemerintah. Di tingkat lapangan, batas yang berupa patok

batas hutan juga sering kali tidak jelas sehingga sulit diverifikasi dalam pembuatan berita acara (mongabay.co.id, 2014).

Konflik tenurial hutan adalah berbagai bentuk perselisihan atau pertentangan klaim penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan penggunaan kawasan hutan. Suatu konflik terjadi karena terdapat perbedaan cara pandang antara beberapa pihak terhadap obyek yang sama, dan antara beberapa individu atau kelompok tersebut merasa memiliki tujuan yang berbeda. Konflik menyangkut hubungan sosial antar manusia baik secara individual maupun kolektif. Semua hubungan sosial pasti memiliki tingkat antagonisme, ketegangan, atau perasaan negatif. Hal ini merupakan akibat dari keinginan individu atau kelompok untuk meningkatkan kesejahteraan, kekuasaan, prestise, dukungan sosial, atau penghargaan lainnya (Sumartias & Rahmat, 2013).

Konflik Tenurial Hutan adalah berbagai bentuk perselisihan atau pertentangan klaim penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan penggunaan kawasan hutan (P.84, 2015). Konflik tenurial kawasan hutan tentu bukanlah konflik tersendiri yang statis. Konflik ini dinamis seiring perkembangan dan dinamika, baik di lapangan maupun di level regulasi pemerintah. Penyelesaian konflik semacam ini tentunya juga menuntut perspektif beragam dari beragam latar keahlian.

Demikianlah, tenurial dan konflik berkelindan. Saling sandera, bahkan kadang saling tikam. Namun tak jarang keduanya justru menemukan titik terang penyelesaian.

Untuk mengurai hal tersebut, diperlukan pemahaman yang utuh tentang apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan, dan apa sesungguhnya kepentingan dari masing-masing pihak. Pada titik ini, mari mulai menjelajah lebih dalam.

Sebuah catatan dihadirkan Purwawangsa (2017) terkait konflik di kawasan hutan konservasi. Catatan ini menarik karena memberikan gambaran tentang bagaimana konflik terjadi di kawasan konservasi. Kendati tidak terfokus pada konflik tenurial, catatan ini penting sebagai dasar atas kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan.

Setiap TN memiliki tipologi konflik yang berbeda-beda. Konflik di Taman Nasional Gunung Leuser yang berada di Kabupaten Langkat disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang mengizinkan perusahaan untuk melakukan pembinaan habitat dengan cara menebang pohon. Perambahan yang berujung konflik di Taman Nasional Tesso Nilo utamanya disebabkan oleh adanya kekosongan aktivitas riil dilapangan sebagai akibat dari adanya perpindahan pemegang hak konsesi. Penyebab konflik yang terjadi di Taman Nasional Bukit Duabelas, disebabkan karena aktivitas perladangan dan perkebunan masyarakat sudah berjalan sebelum Taman Nasional ditetapkan. Penyebab konflik di Taman Nasional Kutai adalah adanya deposit batubara yang ingin dikuasai oleh sekelompok oknum masyarakat dan penyebab konflik di Taman Nasional Halimun Salak adalah adanya perbedaan persepsi antara para sesepuh adat dengan pemerintah dan adanya perluasan areal Taman Nasional yang sebelumnya merupakan areal hutan produksi milik Perhutani (Purwawangsa, 2017).

Bagian 3. Rezonasi Taman Nasional

Di gelanggang konservasi, kemungkinan kata konflik tenurial jarang terdengar. Istilah ini sepertinya larut dalam pedihnya urusan perburuan satwa, patroli kawasan, pengerusakan lahan, perambahan, bahkan pencurian kayu. Di berbagai tempat istilah konflik tenurial mungkin akan diganti dengan Penggunaan Kawasan Tanpa Izin (PKTI), atau istilah lain yang lebih ringan.

Kendati demikian, konflik tenurial di kawasan konservasi tentulah bukan konflik yang berdiri tunggal. Dia akan menjadi penyebab atau menyebabkan persoalan lain.

Sebagai salah satu jawaban, zonasi taman nasional menjadi salah satu mata belati yang diharapkan dapat mengatasi konflik tenurial di lapangan. Zonasi merupakan pembedaan wilayah pengelolaan taman nasional yang berbasis fungsi, sebab taman nasional merupakan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zona yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.

Wilayah di dalam kawasan taman nasional, yang dibedakan menurut fungsi dan kondisi ekologis, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat, disebut sebagai zona. Taman nasional minimal mempunyai tiga zona yaitu inti, rimba, dan pemanfaatan. Keberadaan zonasi taman nasional berakibat pada akses, terutama masyarakat sekitar, berupa pembatasan, larangan atau kegiatan yang hanya diperbolehkan jika telah memperoleh izin. Akses dimaknai Ribot & Peluso (2003: 154) sebagai “kemampuan untuk memperoleh manfaat dari sesuatu”. Mekanisme akses, menurut Ribot & Peluso (2003) terbagi dua yaitu: hak/aturan legal, serta struktural dan relasional. Mekanisme akses yang pertama berdasarkan hukum, kebiasaan atau konvensi termasuk *illegal access*, sedangkan mekanisme akses yang kedua melalui teknologi, modal, pasar, pekerjaan, pengetahuan, kewenangan, identitas sosial, negosiasi dari relasi sosial. Dengan begitu, pembuatan zonasi serta pembagiannya tidak hanya menentukan pemanfaatan kawasan, tapi berakibat pada akses para pengguna, baik kegiatan yang dilarang maupun tidak (Amir Mahmud, 2015).

Proses zonasi menyerupai istilah yang digunakan Vandergeest (1995) dan Vandergeest & Peluso (1996) yaitu teritorialisasi. Teritorialisasi didefinisikan Vandergeest sebagai proses yang dibuat negara untuk mengontrol orang dan tindakannya dengan menarik batas di sekeliling suatu ruang geografis, yang melarang beberapa kategori orang untuk masuk ke dalam ruang tersebut, dan memperbolehkan atau melarang kegiatan-kegiatan tertentu dalam batas tersebut. Teritorialisasi dibagi tiga tahap (Vandergeest, 1995; Vandergeest & Peluso, 1996) yaitu: (1) Menegaskan kedaulatan teritorial dan kontrol hasil dengan menegaskan bahwa semua tanah “tak bertuan” atau “bukan milik siapa-siapa” adalah milik negara. (2) Pembuatan batas demarkasi wilayah yang jelas seperti antara “kawasan hutan” dan nonhutan. (3) “Teritorialisasi fungsional” dengan pembagian berbagai fungsi kawasan berdasarkan kriteria ilmiah seperti hutan produksi, hutan lindung dan cagar alam. Dalam konteks taman nasional, zonasi dan pembagiannya dibentuk dengan mengacu pada fungsi tiap zona, seperti inti, rimba dan pemanfaatan, berdasarkan kriteria ilmiah seperti kajian ekologi. Pembagian zona menurut fungsinya bertujuan mengatur kegiatan pemanfaatan yang dilarang dan yang diperbolehkan.

Zona pengelolaan pada taman nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas zona inti; zona rimba; zona pemanfaatan; dan/atau zona lainnya sesuai dengan keperluan. Zona lainnya sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf d, terdiri atas : zona perlindungan bahari; zona tradisional; zona rehabilitasi; zona religi, budaya dan sejarah; dan/atau zona khusus (P.76, 2015).

Selanjutnya, P.76 menjelaskan, Zona inti adalah kawasan taman nasional yang mutlak dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya perubahan berupa mengurangi, menghilangkan fungsi dan menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli. Kriteria zona inti meliputi: 1) memiliki ekosistem atau

merupakan perwakilan tipe ekosistem atau fenomena/gejala alam dan formasi geologi yang masih asli dan alami; 2) merupakan konsentrasi komunitas tumbuhan/biota target dan/atau merupakan area dengan keragaman jenis yang tinggi; 3) merupakan lokasi tempat kawin dan bersarang satwa target dan/atau tempat berpijah dan pembesaran satwa/biota target; dan/atau 4) tempat singgah satwa migran secara periodik.

Zona rimba adalah bagian taman nasional yang ditetapkan karena letak, kondisi dan potensinya mampu mendukung kepentingan pelestarian pada zona inti dan zona pemanfaatan. Kriteria zona rimba meliputi: 1) merupakan daerah sebaran tumbuhan dan daerah jelajah satwa serta perkembang-biakan jenis target; 2) berbatasan dengan zona inti dan atau zona pemanfaatan/batas fungsi; 3) merupakan lokasi tempat kawin/berpijah dan pembesaran satwa/biota target; 4) memiliki ekosistem yang masih asli dan alami; dan/atau 5) masih ditemukan tumbuhan dan satwa/biota utama dalam jumlah yang cukup.

Zona pemanfaatan adalah bagian dari taman nasional yang ditetapkan karena letak, kondisi dan potensi alamnya yang terutama dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata alam dan kondisi lingkungan lainnya. Kriteria zona pemanfaatan meliputi: 1) merupakan wilayah yang memiliki keindahan alam/daya tarik alam atau nilai sejarah dan/atau wilayah dengan aksesibilitas yang mampu mendukung aktivitas pemanfaatan; 2) merupakan wilayah yang memungkinkan dibangunnya sarana prasarana antara lain untuk menunjang pemanfaatan dan pengelolaan; 3) bukan merupakan konsentrasi komunitas tumbuhan/biota utama; 3) bukan merupakan areal dengan keragaman jenis yang tinggi; dan/atau 4) terdapat potensi jasa lingkungan yang dapat dimanfaatkan.

Zona Perlindungan Bahari adalah bagian dari kawasan perairan laut yang ditetapkan sebagai areal perlindungan jenis tumbuhan, satwa dan ekosistem serta sistem penyangga kehidupan. Kriteria zona perlindungan bahari taman nasional disamakan dengan kriteria zona rimba taman nasional

Zona tradisional adalah bagian dari taman nasional yang ditetapkan sebagai areal untuk kepentingan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat yang secara turun-temurun mempunyai ketergantungan dengan sumber daya alam. Kriteria zona tradisional merupakan wilayah yang memenuhi kriteria sebagai zona rimba atau zona pemanfaatan yang telah dimanfaatkan untuk kepentingan tradisional masyarakat secara turun-temurun.

Zona rehabilitasi adalah bagian dari taman nasional yang ditetapkan sebagai areal untuk pemulihan komunitas hayati dan ekosistemnya yang mengalami kerusakan. Kriteria zona rehabilitasi merupakan wilayah yang telah mengalami kerusakan sehingga perlu dilakukan kegiatan pemulihan ekosistem.

Zona religi, budaya dan sejarah adalah bagian dari taman nasional yang ditetapkan sebagai areal untuk kegiatan keagamaan, kegiatan adat-budaya, perlindungan nilai-nilai budaya atau sejarah. Kriteria zona religi, budaya dan sejarah merupakan wilayah yang memenuhi kriteria sebagai zona rimba atau zona pemanfaatan yang telah dimanfaatkan untuk kepentingan religi, adat budaya, perlindungan nilai-nilai budaya atau sejarah.

Zona khusus adalah bagian dari taman nasional yang ditetapkan sebagai areal untuk pemukiman kelompok masyarakat dan aktivitas kehidupannya dan/atau bagi kepentingan pembangunan sarana telekomunikasi dan listrik, fasilitas transportasi dan lain-lain yang bersifat strategis. Kriteria zona khusus meliputi: 1) terdapat bangunan yang bersifat strategis yang tidak dapat dielakkan; 2) merupakan pemukiman masyarakat yang bersifat sementara yang keberadaannya telah ada sebelum penetapan kawasan tersebut sebagai taman nasional; dan/atau 3) memenuhi kriteria sebagai wilayah pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan yang keberadaannya tidak mengganggu fungsi utama kawasan.

Penataan zona/blok pada kawasan konservasi umumnya mengacu pada 2 prinsip dasar, yakni: pertama, mengakomodir kepentingan konservasi ekosistem dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan konservasi sebagai penunjang sistem penyangga kehidupan. Dan *kedua*, merupakan dasar dalam penyusunan rencana tata ruang kawasan konservasi dan rencana-rencana lain dalam rangka meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi.

Berdasarkan kajian dari Direktorat PIKA dan Direktorat Kawasan Konservasi tahun 2018, dalam kawasan konservasi daratan, terdapat areal terbuka (*open area*) seluas lebih kurang 2,2 juta hektare atau 9,95% dari total 22.108.630 hektare luas kawasan konservasi daratan. Daerah terbuka yang berupa perambahan, biasanya merupakan perkebunan sawit, kopi, coklat, karet atau untuk pertanian lahan kering, akibat illegal logging, kebakaran, dan penambangan liar (Wiratno, 2018).

Sehingga, kawasan konservasi yang ada tidaklah seindah sebagaimana yang dibayangkan. Selain dari degradasi lanskap menyebabkan ketidak sesuaian kondisi objek kawasan konservasi yang seharusnya merupakan hutan dengan tutupan yang baik, dalam kawasan konservasi juga terdapat keberadaan masyarakat adat yang secara turun temurun memiliki kearifan budaya sendiri dalam pengelolaan kawasan tersebut.

Keberadaan masyarakat adat ini diakui oleh konsitusi. Namun perkembangan politik hukum kerap mengangga masyarakat adat tidak, akibatnya mereka jarang atau tidak pernah terlibat dalam pengelolaan kawasan hutan.

Perkembangan selanjutnya, gelombang reformasi mendorong perhatian kepada masyarakat adat. Hal ini ditandai dengan putusan MK 35/2012 yang memisahkan hutan adat dari hutan negara.

Sejalan dengan itu, lanjut Wiratno, angin segar penegakan hak atas wilayah adat khususnya untuk hutan adat tercatat sampai dengan tahun 2018. Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA)/ Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), HUMA dan mitra lainnya telah mengusulkan wilayah adat seluas lebih kurang 1.640.264 hektare yang terdiri dari 134 komunitas adat. Seluas 1.334.554 hektare atau 81% dari luas usulan tersebut berada di taman nasional. Selain itu berdasarkan kajian dari Direktorat PIKA dan Direktorat Kawasan Konservasi, diidentifikasi sebanyak 6.381 desa berada di sekitar kawasan konservasi.

Perubahan kondisi yang mengakibatkan degradasi fungsi kawasan konservasi (objek) dan keberadaan pihak –pihak yang memiliki atau merasa memiliki kewenangan dalam pengelolaan kawasan konservasi (subjek) ini lah yang disebut sebagai konflik tenurial dalam kawasan hutan. Sebagaimana Konflik tenurial kawasan hutan di definisikan dalam peraturan berbagai bentuk perselisihan atau pertentangan klaim penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan penggunaan kawasan hutan (P.84, 2015).

Dalam upaya penyelesaian konflik tenurial, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) terkait di bawah Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE) mengambil salah satu langkah berupa revisi zonasi taman nasional. Salah satu tujuannya adalah untuk mengakomodir ruang-ruang pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat setempat.

Revisi zonasi ini dapat juga merupakan sebagai pra kondisi upaya resolusi konflik tenurial melalui kemitraan konservasi. Hal ini dikarenakan ada kalanya kemitraan konservasi dihadapkan dengan hambatan dalam mewujudkan kesepakatan para pihak untuk pemanfaatan sumberdaya pada objek-objek (zona) tertentu dalam kawasan konservasi. Contohnya, pada zona rimba dan zona inti ada pelarangan akses

pengelolaan kecuali untuk tujuan yang telah ditetapkan. Maka untuk kepentingan resolusi konflik, mungkin untuk dilakukan revisi zonasi.

Perubahan dan kelayakan lokasi-lokasi dalam kawasan konservasi, khususnya taman nasional sebagai area perlindungan ekosistem dan untuk menghadapi konflik ruang yang terjadi dalam kawasan tersebut, zonasi sesungguhnya dapat digunakan sebagai cara kompromi yang bisa diterima oleh para pihak. Sehingga zonasi hendaknya mampu mengakomodir berbagai kepentingan para pihak yang ada di dalam dan di sekitar kawasan yang tentunya harus diarahkan untuk sesuai dengan fungsi taman nasional.

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam menentukan potensi dan fungsi suatu kawasan konservasi di antaranya adalah keanekaragaman hayati, nilai arkeologi, nilai objek wisata dan nilai jasa lingkungan. Aspek ekologi yang diperhatikan seperti tanah, geologi, iklim, topografi, geomorfologi dan penggunaan lahan, serta oseanografi pada wilayah perairan. Begitu pula, tak kalah penting diperhatikan adalah aspek sosial, ekonomi dan budaya masyarakat seperti jumlah pengguna kawasan, mata pencaharian dan kearifan lokal sebelum dibentuknya kawasan taman nasional, agar pengelolaan mendapat dukungan dari masyarakat setempat (Mahmud, Satria, & Kinseng, 2015).

Perubahan atau revisi zonasi taman nasional dilakukan berdasarkan kondisi terkini di kawasan taman nasional tersebut. Revisi zonasi diawali dengan evaluasi yang dapat berupa; 1) Evaluasi secara periodik paling lama 10 (sepuluh) tahun sesuai dengan hasil inventarisasi potensi kawasan, yang dilakukan oleh Kepala Unit Pengelola/UPTD; dan 2) evaluasi karena kondisi tertentu antara lain perubahan kawasan, bencana alam, kebakaran hutan, serangan hama dan penyakit, evaluasi zona pengelolaan atau blok pengelolaan KSA/KPA dapat dilakukan sesuai dengan kepentingan pengelolaan (P.76, 2015).

Dilihat dari tujuannya, revisi zonasi dilakukan agar dapat mengakomodir berbagai kepentingan seperti ekologi, sosial ekonomi, pariwisata, perikanan, konservasi sehingga pengelolaan dapat berjalan dengan baik dan berkesinambungan serta mendapat dukungan dari masyarakat dan seluruh stakeholder yang ada. Penetapan zonasi suatu kawasan memungkinkan untuk dilakukan kompromi sesuai dengan kepentingan bersama (Sulisyati, Prihatinningsih, & Mulyadi, 2018). Berdasarkan tujuan tersebut maka pada setiap tahapan proses revisi zonasi dapat dinyatakan sebagai sebuah proses resolusi konflik karena cara-cara resolusi konflik berupa konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau pendapat ahli telah terangkum dalam tahapan proses revisi zonasi tersebut.

Revisi zonasi telah dan sedang dilakukan berbagai taman nasional untuk mensinergikan pola pengelolaan kawasan konservasi dengan kebutuhan lain, misalnya kebutuhan untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat adat. Catatan ini merujuk pada hasil studi lapangan yang dilakukan di Taman Nasional Lore Lindu, Taman Nasional Sebangau dan Taman Nasional Bukit Duabelas.

Bagian 4. Kesertaan Masyarakat

Banyak ahli telah mengungkap konsep dasar partisipasi masyarakat. Ruang perdebatan antar ahli tentang teori partisipasi masyarakat mestinya dibatasi oleh sejauh mana masyarakat mendapatkan ruang keterlibatannya dalam urusan tertentu. Revisi zonasi misalnya, maka dalam konteks ini, penting mendefinisikan ruang-ruang keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan revisi zonasi taman nasional.

Tujuan utama taman nasional yang dalam kriteria IUCN masuk kedalam kategori II adalah melindungi keanekaragaman hayati dengan struktur ekologi yang mendasarinya, mendukung proses lingkungan, dan mempromosikan pendidikan dan rekreasi. Dalam perkebangannya, Kalamandeen & Gillson (2007) menyatakan bahwa sejarah pendekatan konservasi mengalami perubahan pemahaman, yaitu hubungan antara manusia dengan alam dan reintegrasi sistem ekologi dengan sistem sosial. Hubungan sistem ekologi dan sosial akan terpusat dalam pengembangan strategi konservasi, yaitu melalui rekonsiliasi kebutuhan sosial, budaya, dan ekonomi yang bertujuan konservasi dengan batasan intrinsik sistem ekologi. Sehingga keterlibatan masyarakat juga harus didorong dalam pengelolaan kawasan konservasi, supaya kepentingannya dapat diperjuangkan dan diakomodasi, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Paling tidak, persoalan seperti memarjinalkan masyarakat setempat, konflik sosial, dan kerugian ekonomi karena dampak zonasi yang ada dapat diminimalisir (Mahmud, Satria, & Kinseng, 2015).

Karena itu, keterlibatan masyarakat tersebut tentunya harus dimulai sejak dari awal proses zonasi. Lagi, keterlibatan masyarakat dalam proses revisi zonasi taman nasional mesti mempertimbangkan dan mewarna proses dan tahapan revisi zonasi. Lalu muncul pertanyaan lain, bagaimana melibatkan partisipasi masyarakat sementara masyarakat tidak memiliki kemampuan teknis penyusunan dokumen, bahkan secara teknis juga tidak memiliki basis keilmuan. Mungkin karena itu, partisipasi masyarakat baru muncul ketika konsultasi publik dilakukan terhadap rancangan zona pengelelolaan yang telah di susun oleh tim kerja penyusunan rancangan zona pengelolaan taman nasional. Tim kerja tersebut, dalam Perdirjen KSDAE Nomor : P.11/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016 berasal dari sumberdaya manusia internal unit pengelolaan kawasan konservasi, jika itu taman nasional berarti berasal dari pejabat struktural, non struktural dan pejabat fungsional balai taman nasional.

Berdasarkan hal tersebut, partisipasi masyarakat sepertinya hanya menjadi pelengkap dalam proses penyusunan dokumen revisi zonasi taman nasional. Padahal, jika kembali merunut kerangka pemikiran yang diusung Wiratno, maka proses partisipasi mestinya sudah muncul sejak awal perencanaan revisi zonasi dilakukan. Namun hal ini tentunya dikembalikan lagi pada ruang regulasi, adakah partisipasi masyarakat muncul sejak awal proses revisi zonasi taman nasional?

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan zonasi ini dikarenakan kedepannya zonasi yang ada akan berdampak pada peluang akses para pihak, terutama masyarakat setempat, terhadap sumber daya di kawasan konservasi karena mengatur kegiatan yang dilarang maupun yang diizinkan. Untuk itu pihak-pihak tersebut perlu dilibatkan dalam proses zonasi melalui peningkatan level partisipasi masyarakat, tujuannya agar zonasi dapat dipahami dan dapat diterima. Dan selanjutnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi seperti pengelolaan kolaboratif taman nasional juga harus mendapat perhatian serius (Mahmud, Satria, & Kinseng, 2015).

Peningkatan partisipasi tersebut sama halnya secara tidak langsung unit pengelolaan taman nasional telah mengadakan pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan masyarakat adat. Sehingga akan berpengaruh terhadap ketenangan, kenyamanan, keamanan masyarakat dalam mengelola hutan dan akan berpengaruh terhadap partisipasi yang baik dari masyarakat dalam mencapai cita-cita bersama yaitu kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan. Mustafa (2002) menyatakan bahwa tercapainya resolusi

konflik pengelolaan kawasan hutan salah satunya ditandai dengan terbukanya ruang atau akses bagi komunitas lokal atau dibukanya ruang partisipasi yang mengarah pada perbaikan taraf hidup komunitas (Rukminda, Soekmadi, & Adiwibowo, 2020).

Membuka ruang partisipasi masyarakat artinya membuka ruang perdebatan lebih lama atas revisi zonasi. Mengapa? Karena keterlibatan masyarakat sejak awal proses revisi zonasi ini tentulah akan menjadi beban tersendiri bagi tim yang bertugas menyiapkan dokumen revisi zonasi. Sementara di pihak masyarakat yang berpartisipasi, proses ini menjadi ruang penyampaian keluhan atas pengelolaan taman nasional selama ini.

Karena itu, penting adanya proses pra kondisi yang memberikan pemahaman utuh terhadap upaya bersama ini kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan revisi zonasi taman nasional. Kecuali itu, penting pula menetapkan sistem representasi masyarakat yang terlibat di dalam revisi zonasi taman nasional. Karena tentunya tidak semua masyarakat di dalam dan sekitar taman nasional akan terlibat. Dengan itu, diskusi terhadap sistem representasi masyarakat perlu dilakukan di level desa.

Kecuali itu, pelibatan partisipasi masyarakat tentulah pula berkonsekwensi pada pembiayaan. Dengan waktu penyusunan yang lama, lebih banyak peserta yang terlibat, lebih banyak kegiatan yang dilakukan, maka anggaran juga akan terkuras lebih banyak.

Partisipasi masyarakat sejauh ini barangkali dianggap sebagai sesuatu yang kurang penting. Sehingga keterlibatan masyarakat dalam proses revisi zonasi taman nasional sangat terbatas. Namun akibatnya, tingkat keberterimaan taman nasional berikut dengan sistem pengelolaannya di level masyarakat juga menjadi terbatas. Oleh karenanya, ruang partisipasi menjadi salah satu penentu yang mesti dipikirkan bersama.

Bagian 5. Sengketa Zona Taman Nasional

Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat adat yang berada di kawasan Taman Nasional Lore Lindu (TNLL). Ngata Toro dan Lindu contohnya. Berdasarkan kearifan lokal yang mereka pedomani dalam wilayah adatnya, mereka telah memiliki pola ruang pengelolaan secara turun menurun. Sebagaimana diuraikan BRWA, bahwa masyarakat adat Ngata Toro memiliki peruntukan kawasan berupa Wana Ngkiki, Wana, Pahawa pongko, Oma, Balingkea, dan Pangale. Tiap kawasan memiliki arti dan fungsi yang berbeda-beda.

Sehingga untuk menyikapi hal ini Balai TNLL mencoba untuk mengakomodir kepentingan masyarakat adat lewat persamaan persepsi mengenai pola ruang. Di satu pihak, masyarakat adat telah memiliki pola ruang pengelolaan wilayah adat. Sementara di sisi lain, TNLL juga memiliki zona pengelolaan. Dua hal ini, dalam konteks pengelolaan tidak memiliki perbedaan mendasar.

Dalam 3 tahun terakhir masyarakat di sekitar TNLL sudah mau terlibat dalam pengelolaan hutan melalui skema-skema perhutanan sosial. Balai TNLL yang dulunya sangat eksklusif, saat ini sudah berubah dan telah melakukan komunikasi yang baik dengan masyarakat. Selain itu Balai TNLL sudah menghormati hukum adat yang dibuktikan dengan mengedepankan penerapan hukum adat ketika terjadi pelanggaran adat pada zona-zona dalam wilayah adat yang berada di dalam kawasan taman.

“Apapun yang terjadi, bila pada awalnya konflik dianggap sebagai solusi, maka apabila kemudian solusi yang lain dianggap perlu untuk diketengahkan setelah konflik berkembang tak terkendali, ketika itulah hadir konsep resolusi konflik,” ungkap Kepala Balai TNLL, Jusman, 2020.

Jusman merujuk pada proses rezonasi di TNLL. Konsep rezonasi partisipatif hadir sebagai jawaban atas konflik di atas konflik. Di satu sisi, pihak Taman nasional tengah berupaya mencari solusi atas persoalan klaim tenurial yang terjadi di hampir di seluruh kawasan TNLL. Kasus Dongi-dongi menjadi media belajar yang sangat penting bagi semua pihak. Di tengah upaya solusi itu, klaim masyarakat atas wilayah hutan adat juga sedang berproses di lapangan. Masyarakat adat didukung berbagai organisasi non pemerintah melakukan pengusulan hutan adat yang sebagian besar berada di dalam kawasan taman. Pada saat itulah konsep resolusi konflik hadir dengan menengahkan proses rezonasi partisipatif.

Dalam konsep masyarakat hukum adat Marena dan masyarakat hukum adat lainnya di sekitar TNLL, hutan merupakan milik bersama. Pada tempat-tempat tertentu di dalam hutan adat (*Huaka*) yang berdasarkan hukum adat ditetapkan sebagai Wana dan Wana ngkiki yang wajib dilindungi dan dijaga. Hal ini memiliki kesesuaian dengan konsep pengelolaan kawasan konservasi taman nasional pada zona rimba dan zona inti. Oleh karena itu rezonasi TNLL merupakan langkah baik dalam mengakomodir posisi *huaka-huaka* sebagaimana diatur oleh hukum adat masyarakat setempat, dan kedepannya harus di tindak lanjuti dengan pengelolaan bersama. Sebagian besar responden beranggapan bahwa rezonasi yang ada saat ini belum terinformasikan dan tersosialisasikan dengan baik, sehingga sebagian pihak masih merasa belum terjadi perubahan apa-apa terkait dengan tumpang tindih wilayah adatnya dengan kawasan TNLL. Perubahan zonasi TNLL ini disahkan pada tanggal 31 desember tahun 2018, Adapun faktor-faktor yang menjadi pendorong dilakukannya revisi zonasi ini adalah: (1) mensinergikan konsep ruang menurut adat ke dalam pengelolaan taman nasional; (2) pemanfaatan masyarakat lokal dan pemanfaatan jasa lingkungan; (3) Pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan; (4) penyesuaian terhadap kondisi penutupan lahan terbaru; (5) mengakomodir ruang kemitraan konservasi dengan masyarakat adat / lokal; (6) adanya kebijakan baru batas TNLL (BBTNLL, 2018).

Terdapat 4 tahapan utama secara prinsip dilakukan Balai TNLL dalam melakukan perubahan zonasi tahun 2018 tersebut yaitu pertama yang dilakukan adalah melakukan identifikasi nilai penting kawasan, proses

penggalan nilai penting dilakukan dengan cara *desktop study*, diskusi terfokus dan pemetaan partisipatif. Kedua melakukan analisis penutupan/penggunaan lahan dan identifikasi parapihak, ketiga merumuskan zona berdasarkan target konservasi, dan tahapan terakhir adalah melakukan konsultasi publik untuk menghasilkan zona final yang disepakati bersama (BBTNLL, 2018).

Dari 4 tahapan diatas ruang partisipasi atau keterlibatan masyarakat sewajarnya terjadi pada setiap tahapan. Dalam identifikasi nilai penting kawasan contohnya salah satu metode yang digunakan adalah dengan melakukan pemetaan partisipatif. Pemetaan partisipatif pada intinya harus melibatkan seluruh pihak yang memiliki kepentingan dan yang terdampak dari penetapan zonasi ini. Konsultasi publik di akhir proses juga menjadi poin utama keterlibatan masyarakat dalam proses perubahan zonasi tersebut.

Proses partisipasi diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada setiap pihak tentang bagaimana zona-zona taman nasional dikelola ketika telah di sahkan. Apa yang menjadi batasan yang dilarang atau yang diperbolehkan dilakukan pada zona-zona pengelolaan tersebut.

Serangkaian wawancara dan diskusi lapangan menemukan fakta bahwa perubahan zonasi TNLL memang telah diketahui oleh sebagian besar masyarakat. Pun proses ini melibatkan perwakilan masyarakat, pemerintahan desa, kecamatan dan kabupaten. Namun hal tersebut baru sebatas melibatkan kehadiran dalam berbagai kegiatan sosialisasi. Secara substansi, perubahan zonasi tidak banyak dipahami masyarakat. Pengakuan responden di lapangan menyebutkan bahwa masyarakat tidak memahami batasan zona.

Pengakuan berbeda datang dari Toro, menurut Andreas, batasan zona TNLL secara prinsip telah mengakomodir kepentingan ruang masyarakat adat Ngata Toro. Misalnya wana dan wana ngkiki sudah terakomodasi dalam zona inti dan zona rimba. Masalahnya adalah, bagaimana dengan zona pengelolaan yang bersesuaian letaknya dengan *huaka-huaka* lain seperti oma, balingkea, dan pangale?

Proses revisi zonasi ini tentunya sangat dipengaruhi oleh paradigma pengelolaan kawasan konservasi. Hal tersebut menghasilkan 2 (dua) hal yang fundamental, yakni: a) sinergitas konsep zonasi TNLL dengan ruang adat berdasarkan usulan wilayah adat di TNLL, dan b) adanya perubahan yang signifikan berupa adanya alokasi zona tradisional seluas 25.728 Ha, dimana pada zonasi sebelumnya belum ada alokasi zona tradisional.

**

Bagaimana dengan proses perubahan zonasi di Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD)? Wawan (2020) mengungkapkan bahwa rezonasi yang di sahkan pada tahun 2019 dilakukan berdasarkan kondisi kekinian taman nasional. Kondisi kekinian itu didapatkan dari hasil evaluasi Balai TNBD. Contohnya, keadaan terkini di zona rimba yang memiliki potensi wisata, maka dalam revisi zonasi dikeluarkan dari zona rimba dan berubah menjadi zona pemanfaatan.

TNBD memang merupakan suatu kawasan konservasi yang cukup unik dan berbeda secara karakteristik dengan taman nasional lainnya yang ada di Indonesia. Biasanya keberadaan taman nasional diperuntukkan untuk melindungi habitat, keanekaragaman hayati, dan ekosistem tertentu. Keberadaan TNBD khusus untuk melindungi ruang kehidupan Orang Rimba atau Suku Anak Dalam atau Suku Kubu.

Tingginya interaksi sosial di dalam kawasan TNBD menjadi faktor pemicu konflik tenurial. Berdasarkan temuan lapangan, konflik tersebut dapat dikualifikasi kan dalam 4 bentuk, yakni: **Pertama**, konflik akibat adanya kebun masyarakat desa (orang melayu lokal di luar Suku Anak Dalam) yang secara turun temurun dikelola masyarakat dan masuk kedalam kawasan TNBD. **Kedua**, yaitu konflik akibat dari ekspansi kebun

masyarakat desa (desa transmigrasi) ke dalam kawasan TNBD melalui praktik jual beli dengan Suku Anak Dalam dan pembukaan lahan bersama dengan Suku Anak Dalam. **Ketiga**, konflik yang terjadi akibat dari model pemanfaatan tanah untuk kebun oleh Suku Anak Dalam yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip konservasi seperti membuka lahan dengan cara dibakar. Dan **keempat**, konflik yang terjadi akibat maraknya ilegal logging sejak pandemi Covid 19, yang dilakukan masyarakat di bagian utara TNBD.

Kondisi-kondisi ini lah yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan ekologi dan sumberdaya hayati di TNBD. Kondisi terakhir juga menemukan situasi dimana aturan atau pedoman zonasi taman nasional yang secara substansi belum mengakomodasi hak-hak pemanfaatan sumber daya alam secara khusus untuk masyarakat adat, baik pemanfaatan ruang maupun hayati berikutan dengan bentuk pengendaliannya (Mulyani, 2014). Kondisi ini turut menjadi dasar percepatan revisi zonasi.

Selain itu, kondisi terkini juga meliputi kondisi area-area kebun tua masyarakat desa melayu di dalam kawasan TNBD. Padahal kebun-kebun tua tersebut sudah ada jauh sebelum penetapan TNBD. Hal ini dapat diuktikan dengan keberadaan rumpun pohon durian dan langsung pada satu area di dalam kawasan.

Berdasarkan masalah-masalah tersebut, tahun 2019, revisi zonasi TNBD secara sah sudah dilakukan. Hal ini dikenal luas sebagai menyatukan hukum adat Suku Anak Dalam dengan hukum Negara, dimana Balai TNBD mencoba mengakomodir ruang-ruang pemanfaatan hutan oleh masyarakat, baik oleh Suku Anak Dalam maupun oleh masyarakat desa sekitar.

Dalam dokumen revisi zonasi tahun 2019 tersebut, disebutkan bahwa faktor pendorong dilakukan revisi zonasi TNBD yakni (1) muncul keberatan dari Orang Rimba (OR) Makekal Hulu yang menganggap zonasi TNBD belum mengakomodir ruang adat mereka, salah satu penyebabnya adalah kekhawatiran komunitas tersebut terhadap perubahan pola hidup dan naiknya populasi OR yang mengancam eksistensi mereka sebagai komunitas adat; (2) Pengakuan terhadap ruang adat merupakan upaya mereka untuk mempertahankan adat dan budaya OR yang dianggap sudah mulai luntur. (3) Terdapat aktivitas wisata pada beberapa zona yang tidak sesuai peruntukannya, dan (4) adanya keterlanjuran perladangan berupa kebun-kebun karet masyarakat desa yang saat ini dialokasikan pada zona khusus (BTNBD, 2019).

Menurut Wawan (2020), dalam proses revisi zonasi TNBD, partisipasi masyarakat diwakili oleh 13 kelompok OR dan masyarakat desa melayu di sekitar kawasan. Keterlibatan mereka ada tidak hanya dilakukan pada saat konsultasi publik untuk finalisasi rancangan zonasi, tapi sudah diikuti sertakan pada awal proses identifikasi nilai penting untuk menentukan rancangan zonasi. Hal ini diakui oleh Jailani dan Bebayang (2020) serta masyarakat lainnya. Jailani mengungkapkan, dirinya terlibat sejak awal adanya rapat-rapat untuk menyamakan hukum nasional dan hukum adat OR. Begitu pula dengan Tumenggung Bebayang, dia dan 12 tumenggung lainnya terlibat dalam pembahasan tentang zona-zona tersebut.

Butuh perjuangan memang, kata Wawan dan Saefullah, tidak terhitung lagi berapa kali Balai TNBD melakukan diskusi kelompok terfokus dengan komunitas OR selama proses survei untuk identifikasi dilakukan, baik formal maupun non formal. Tantangan komunikasi dijawab Balai TNBD dengan terus-menerus melakukan dialog dan diskusi. Disisi teknis, tantangannya adalah bahwa area-area pengelolaan OR – seperti *tali bukit* dan *tanah badewo* yang memang merupakan daerah dilindungi yang memiliki kesesuaian kriteria dengan zona rimba dan zona inti taman nasional – pada kenyataannya hanya berupa wilayah kecil yang tersebar di dalam TNBD. Dengan kondisi itu, maka perlu suatu terobosan yang penting disepakati dengan OR. Kesepakatan diperlukan untuk menentukan fungsi lindung ataupun fungsi pemanfaatan versi OR. Jika satu wilayah yang berdasarkan ketentuan adat OR lebih banyak fungsi lindungnya, maka kawasan tersebut disepakati sebagai zona inti atau zona rimba. Sebaliknya, jika wilayah itu lebih banyak fungsi pemanfaatannya, maka perlu disesuaikan dengan zona tradisonal atau zona khusus.

Semua dilakukan atas persetujuan semua pihak, ungkap Wawan. Berdasarkan revisi zonasi terakhir, maka di dapatkan lebih kurang 78% kawasan TNBD merupakan zona tradisional yang selanjutnya dibagi ke dalam zona tradisional OR dan zona tradisional masyarakat desa.

**

Lain lagi kisahnya di Taman Nasional Sebangau (TNS). Dansat Polhut Balai TNS, Adi Saputra mengakui sangat sulit merangkul seluruh masyarakat Habaring Hurung dalam mendudukkan pemahaman tentang zonasi di kawasan taman nasional. Resot Habaring Hurung memulai langkah ini dengan terlebih dahulu melakukan upaya pendekatan dengan masyarakat melalui penyusunan program sosial dan ekonomi. Lewat program ini, perlahan ditanamkan kesadaran akan nilai-nilai konservasi.

Balai TNS memahami kekecewaan masyarakat Habaring Hurung perihal nasib lahan tempat hidup mereka selama ini. Perubahan kebijakan status kawasan yang mengakibatkan keluar masuknya wilayah Habaring Hurung juga berdampak kepada petugas taman nasional di garis depan. Resot Habaring Hurung harus memikirkan bagaimana caranya memberi pemahaman dengan tepat kepada masyarakat. Jika salah dalam memberikan pemahaman, gejala di masyarakat akan semakin tinggi. Selama ini Resot Habaring Hurung telah berusaha dengan cara-cara persuasif, meskipun belum seluruh masyarakat sejalan dengan pemikiran Balai TNS (Saputra, 2020).

Selaras dengan Adi, salah satu tokoh masyarakat Habaring Hurung, Suroto juga menyampaikan hal senada. Diakui bahwa saat ini masyarakat Habaring Hurung terbagi menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok yang pro terhadap Balai TNS. Kelompok ini mendukung apapun kebijakan Balai TNS, karena selalu dilibatkan dalam program-program yang telah dilaksanakan selama ini. Jika diamati lebih jauh, sebenarnya kelompok ini adalah kumpulan orang-orang yang pasrah pada keadaan. Namun karena ada peluang dilibatkan ke dalam berbagai kegiatan dan memperoleh hasil, maka mereka ikut saja apapun kebijakan Balai TNS. Kegiatan-kegiatan yang dimaksud seperti pemasangan patok kawasan, patroli kawasan, terlibat pada program kelompok ternak, dan lain-lain.

Selain itu, Balai TNS melalui Satuan Pengelola Taman Nasional (SPTN) Wilayah I juga telah berhasil membentuk Kelompok Nelayan Tradisional dan Kelompok Getek di Kelurahan Kereng Bengkirai. Melalui dukungan Dinas Pariwisata dan Pemda Kota Palangkaraya, telah dibangun Kawasan Wisata Dermaga Kereng Bengkirai. Hal ini tentu semakin membuktikan bahwa upaya resolusi konflik bisa dicapai melalui penguatan ekonomi masyarakat dan sinergitas antar instansi terkait dalam mendukung program pemberdayaan (Suroto, 2020).

Kelompok dua adalah kelompok yang kontra dengan Balai TNS. Kelompok masyarakat ini adalah sebagian masyarakat yang sumber ekonominya terganggu akibat dari penetapan kawasan taman nasional. Kelompok ini adalah masyarakat yang dahulu berprofesi membuat arang. Beberapa juga masih menaruh sakit hati karena mempunyai riwayat pernah diusir oleh polhut di lokasi pembuatan arang yang terletak di Lahan Usaha (LU) II. Akibat penetapan area LU II yang diklaim masuk ke dalam kawasan, masyarakat banyak kehilangan sumber mata pencaharian dari membuat arang (Suroto, 2020).

Sedangkan kelompok ketiga, lanjut Suroto, adalah masyarakat yang tidak peduli dan tidak mau tahu persoalan taman nasional. Kelompok ini adalah sebagian masyarakat yang sumber ekonominya tidak terlalu bergantung pada lahan usaha yang saat ini bermasalah. Kelompok ini biasanya punya profesi lain seperti tukang, buruh bangunan, dan pekerjaan lain di luar Habaring Hurung. Kelompok ini cenderung menghindari untuk diajak diskusi persoalan lahan usaha, pasrah, dan menerima apapun keputusan yang terbaik.

Menteri Kehutanan melalui SK 423/Menhut-II/2004 menyatakan bahwa wilayah Habaring Hurung berada di dalam kawasan hutan. Kemudian pada SK Menteri Kehutanan No. 292/Menhut-II/2011, Kelurahan Habaring Hurung tidak masuk di dalam kawasan TNS. Statusnya berubah dari kawasan hutan menjadi Area Penggunaan Lain (APL). Namun, berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor SK 529/Menhut-II/2012 wilayah Habaring Hurung kembali dinyatakan berada di dalam kawasan. Menurut Peta Indikatif TORA edisi revisi, lokasi transmigrasi Habaring Hurung ini sebagian masuk dalam peta indikatif, namun hingga akhir tahun 2011 belum dilakukan peninjauan oleh tim Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PTKH) (Ningsih, Wawancara, 2020).

Proses panjang penyusunan dokumen zonasi TNS hingga disahkannya melalui Surat Keputusan Dirjen KSDAE nomor SK. 97/KSDAE.0/3/2016 Tentang Zonasi TNS serta SK 261/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem nomor SK. 97/KSDAE.0/3/2016 Tentang Zonasi Taman Nasional Sebangau, Provinsi Kalimantan Tengah. Zonasi pada TN Sebangau terdiri dari; 1). Zona Inti; 2). Zona Rimba; 3). Zona Pemanfaatan; 4). Zona Tradisional; 5). Zona Rehabilitasi; 6). Zona Religi, Budaya dan Sosial serta 7). Zona Khusus.

Pemerintah melalui program transmigrasinya, memberi angin segar bagi mereka untuk mengajak keluarga, meninggalkan kampung halaman dengan harapan dapat merubah kehidupan lebih baik. Namun apa yang terjadi, padi ditanam tumbuh ilalang, kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Tahun-tahun pertama masyarakat diuji dengan kesulitan menanam tanaman melalui bantuan benih beberapa jenis palawija dari pemerintah. Karakter tanah gambut masih awam bagi masyarakat dari pulau Jawa, meskipun di kampung halaman mereka juga bertani. Jangankan untuk mengolah lahan usaha, bertanam di sekitar pekarangan rumah saja sangat sulit untuk hidup. Pelaku transmigrasi mengungkapkan, satu-satunya tanaman yang bisa tumbuh hanyalah pohon kelapa. Selain karena kurangnya pengalaman mengolah lahan gambut, wilayah Habaring Hulu kala itu juga sangat rawan banjir. Dengan keadaan seperti ini, praktis masyarakat Habaring Hurung hanya mengandalkan bantuan sembako dari pemerintah melalui program Jaminan Hidup (Jadup) dalam pemenuhan ekonomi sehari-hari (Suroto, 2020).

Sebagaimana semangat dan semboyan masyarakat transmigrasi dimanapun berada, pengalaman adalah guru yang paling berharga. Kesulitan dan tekanan hidup seolah menempa mereka untuk terus kuat dan bertahan di manapun berada. Hari demi hari, bulan berlalu dan tahun pun berganti, masyarakat terus mengolah tanah dengan bekal pengalaman yang ada. Lahan gambut yang dahulu sangat sulit diolah, perlahan bisa ditanami dengan cara dibakar. Tata cara mengolah lahan dengan dibakar inilah yang kemudian hari menjadi masalah baru karena berdampak bencana kabut asap dan kebakaran di kawasan TNS. Tentu bukan hanya karena pembukaan lahan di Habaring Hurung saja, praktik ini sudah lama dilakukan oleh masyarakat di luar Habaring Hurung. Karena semakin banyak oknum yang melakukan bakar lahan untuk alasan pembukaan lahan pertanian ataupun industri perkebunan, praktik ini kemudian menjadi bencana asap yang hampir setiap tahun terjadi.

Pembukaan lahan dengan metode dibakar memang menjadi opsi utama untuk mengolah lahan gambut agar bisa ditanami. Alasannya sederhana, dengan dibakar maka lahan gambut dipercaya bisa menyuburkan tanah. Selain itu, metode membuka lahan gambut dengan dibakar meminimalisir pengeluaran untuk biaya pembukaan lahan. Kehidupan masyarakat Habaring Hurung sangat sulit pada waktu itu, sehingga tidak akan mungkin mengeluarkan biaya untuk membuka lahan. Meski cara ini efektif karena banyak masyarakat yang pada akhirnya bisa mengolah lahan, Balai TNS menganggap ini sumber masalah baru karena mengancam kawasan. Namun sebagian masyarakat transmigrasi awal Habaring Hurung juga ada yang menyerah, karena tidak tahan dengan kondisi wilayah dan semakin ruwetnya masalah legalitas lahan usaha mereka. Sebagian dari mereka menjual lokasi perumahan dan lahan usaha kepada tetangga dan orang di luar Habaring Hurung, sebagian lagi ada yang ditinggalkan begitu saja.

Diakui Suroto, banyak sertifikat tanah masyarakat untuk LU II yang sudah tidak diketahui keberadaannya. Bahkan banyak pemilik sertifikat yang sudah pindah keluar daerah membawa serta sertifikatnya. Kendala tersebut cukup menjadi masalah serius, karena dalam pengusulan pelepasan kawasan harus sesuai luas usulan dengan disertai bukti alas hak.

TNS terletak diantara sungai sebangau dan sungai katingan. Secara administratif, TNS berada di wilayah Kabupaten Katingan, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kota Palangkaraya. Kawasan ini merupakan hutan rawa gambut yang masih tersisa di Kalimantan Tengah. Sebelum terbentuknya taman nasional, kawasan ini merupakan hutan produksi yang dikelola oleh beberapa HPH sebagai penghasil kayu, sehingga pembalakan liar merajalela setelah ijin HPH berakhir di kawasan tersebut (Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Katingan, 2016).

Perlindungan terhadap kawasan konservasi sering dianggap sebagai pembatasan ruang gerak masyarakat yang ada di sekitarnya. Karena itu dalam pengelolaan TNS, dikembangkan pendekatan zonasi berdasarkan proses pemetaan partisipatif. Dimana dalam proses ini terdapat kesepakatan bersama masyarakat untuk menetapkan areal-areal yang merupakan wilayah tradisional masyarakat, areal yang perlu di rehabilitasi, dan areal inti. Dari kesepakatan ini diharapkan ada tanggungjawab bersama dalam menjaga kelestarian wilayah tersebut, dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan ilmiah dan objektif mengenai kondisi dan kelayakan lingkungan.

Sosialisasi terus dilakukan pada beberapa kesempatan bersama masyarakat untuk menginventarisir persoalan dan kepentingan. Wilayah Habaring Hurung menjadi salah satu zona merah karena persoalan regulasi yang berubah-ubah. Masyarakat Habaring Hurung yang merupakan eks transmigrasi hingga saat ini belum sepenuhnya bisa mengelola lahan usaha yang seharusnya menjadi hak mereka.

Sosialisasi zonasi TNS telah dilaksanakan sejak bulan desember tahun 2017. Proses sosialisasi ini dilakukan dari tingkat desa yang berbatasan langsung dengan kawasan pada masing-masing Kabupaten/Kota hingga tingkat Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan di Desa Tumbang Bulan dan Desa Mekar Tani di Kecamatan Mendawai, Desa Baun Bango di Kecamatan Kamipang, Desa Sebangau Mulya di Kecamatan Sebangau Kuala, dan Kelurahan Kereng Bangkirai.

Kegiatan puncak sosialisasi dilaksanakan di Hotel Neo Palangka Raya pada tanggal 15 Desember 2017. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Kota Palangka Raya, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, Pemerintah Kabupaten Katingan, UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan lingkup Provinsi Kalimantan Tengah, Mitra Kerja, Perguruan Tinggi dan Forum Masyarakat (Susana, 2017).

**

Tabel di bawah ini menjelaskan secara singkat peta konflik zonasi di 3 Taman Nasional, berikut dengan peta aktornya.

Taman Nasional	Objek Konflik	Deskripsi Singkat	Aktor Primer	Aktor Sekunder	Aktor Tersier
Sebangau	Zonasi TNS dan Wilayah Eks Transmigrasi	<ul style="list-style-type: none"> Lokasi konflik berada Kelurahan Habaring Hurung. Kelurahan ini merupakan kelurahan eks Program Transmigrasi Pengembangan Desa Potensial (Transbangdep) Tumbang Tahai, tahun 1992. Pada 2002, kedua kelurahan memisahkan diri berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 32 Tahun 2002. Selain mendapatkan rumah di atas lahan pekarangan (0,25 ha), masyarakat juga mendapatkan Lahan Usaha (LU) I&2 seluas 0,75 ha dan 1 ha. Lahan 	Balai Masyarakat Kelurahan Habaring Hurung TNS,	Direktorat Jenderal KSDAE-KLHK, Bappeda Kota Palangka Raya, BPN Palangka Raya	Dinas PUPR, Oknum di kelompok masyarakat adat lokal

Taman Nasional	Objek Konflik	Deskripsi Singkat	Aktor Primer	Aktor Sekunder	Aktor Tersier
		<p>Usaha I dikelola oleh masyarakat dengan komoditi karet, sawit, dan palawija. Lahan Usaha II hingga saat ini hanya sebagian yang dikelola oleh masyarakat. Selain dikarenakan biaya pengolahan yang mahal di lahan gambut jika tanpa bakar, juga terbentur larangan dari pihak Balai TN Sebangau karena wilayah ini masih masuk kedalam kawasan Taman Nasional. Dahulu masyarakat Habaring Hurung banyak memanfaatkan HHBK seperti getah kayu gemor di LU II, namun semenjak masyarakat memulai aktifitas membuat arang, pihak Balai melarang aktifitas masyarakat di LU II. Saat ini di Kelurahan Habaring Hurung terdapat 2 Rukun Warga dengan 7 Rukun Tetangga, yang menempati wilayah seluas sekitar 7.344,12 Ha.</p> <ul style="list-style-type: none"> • TNS merupakan taman nasional ke 49 yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. SK.423/ Menhut-II/ 2004 Tanggal 19 Oktober 2004, dan terletak di 3 (tiga) wilayah Kabupaten/Kota, yaitu: Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah • Menteri Kehutanan melalui SK 423/Menhut-II/2004 menyatakan bahwa wilayah Habaring Hurung berada di dalam kawasan hutan. Kemudian pada SK Menteri Kehutanan No. 292/Menhut-II/2011, menyatakan Kelurahan Habaring Hurung tidak masuk di dalam kawasan TNS. Statusnya berubah dari kawasan hutan menjadi Area Penggunaan Lain (APL). Namun, berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomer SK 529/Menhut-II/2012 wilayah Habaring Hurung kembali dinyatakan berada didalam kawasan. Menurut Peta Indikatif TORA edisi revisi, lokasi transmigrasi Habaring Hurung ini sebagian masuk dalam peta indikatif, namun hingga akhir tahun 2011 belum dilakukan peninjauan oleh tim Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PTKH) • Didalam SK Menteri Kehutanan Nomor SK 529/Menhut-II/2012 area pencadangan transmigrasi yang masuk ke dalam Kawasan TNS seluas ± 766,20 Ha, yakni berupa fasilitas umum seperti area pemakaman, pekarangan dan pemukiman, serta lahan usaha I dan lahan usaha II • Pihak Kelurahan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Palangka Raya agar difasilitasi dalam proses penyelesaian konflik lahan dengan Balai TNS. Beberapa kali pertemuan dilaksanakan melalui Bappedalitbang dengan turut menghadirkan pihak Balai TN Sebangau, namun belum ada hasil yang memuaskan para pihak. • Pada sisi masyarakat, mereka hanya ingin kepastian mendapatkan dan bisa mengelola lahan usaha yang sudah sesuai dengan hak nya dengan ditandai bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik dari BPN. Di sisi Balai TNS juga tetap dalam posisi mengamankan kawasan sesuai dengan luasan yang tertera pada SK nomor 529/Menhut-II/2012. Terdapat area pencadangan transmigrasi yang masuk ke dalam Kawasan TNS seluas ± 766,20 Ha, berupa area pemakaman, pekarangan dan pemukiman, serta lahan usaha I dan lahan usaha II • Bappeda melalui Dinas PUPR pada bulan September 2020 juga memfasilitasi pertemuan dengan agenda pembahasan pelepasan LU I&II. Pada kesempatan ini, diharapkan agar tim dari Balai TNS dibantu dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XXI melakukan survey lapangan untuk mengambil titik koordinat kawasan yang masuk ke Lahan Usaha warga. Pada kegiatan ini BTNS dan BPKH juga diharapkan melibatkan Bappeda dan perwakilan masyarakat Habaring Hurung agar upaya verifikasi tidak menjadi 			

Taman Nasional	Objek Konflik	Deskripsi Singkat	Aktor Primer	Aktor Sekunder	Aktor Tersier
		<p>permasalahan di lapangan. Sampai saat ini pihak Pemerintah Kota belum menerima laporan mengenai pola ruang atau zonasi dari pihak BTNS karena masih dalam proses di lapangan</p> <ul style="list-style-type: none"> Selain Balai TNS dengan masyarakat, konflik tenurial di Habaring Hurung juga melibatkan kelompok yang mengatasnamakan masyarakat adat dayak. Kelompok ini mengklaim atas sebagian wilayah di Habaring Hurung sebagai wilayah adatnya. Meskipun kelompok ini tidak muncul ke permukaan, ada potensi konflik baru di kemudian. Belakangan diketahui bahwa kelompok ini digerakkan oleh oknum-oknum pejabat yang berkepentingan atas lahan di Habaring Hurung. 			
Lore Lindu	Zonasi TNLL dan Peruntukan Lahan oleh Masyarakat Adat. Contoh kasus Ngata Lindu	<ul style="list-style-type: none"> Masyarakat hukum adat dan wilayah adat Ngata Lindu meliputi Kecamatan Lindu, terdiri dari lima desa yaitu Desa Puroo, Langko, Tomado, Anca dan Olu. Lima desa tersebut berada di sekitaran danau lindu dan berbatasan langsung dengan kawasan TNLL. Dari ke lima desa tersebut empat desa merupakan desa asli masyarakat hukum adat lindu, satu desa lainnya yaitu desa Olu, masyarakatnya merupakan masyarakat pendatang dari wilayah selatan (Sulawesi selatan) dan wilayahnya dahulu merupakan wilayah adat desa Tomado. Konflik tenurial yang terjadi di daerah ini adalah pertentangan pengelolaan secara adat khususnya pada wilayah yang menurut hukum adat merupakan <i>pangale</i> yaitu bekas kebun-kebun yang saat ini belum perlu di kelola yang berada dalam kawasan TNLL dengan pengelolaan kawasan konservasi menurut hukum negara. Selain itu konflik tenurial secara horizontal walaupun dalam tingkat eskalasi yang rendah juga terjadi antara masyarakat asli (masyarakat hukum adat lindu) khususnya masyarakat desa Tomado dengan masyarakat pendatang di desa Olu. Hal ini di sebabkan oleh semakin sempitnya wilayah-wilayah yang dapat di kelola oleh masyarakat Desa Tomado di sisi barat Danau Lindu dan habisnya wilayah adat di sisi timur Danau Lindu di kelola oleh masyarakat Desa Olu. 	Masyarakat Adat Ngata Lindu, Masyarakat Lokal desa Olu dan Balai TNLL	Direktorat Jenderal KSDAE-KLHK, BRWA, AMAN, JKPP, BPSKL Sulawesi, FP3	Pemerintah daerah dan DPRD SIGI, Pemerintah Provinsi dan DPRD Sulteng
	Zonasi TNLL dan Peruntukan Lahan oleh Masyarakat Adat Ngata Toro	<ul style="list-style-type: none"> Dibagian selatan TNLL, di kecamatan Kulawi Selatan juga terjadi konflik tenurial yaitu pertentangan antara klaim pengelolaan berdasarkan hukum adat dengan pengelolaan menurut hukum negara pada kawasan konservasi. Desa Toro merupakan desa yang masyarakatnya merupakan komunitas masyarakat hukum adat Ngata Toro, yang secara turun temurun memiliki kearifan lokal dalam pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian wilayah adat merasa terbatas dengan keberadaan pengelolaan kawasan konservasi oleh Balai TNLL Persoalan mendasar adalah kurangnya konsultasi dan diskusi tentang sinergi pengelolaan menurut adat dengan pengelolaan yang diperbolehkan menurut hukum negara di kawasan TNLL. Pembagian wilayah adat berdasarkan hukum adat pada objek-objek tertentu sebenarnya tidak terdapat permasalahan. Pada <i>huaka Wana</i> dan <i>Wana Ngkiki</i> contohnya, menurut hukum adat merupakan kawasan yang dilindungi jika memang berada dalam zona rimba dan zona inti TNLL sebenarnya sudah <i>clear</i> dan tidak jadi soal. Konflik terjadi pada <i>huaka-huaka</i> lainnya seperti <i>Oma</i>, <i>pangale</i> dan lain-lain baik yang berupa kebun lama maupun kebun yang ada atau daerah yang memang menurut hukum adat boleh di buka dan di kelola namun 	Masyarakat Adat Ngata Toro dan TNLL	Direktorat Jenderal KSDAE-KLHK, BRWA, AMAN, JKPP, BPSKL Sulawesi, FP3	Pemerintah daerah dan DPRD SIGI, Pemerintah Provinsi dan DPRD Sulteng

Taman Nasional	Objek Konflik	Deskripsi Singkat	Aktor Primer	Aktor Sekunder	Aktor Tersier
	Desa-desa pemukiman kembali di bagian timur laut TNLL	<p>karena berada dalam kawasan TNLL sehingga ada pembatasan bentuk pengelolaan dan pemanfaatannya</p> <ul style="list-style-type: none"> Pada bagian utara dan timur laut TNLL, salah satu konflik tenurial yang terjadi yaitu konflik di Dongi-Dongi. Dongi-Dongi merupakan sebuah wilayah yang terletak di timur laut TNLL. Awal mulanya konflik terjadi pada tahun 2001, dimana masyarakat dari empat desa yakni Kamarora B, Rahmat, Kadidia, dan Kamarora A mulai masuk kedalam kawasan TNLL (Dongi-Dongi). Masyarakat ke empat desa tersebut merupakan masyarakat Suku Kaili Daa Pegunungan Kamalisi dan Orang dari dataran tinggi Kulawi yang direlokasi oleh pemerintah melalui Departemen Sosial pada tahun 1970-an. Walaupun pada tahun 2014 Dongi-Dongi telah di lepasakan dari TNLL menjadi APL, namun tekanan masyarakat dari ke empat desa tersebut di bagian timur laut TNLL masih terus terjadi sampai dengan saat ini. Sementara itu sebagian besar desa-desa yang berbatasan dengan TNLL menganggap bahwa lepasnya Dongi-Dongi dari TNLL merupakan sebuah keberhasilan masyarakat Dongi-Dongi dan menjadi motivasi bagi mereka untuk juga memperoleh hak atas tanahnya yang semestinya juga di berikan kepada masyarakat-masyarakat desa lain yang berbatasan dengan TNLL, yang juga masuk dan mengelola tanah di dalam kawasan TNLL. 	Masyarakat Desa Kamarora B, Rahmat, Kadidia, dan Kamarora A dan Balai TNLL	Direktorat Jenderal KSDAE-KLHK, BPSKL Sulawesi, FP3, LPKD, Kelompok Anggrek Vuri, Tim Reforma Agraria kabupaten SIGI	Kecamatan Palolo, Pemerintah Daerah dan DPRD Sigi, Pemerintah provinsi dan DPRD Sulteng
Bukit Duabelas	Komunitas SAD/Orang Rimba, Masyarakat desa kecamatan Air Hitam	<ul style="list-style-type: none"> TNBD terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 285/Kpts-II/2000 Tanggal 23 Agustus 2000. Ada yang menarik dengan TNBD ini, berbeda dengan penetapan Taman nasional lainnya di Indonesia, TNBD di mandatkan sebagai ruang penghidupan Suku Anak Dalam (SAD)/Orang Rimba yang hidup di dalamnya. Secara normatif dengan mandat yang seperti itu sudah seharusnya konflik tenurial antara SAD dengan Pemangku kawasan (Balai NTBD) tidak terjadi. Namun pada kenyataannya konflik itu tetap terjadi hal ini disebabkan oleh adanya <i>gap</i> antara pengelolaan wilayah yang dilakukan oleh SAD dengan pengelolaan menurut hukum negara untuk kawasan konservasi. Kebudayaan SAD yang dalam sistem mata pencahariannya pada awalnya masih pada tahap berburu dan meramu dengan adanya interaksi dengan desa-desa sekitar yang telah memiliki kebudayaan dan sistem mata pencaharian yang sudah berkembang membuat sebagian besar SAD dalam kawasan TNBD mulai merubah sistem mata pencahariannya menjadi ladang menetap. Sebagian besar SAD masih memiliki kebiasaan berburu dan meramu dimana kebiasaan ini menyebabkan SAD selalu merasa bahwa alam akan selalu ada untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dampaknya ketika SAD membangun kebun seperti masyarakat desa, mereka tidak sabar untuk segera mendapatkan hasil dari kebun tersebut, sehingga sebelum kebun tersebut dapat memberikan hasil, maka dapat dengan mudahnya berpindah tangan ke masyarakat desa di sekitar kawasan TNBD. Sebagian besar kebun yang dibangun dalam kawasan TNBD oleh SAD adalah kebun kelapa sawit. Padahal menurut pengaturan negara untuk kawasan hutan termasuk kawasan hutan yang memiliki fungsi konservasi dilarang adanya tanaman kelapa sawit. Selain itu, dalam kawasan yang ditetapkan TNBD pada tahun 2000 juga terdapat kebun-kebun tua masyarakat desa sekitar. Secara kasat mata yang membedakan 	Komunitas SAD/Orang Rimba, Masyarakat desa kecamatan Air Hitam dan TNBD	Direktorat Jenderal KSDAE-KLHK, WARSI, Kelompok Makekal Bersatu, Kementerian Sosial, Kecamatan Air Hitam	Dinas Sosial, Pemerintah daerah, dan DPRD kabupaten Sarolangun, Merangin dan Batanghari Dinas Sosial, Pemerintah Provinsi dan DPRD Jambi

Taman Nasional	Objek Konflik	Deskripsi Singkat	Aktor Primer	Aktor Sekunder	Aktor Tersier
		<p>wilayah SAD dengan wilayah kebun masyarakat desa adalah dikebun tua milik masyarakat terdapat sekelompok pohon durian dan pohon langsung.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada kebun-kebun tua masyarakat desa inilah objek konflik tenurial lainnya terjadi di TNBD. 			

Sementara merujuk pada kajian yang telah dilakukan, tabel dibawah ini menjelaskan tipologi konflik tenurial di masing-masing kawasan konservasi.

Kawasan Konservasi dan Objek Konflik Tenurial	Tipe Konflik Tenurial berdasarkan Safitri et al (2011)	Tipe Konflik Tenurial berdasarkan Temuan Lapangan			
		Aktor	Jenis Klaim	Eskalasi	Intensitas
TN Lore Lindu – Ngata Lindu	Tipe 8 (gabungan Tipe 1 dan sebagian Tipe 3)	<ul style="list-style-type: none"> • KLHK vs Masyarakat Ngata Lindu • Masyarakat adat Ngata Lindu vs Masyarakat pendatang Desa Olu • Masyarakat Pendatang Desa Olu vs KLHK 	<ul style="list-style-type: none"> • Klaim Pengelolaan (Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kawasan) • Klaim Akses dan Pakai 	Sedang	Wajar
TN Lore Lindu – Ngata Toro	Tipe 1	<ul style="list-style-type: none"> • KLHK vs Masyarakat Adat 	<ul style="list-style-type: none"> • Klaim Pengelolaan (Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kawasan) 	Sedang	Wajar
TN Lore Lindu – desa-desa pemukiman kembali di bagian timur laut TNLL	Tipe 5 (dalam artian masyarakat desa yang memasuki kawasan hutan)	<ul style="list-style-type: none"> • KLHK vs Masyarakat Desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Klaim Akses dan Pakai Kawasan 	Sedang	Wajar
TN Sebangau – Habaring Hurung	Tipe 3	<ul style="list-style-type: none"> • KLHK vs Masyarakat Desa Habaring Hurung • KLHK vs Kelompok masyarakat adat • Pemerintah Daerah vs KLHK • BPN vs KLHK 	<ul style="list-style-type: none"> • Klaim atas lahan usaha eks transmigrasi yang masuk ke dalam kawasan • Klaim atas wilayah adat yang masuk ke dalam kawasan hutan • Klaim batas wilayah administrasi Kota Palangka Raya dengan TN • Klaim lahan usaha masyarakat yang telah bersertifikat (masuk ke dalam kawasan hutan) 	Sedang	Wajar
TN Bukit Duabelas - Komunitas SAD/Orang Rimba, Masyarakat Desa di Kecamatan Air Hitam	Tipe 8 (Gabungan Tipe 1 dan sebagian tipe 3)	<ul style="list-style-type: none"> • KLHK vs SAD • KLHK vs Masyarakat desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Klaim Pengelolaan • Klaim Akses dan Pakai kawasan 	Sedang	Wajar

**

Resolusi konflik yang dalam bahasa Inggris adalah *conflict resolution* memiliki makna yang berbeda-beda menurut para ahli yang fokus meneliti tentang konflik. Resolusi dalam *Webster Dictionary* menurut Levine adalah (1) tindakan mengurai suatu permasalahan, (2) pemecahan, (3) penghapusan atau penghilangan permasalahan. Sedangkan Weitzman & Weitzman mendefinisikan resolusi konflik sebagai sebuah tindakan pemecahan masalah bersama (*solve a problem together*). Lain halnya dengan Fisher *et al* yang menjelaskan bahwa resolusi konflik adalah usaha menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa tahan lama di antara kelompok-kelompok yang berseteru. Menurut Mindes, resolusi konflik merupakan kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan dengan yang lainnya dan merupakan aspek penting dalam pembangunan sosial dan moral yang memerlukan keterampilan dan penilaian untuk bernegosiasi, kompromi serta mengembangkan rasa keadilan. Dari pemaparan teori menurut para ahli tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan resolusi konflik adalah suatu cara individu untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dengan individu lain secara sukarela. Resolusi konflik juga menyarankan penggunaan cara-cara yang lebih demokratis dan konstruktif untuk menyelesaikan konflik dengan memberikan kesempatan pada pihak-pihak yang berkonflik untuk memecahkan masalah mereka oleh mereka sendiri atau dengan melibatkan pihak ketiga yang bijak, netral dan adil untuk membantu pihak-pihak yang berkonflik memecahkan masalahnya (Suhardono, 2015).

Resolusi konflik adalah suatu proses pemecahan masalah secara komprehensif efektif di mana konflik adalah masalah bersama para pihak yang seharusnya diselesaikan secara kolaborasi. Resolusi konflik merupakan suatu upaya penyelesaian konflik melalui prosedur yang disepakati para pihak. Prosedur penyelesaian dapat dilakukan melalui prosedur formal hukum positif di Pengadilan, atau prosedur alternatif di luar Pengadilan. Di luar Pengadilan, prosedur penyelesaian dapat ditempuh melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Proses resolusi konflik sewajarnya menghilangkan sikap kompetitif di mana pihak-pihak yang bertikai terlibat dalam kompetisi atau perjuangan untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Sifat kompetitif ini seringkali menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang berkonflik. Lebih lanjut menunjukkan bahwa proses kooperatif-konstruktif resolusi konflik dipupuk oleh efek khas kerjasama.

Disadari bahwa, dalam realitanya, apa yang diharapkan melalui pemikiran melimitasi konflik beserta eksekusinya (demikian pula guna melakukan resolusi konflik) tidaklah mudah. Acapkali kehendak untuk mengakhiri konflik tidak datang dari semua pihak yang bertikai, yang mana menyebabkan kondisi tanpa konflik tidak tercapai. Mungkin pula muncul situasi dimana betapapun kehendak tersebut sudah muncul pada kedua belah pihak, tetapi belum terdapat kesepakatan perihal bagaimana pengakhiran (*ending*) dilakukan, demikian pula kesediaan menerima akibat-akibat ikutan dari pengakhiran tersebut. Upaya pencarian resolusi konflik tidak hanya melihat aspek formal dan material dari telah terjadinya suatu tindak pelanggaran hukum. Pendekatan resolusi konflik, sebagai alternatifnya, melihat pada aspek kebergunaan suatu tindakan dalam rangka pertama-tama menghentikan konflik itu sendiri (Meliala, 2001).

“Apapun yang terjadi, bila pada awalnya konflik dianggap sebagai solusi, maka apabila kemudian solusi yang lain dianggap perlu untuk diketengahkan setelah konflik berkembang tak terkendali, ketika itulah hadir konsep resolusi konflik,” ungkap Kepala Balai TNLL, Jusman, 2020.

Jusman merujuk pada proses rezonansi di TNLL. Konsep rezonansi hadir sebagai jawaban atas konflik di atas konflik. Di satu sisi, pihak Balai TNLL tengah berupaya mencari solusi atas persoalan klaim tenurial yang terjadi di hampir di seluruh kawasan TNLL. Kasus Dongi-Dongi menjadi media belajar yang sangat penting bagi semua pihak. Di tengah upaya solusi itu, klaim masyarakat atas wilayah hutan adat juga sedang berproses di lapangan. Masyarakat adat didukung berbagai organisasi non pemerintah melakukan pengusulan hutan adat yang sebagian besar berada di dalam kawasan TNLL. Pada saat itulah konsep resolusi konflik hadir dengan menengahkan proses rezonansi partisipatif.

Revisi zonasi telah dan sedang dilakukan berbagai taman nasional untuk mensinergikan pola pengelolaan kawasan konservasi dengan kebutuhan lain, misalnya kebutuhan untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat adat.

Di TNLL, pihak Balai mengakomodir kepentingan masyarakat adat lewat persamaan persepsi mengenai pola ruang. Di satu pihak, masyarakat adat telah memiliki pola ruang pengelolaan wilayah adat. Sementara di sisi lain, TNLL juga memiliki zona pengelolaan. Dua hal ini, dalam konteks pengelolaan tidak memiliki perbedaan mendasar.

Sebagaimana diuraikan BRWA, bahwa masyarakat adat Ngata Toro memiliki peruntukan kawasan berupa Wana Ngkiki, Wana, Pahawa pongko, Oma, Balingkea, dan Pangale. Tiap kawasan memiliki arti dan fungsi yang berbeda-beda.

Revisi zonasi TNLL tahun 2017 bertujuan mengoptimalkan pengelolaan kawasan melalui: (1) Akomodasi terhadap kepentingan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat serta pembangunan wilayah; (2) Akomodasi terhadap kepentingan pemanfaatan kawasan berupa Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan; dan (3) Memberikan arahan kebijakan penggunaan ruang dalam kawasan TNLL dan pengendalian pemanfaatannya (BBTNLL, 2018).

Proses revisi zonasi ini tentunya sangat dipengaruhi oleh paradigma pengelolaan kawasan konservasi. hal tersebut menghasilkan 2 (dua) hal yang fundamental, yakni: a) sinergitas konsep zonasi TNLL dengan ruang adat berdasarkan usulan wilayah adat di TNLL, dan b) adanya perubahan yang signifikan berupa adanya alokasi zona tradisional seluas 25.728 Ha, dimana pada zonasi sebelumnya belum ada alokasi zona tradisional.

Di TNLL, faktor yang mendorong adanya revisi zonasi adalah: (1) mensinergikan konsep ruang menurut adat ke dalam pengelolaan taman nasional; (2) pemanfaatan masyarakat lokal dan pemanfaatan jasa lingkungan; (3) Pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan; (4) penyesuaian terhadap kondisi penutupan lahan terbaru; (5) mengakomodir ruang kemitraan konservasi dengan masyarakat adat / lokal; (6) adanya kebijakan baru batas TNLL (BBTNLL, 2018).

Sementara itu, Balai TNS saat ini sedang terus melakukan proses revisi zonasi. Kendati demikian, konflik di lapangan terus saja berlangsung. Pada momen ini, Balai TNS tengah mendorong percepatan tata batas taman nasional dengan wilayah Kota Palangka Raya. Hal ini penting mengingat wilayah batas ini akan terus menerus menjadi persoalan bila tidak segera diselesaikan.

Kecuali itu, TNS juga terus berupaya melakukan sosialisasi tentang pentingnya zonasi. Banyak pihak yang belum memahami sejauh mana zonasi menjadi landasan pengelolaan taman nasional. Karenanya, sosialisasi kepada para pihak juga terus dilakukan.

Menurut Ningsih, pada kasus Habaring Hurung, Balai TNS tercatat telah melakukan beberapa kali pertemuan. Pertemuan-pertemuan tersebut melibatkan masyarakat, Pemda, Anggota DPRD Palangka Raya, BPN. Namun hingga saat ini, belum ada hasil yang memuaskan semua pihak. Balai TNS juga terus berupaya melakukan pengusulan penetapan tata batas. Selain itu juga pihak Balai TNS beberapa kali melakukan upaya penyelesaian permasalahan tenurial, seperti beberapa kali mengusulkan penataan tapal batas ulang kepada pihak pemerintah terkait.

Sementara di TNBD , bekas kebakaran dengan mudah dapat ditemui. Tanaman sawit segera menyerbu bekas-bekas kebakaran itu. anggota Masyarakat Mitra Polhut (MMP) di TNBD, Selambai (2020) mengatakan bahwa kebun kelapa sawit bekas lahan terbakar itu dikelola oleh SAD.

“Tapi biasanya hanya bertahan sebentar saja, tidak akan sampai panen,” ucapnya.

Selambai yang juga ketua sub kelompok dalam kelompok Tumenggung Grip itu juga mengungkap, lahan-lahan akan segera berpindah tangan ke orang desa sekitar, baik orang desa melayu maupun orang desa transmigrasi dalam bentuk kontrak ataupun jual beli.

Di TNBD sendiri terdapat 2 kategori permasalahan tenurial, yaitu *pertama* masalah pengelolaan dan pemanfaatan kawasan oleh SAD dan *kedua* masalah pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pada kebun-kebun tua milik masyarakat desa tersebut. Revisi zonasi di TNBD dilakukan pada tahun 2019.

Di TNS, kebutuhan akan rezonasi diungkap sebagai bagian dari negosiasi dengan wilayah eks transmigrasi. Rezonasi juga diperlukan untuk mengakomodir keperluan penataan ruang Pemerintah Kota Palangka Raya. Sementara di TNLL, untuk kepentingan masyarakat adat, dan di TN Bukit Duabelas untuk menata wilayah pengelolaan masyarakat asli.

Di TNS, sejak pertengahan tahun 2020, Lembaga Alam Tropika Indonesia (LATIN) berkoordinasi dengan pihak Balai TNS untuk mendukung program rezonasi. Habaring Hurung merupakan wilayah yang sedang menjadi fokus kerja LATIN untuk upaya pelepasan kawasan. Proses ini sedang terus bergulir kendati masyarakat Habaring Hurung mulai membuka diri untuk berdiskusi dan bersinergi untuk program pelepasan kawasan. Namun kendala yang dihadapi saat ini adalah di pengumpulan sertifikat tanah untuk LU II (Siahaan, 2020).

Banyak sertifikat tanah masyarakat untuk LU II yang sudah tidak diketahui keberadaannya. Bahkan banyak pemilik sertifikat yang sudah pindah keluar daerah membawa serta sertifikatnya. Kendala tersebut menjadi masalah serius, karena dalam pengusulan pelepasan kawasan harus sesuai luas usulan dengan disertai bukti alas hak (Suroto, 2020).

Pertanyaan selanjutnya, kriteria zonasi seperti apa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat? Bagaimana berdamai dengan para perambah? Pendekatannya mungkin akan berbeda dari sekedar melakukan penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian 6. Meniti Jalan Keluar

Sigi Objek Sengketa

Objek konflik tenurial merupakan sebidang tanah, atau lahan yang disengketakan. Misalnya tanah, atau lahan yang diklaim sebagai hak masyarakat adat. Maka, pemetaan objek konflik tenurial mesti dilakukan dengan memahami faktor-faktor pengiringnya, seperti: sejarah lahan, sejarah pengalihan hak, bukti penguasaan dan lainnya. Disadari atau tidak, kadang untuk melakukan pemetaan objek konflik tenurial secara tepat, dibutuhkan proses pembuktian yang panjang.

Di banyak kasus, pembuktian atas klaim kerap mengalami persoalan. Mulai dari ketidak-tersediaan data, tidak ada masyarakat yang mau diajak bicara, minimnya sumber-sumber literasi, serta hal lain. Bahkan kadang pembuktian tidak dilakukan karena minimnya keberadaan ahli yang dapat melakukan pembuktian. Oleh karenanya, Balai TN mesti memiliki kemampuan dasar untuk melakukan pembuktian klaim.

Dalam kasus lain misalnya, untuk memberikan dugaan bahwa klaim masyarakat benar, dapat pula melakukan perbandingan tata kelola lahan antara masyarakat yang melakukan klaim dengan masyarakat yang memiliki karakter adat yang sama. Dapat pula melihat silsilah dalam konteks kesejarahan. Di Lindu, Toro, dan *ngata* lainnya di lanskap TNLL, tata kelola wilayah adat secara umum bisa dikatakan hampir sama satu dengan lainnya. Pembagian pengaturan tata kelola lahan dalam *huaka-huaka* yang di tentukan berdasarkan hukum adat dapat menjadi satu rujukan dalam menentukan zona pengelolaan TNLL.

Kecuali itu, pembuktian juga dapat dilakukan dengan merunut atau mengkronologiskan kejadian-kejadian penting yang terjadi pada lahan yang disengketakan. Balai TN mesti memiliki kemampuan membuat kronologi yang tepat dengan mengandalkan sumber-sumber literasi tertulis ataupun verbal. Dalam konteks ini, sumber tertulis sepertinya lebih baik digunakan karena sumber verbal bisa saja mengalami distorsi informasi dari waktu ke waktu.

Seperti yang terjadi di TN Sebangau untuk kasus Habaring Hurung. Penggalan sejarah lahan seharusnya bisa lebih dioptimalkan terlebih dahulu mengingat masyarakat yang bermukim disana merupakan eks program transmigrasi dari pemerintah. Meskipun setiap perubahan pemerintahan juga kerap diikuti dengan perubahan kebijakan, mestinya penggalan sejarah lahan berdasarkan bukti pendukung seperti dokumen sah menjadi pertimbangan sebelum penetapan kawasan.

Namun, lagi-lagi ini berkaitan dengan kapasitas yang dimiliki Balai TN. Jika hal tersebut dirasa belum mencukupi, maka KLHK melalui Ditjen KSDAE tentunya memiliki cara tersendiri untuk membuat perencanaan program serta penganggaran.

Kemampuan teknis lainnya yang turut mendukung adalah pemetaan spasial. Secara umum, kemampuan ini telah dimiliki oleh masing-masing Balai TN. Kapasitas *GISer*, orang yang ahli dalam hal GIS (*Global Information System*), mestinya tidak hanya melakukan pengambilan titik koordinat dan pengolahan peta melalui perangkat komputer. Tapi *GISer* mestinya juga memiliki kecakapan berkomunikasi yang baik dengan masyarakat. Dalam hal pemetaan spasial di lapangan, *GISer* tentu tidak sendiri, dia akan seiring dengan staf SPTN Wilayah atau setidaknya staf resot setempat.

Perpaduan keahlian teknis spasial dengan kemampuan fasilitasi masyarakat akan membuat peta yang dihasilkan lebih kaya dengan informasi, tidak sebatas garis-garis yang diunduh dari peralatan GPS (*Global Position System*) saja.

Keterlibatan masyarakat asli atau masyarakat adat dalam proses pemetaan akan sangat memperkaya informasi tentang suatu wilayah yang di petakan. Informasi sejarah lahan serta pembagian zona berdasarkan pemanfaatannya bagi masyarakat asli atau masyarakat adat misalnya, sungguh merupakan sumber kekayaan informasi bagi pengelola kawasan.

Dalam melakukan pemetaan spasial yang memasukkan ragam informasi spasial terkait konflik tenurial, maka kemampuan fasilitasi dan komunikasi masyarakat menjadi salah satu kunci. Kemampuan minor ini kadang terlupakan lantaran staf SPTN Wilayah atau resot setempat sudah merasa mengetahui keadaan di lokasi dimana konflik tenurial terjadi. Mengapa begitu? Karena lokasi tersebut telah lama menjadi wilayah kerja staf bersangkutan. Padahal, belum tentu itu benar. Karenanya, penting pula bagi Balai TN melakukan latihan penyegaran untuk staf yang bekerja di lapangan terkait dengan kemampuan fasilitasi dan komunikasi dengan masyarakat.

Berkait kemampuan fasilitasi dan komunikasi, Balai TN tentu banyak mengandalkan staf di lingkup SPTN Wilayah dan resot. Karena itu, penting melakukan penilaian terhadap personil yang memiliki kemampuan tersebut. PEH sebagai bagian dari ujung tombak konservasi memegang peranan penting dalam hal ini. Seperti yang disampaikan oleh polhut dari Balai TNS, mereka sangat membutuhkan pelatihan terkait strategi komunikasi. Polhut yang biasanya bekerja dalam konteks penegakan hukum memiliki *stereotype* jelek di tengah masyarakat, karena dikenal sebagai tukang tangkap. Jika suatu saat mereka harus kembali lagi dengan beban tanggung jawab melakukan tindakan yang lebih persuasif, sebagian masyarakat justru akan curiga atau bahkan khawatir ada yang akan balas dendam.

Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) merupakan Aparat Sipil Negara (ASN) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengendalian ekosistem hutan. Pengendalian Ekosistem Hutan adalah segala upaya yang mencakup metode, prosedur, strategi dan teknik dalam kegiatan perencanaan hutan, pemantapan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, pengelolaan Daerah Aliran Sungai serta konservasi sumberdaya hutan secara efektif dan efisien menuju pengelolaan hutan berkelanjutan (P.13, 2017).

Selanjutnya, Pembinaan Jabatan Fungsional PEH dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme PEH dalam rangka mendukung terselenggaranya kegiatan pengendalian ekosistem hutan secara efektif, efisien, terarah dan optimal. Tujuannya, yakni menyediakan acuan pembinaan Jabatan Fungsional PEH bagi instansi/unit kerja terkait, memperjelas tugas para pihak dalam pembinaan Jabatan Fungsional PEH sesuai kewenangan dan tanggung jawab masing-masing, mendorong peran Jabatan Fungsional PEH sebagai ujung tombak pelaksana tugas-tugas teknis dalam organisasi, dan membangun kesepahaman bersama antar para pihak dalam pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional PEH (P.13, 2017). PEH dapat turut serta melakukan kajian mendalam terhadap objek konflik tenurial, berikut melakukan fasilitasi dan menjalin jembatan komunikasi dengan masyarakat dimana konflik tenurial terjadi.

Sigi Subjek Sengketa

Subjek konflik tenurial merupakan pihak-pihak yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan subjek dan objek konflik tenurial yang sedang terjadi. Riset lapangan yang dilakukan pada 3 taman nasional ini menemukan bahwa subjek konflik terbagi atas dua kelompok utama, yakni kelompok subjek langsung, dan kelompok subjek tidak langsung.

Kelompok subjek langsung adalah kelompok subjek konflik yang berhubungan langsung dengan objek konflik tenurial. Hubungan langsung dapat dicirikan dengan adanya **interaksi kuat antara subjek dengan objek konflik**. Sebagai contoh interaksi yang terjadi adalah, bahwa subjek secara langsung

melakukan pengolahan lahan pada objek konflik. Sebagai contoh adalah Orang Rimba di TNBD yang memang hidup dan berpenghidupan dalam kawasan tersebut. TNBD memang dimandatkan sebagai ruang hidup bagi Orang Rimba. Contoh lain adalah apa yang terjadi di TNLL, dimana masyarakat adat Ngata Toro memiliki interaksi langsung yang kuat dengan wilayah adatnya, mulai dari wana ngkiki, pangale dan sebagainya. Selain itu, Ngata Toro juga dilengkapi dengan satuan pengamanan hutan berbasis adat yang disebut *Tondo Ngata*.

Penciri lain dari hubungan langsung ini adalah dengan **adanya manfaat langsung yang diambil oleh subjek konflik terhadap objek yang disengketakan**. Jadi, selain interaksi akibat pengelolaan, ada pula manfaat-manfaat yang diterima subjek dari objek yang disengketakan. Contohnya masyarakat 4 desa yakni Kamarora B, Rahmat, Kadidia, dan Kamarora A di bagian timur TNLL, yang memang mendapatkan manfaat karena menggarap lahan dalam kawasan untuk kebutuhan pertanian mereka. Hal serupa yang juga terjadi pada Orang Rimba di TNBD. Orang Rimba menjadikan subjek konflik sebagai ruang hidup dan berpenghidupan, dalam arti bahwa mereka memang tergantung langsung dengan lahan yang disengketakan.

Sementara kelompok subjek tidak langsung adalah para pihak yang tidak berkaitan langsung dengan subjek konflik tenurial. Namun kelompok ini memiliki ciri atau karakter khusus.

Berdasarkan Perdirjen PSKL P.6/PSKL/SET/PSL.1/5/2016 tahun 2016 tentang Pedoman Asesmen Konflik Tenurial Kawasan Hutan, aktor konflik dibedakan menjadi 3, yakni; Aktor Provokator, Aktor Kelompok-Kelompok Rentan dan Aktor Kelompok Fungsional. Aktor provokator adalah aktor utama yang terlibat dalam konflik, kadang kala memiliki logika tidak biasa tentang peristiwa yang terjadi atau faktor-faktor dalam konflik, dan disebarkan dalam bentuk informasi yang distorsif. Aktor kelompok-kelompok rentan yaitu kelompok masyarakat yang menerima provokasi atau logika yang dibangun/disebarkan oleh provokator tanpa melakukan verifikasi. Sementara, aktor kelompok fungsional adalah kelompok yang bertanggung jawab menghentikan kekerasan dan mencegah meluasnya konflik.

Berkaca dari hasil studi lapangan di 3 Taman Nasional, maka agak sulit meletakkan para aktor ke dalam kategori yang disebutkan dalam peraturan Dirjen PSKL tersebut. Sebagai contoh, apakah masyarakat desa transmigrasi di sekitar TNBD dapat dikategorikan sebagai provokator atas tindakan mereka dalam memperoleh lahan melalui jual beli dengan Orang Rimba? Padahal hubungan ini semacam simbiosis mutualisme karena satu pihak membutuhkan pihak lain sehingga terjadi kesepakatan peralihan lahan tersebut.

Sementara di sisi lain, bahkan ada pula Orang Rimba yang sengaja melakukan praktik jual-beli lahan. Dalam konteks ini, tentu pelaku praktik ini tidak dapat dikategorikan sebagai kelompok aktor rentan. Tentulah mereka akan menjadi aktor provokator. Tapi seiring dengan itu, mereka tentu akan tetap mengatasnamakan Orang Rimba. Hal serupa juga yang terjadi di Habaring Hurung melalui klaim masyarakat adat lokal di wilayah eks transmigrasi.

Di masyarakat adat di Ngata Toro, saat ini dikategorikan sebagai Kelompok Rentan disaat hukum adat mereka lebih di kedepankan dalam kasus-kasus pelanggaran hukum di TNLL yang berhimpitan dengan wilayah adatnya. Namun di saat lain, bisa saja mereka akan menjadi provokator.

Oleh karenanya, pembedaan aktor provokator ini harus dilakukan dengan sangat hat-hati, analisa yang tajam menuntut adanya ketersediaan data lapangan yang akurat. Para aktor tentunya melalui rangkaian perubahan kepentingan, pada saat perubahan terjadi itulah peran analisa aktor menjadi sangat krusial.

Dalam konteks penyelesaian, lagi, cara pandang yang ditawarkan Wiratno menjadi penting sebagai rujukan. Kerjasama antar Eselon I merupakan prinsip yang juga mesti dijalankan. Prinsip inilah yang digunakan oleh BPSKL Sulawesi yang memfasilitasi pertemuan antara masyarakat adat Ngata Toro dengan Balai TNLL.

Dalam ranah lain, ada pula yang menyebutkan bahwa aktor konflik terbagi atas 3, yakni; aktor primer, aktor sekunder dan aktor tersier. Aktor primer adalah para pihak yang sedang berkonflik dalam posisi berhadapan-hadapan langsung. Aktor Sekunder adalah para aktor yang ikut merasakan ketegangan, sementara Aktor Tersier adalah para aktor yang dapat berpengaruh terhadap konflik yang sedang terjadi.

Dengan kriteria ini – jika melanjutkan mengambil contoh kasus di TNBD, – para aktor primer dapat diidentifikasi dengan jelas, yakni Orang Rimba dan BTNBD yang memiliki pertentangan kewenangan langsung dalam objek yang sama. Aktor sekunder contohnya adalah masyarakat desa transmigrasi di sekitar TNBD yang mendapatkan manfaat berupa lahan yang diperoleh dari Orang Rimba. Sementara aktor tersier contohnya adalah Pemerintah Daerah Sarolangun yang perannya dapat memberikan pengaruh terhadap permasalahan ekonomi, sosial dan budaya bagi Orang Rimba.

Tanpa menegasikan peraturan yang telah ada, dan pandangan lain, riset lapangan ini menemukan 7 kelompok aktor tidak langsung. Hubungan tidak langsung dicirikan oleh beberapa karakter, di antaranya: *1, pihak yang mendukung salah satu dari pihak yang berkonflik.* Bercermin dari kasus di TNLL, beragam pihak dari organisasi non pemerintah (Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM) mendukung pengusulan hutan adat yang diajukan oleh masyarakat Ngata Toro. Dalam konteks pengajuan usulan ini, masyarakat sesungguhnya bertujuan untuk meningkatkan posisi tawar agar dapat bicara dengan Pemerintah yang dalam hal ini adalah Balai TNLL. Untuk itu, maka pengusulan hutan adat menjadi salah satu jalan yang dirasa cukup menopang posisi tawar masyarakat. Dalam kondisi itulah dukungan kepada masyarakat mengalir dari berbagai LSM, kendati LSM sendiri tidak berada dalam posisi yang saling berhadapan dengan Balai TNLL.

2, pihak yang mendukung para pihak yang berkonflik dalam rangka resolusi konflik. melanjutkan kasus masyarakat adat dengan Balai TNLL, maka pihak dalam kategori ini adalah BPSKL Sulawesi melalui FP3-nya. BPSKL Sulawesi mendukung pertemuan antara para pihak yang berkonflik untuk menemukan solusi atas persoalan mereka.

3, pihak yang mengambil keuntungan – baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi – terhadap situasi konflik yang sedang terjadi. Di TNS misalnya, kasus-kasus yang muncul ke permukaan yang dominan adalah konflik antara Balai TNS dengan masyarakat. Faktanya, terdapat aktor intelektual atau oknum pejabat yang turut serta berpengaruh terhadap konflik yang terjadi. Para aktor intelektual ini memiliki kepentingan atas lahan yang disengketakan. Bahkan, para aktor ini mengatas-namakan barisan masyarakat adat lokal untuk mempertahankan kepentingannya.

4, pihak yang tidak terlibat di dalam konflik tapi ikut serta mengalami ketegangan ketika konflik terjadi. Sebagai contoh adalah Pemerintah Kabupaten Sigi di Sulawesi Tengah. Ketika Balai TNLL melakukan revisi zonasi, pada saat bersamaan masyarakat Ngata Toro memasukkan usulan hutan adat. Dua kepentingan yang saling berhadapan ini terjadi pada wilayah yang secara administrasi diurus oleh Pemerintah Kabupaten Sigi, maka dalam hal ini Pemerintah Daerah yang sama sekali tidak terlibat dalam konflik batas maupun zonasi taman nasional turut merasakan ketegangan. Dalam hal ini, ketegangan dipicu oleh konflik antara kedua subjek atau aktor primer yang sedang terjadi.

5, pihak lain yang secara tidak langsung dirugikan atau tidak diuntungkan atas konflik yang terjadi. Kelompok aktor ini mungkin tidak memberikan pengaruh penting atas konflik, tapi keberadaannya dapat

memicu eskalasi konflik menjadi meningkat. Kendati pemetaan atas aktor dari jenis ini tidak banyak dilakukan, tapi keberadaannya memungkinkan memberikan pengaruh atas konflik. sebagai contoh pada kasus TNBD, para makelar lahan yang melakukan praktik jual beli lahan di dalam kawasan taman nasional tentu akan dirugikan karena proses revisi zonasi. Mereka yang melakukan praktik ini tentu tidak akan berada langsung berhadapan dengan para pelaku konflik, namun keberadaan mereka tentu akan sangat berpengaruh pada tingkat eskalasi konflik di lapangan.

Kondisi serupa mungkin pula dapat dipetakan dari para aktor atau oknum yang mengkalim sebagai masyarakat adat di wilayah eks transmigrasi di Habaring Hurung. Pihak TNS dan masyarakat yang sedang berhadapan akan dengan mudah dipengaruhi jika para oknum ini dibiarkan melakukan provokasi.

6, pihak yang dapat membantu penyelesaian konflik. Aktor dalam kategori ini biasanya adalah pihak ketiga. Misalnya dalam revisi zonasi Balai TNLL, program FP 3 adalah pihak yang dapat membantu penyelesaian konflik. kendati tidak berada pada posisi yang langsung dapat mengurai konflik, tapi setidaknya lewat fasilitas program ini, konflik antara kedua aktor primer dapat diurai dan dipahami bersama.

Dan 7, pihak yang secara tidak langsung memberikan pengaruh – positif ataupun negatif – pada konflik yang terjadi. Pihak-pihak dalam kategori ini beragam, tergantung pengaruh yang diberikannya. Misalnya BPSKL Sulawesi dalam kasus TNLL. Dalam konteks ini, BSKL tentu bergerak atas arahan Ditjen sendiri, sementara konflik yang terjadi berada dalam lingkup kerja Ditjen berbeda. Dalam konteks ini, Ditjen PSKL menjadi pihak yang dapat dimasukkan ke dalam kategori ini.

Memetakan subjek konflik memang membutuhkan upaya yang sungguh-sungguh. Kepentingan para aktor mesti dapat dipetakan secara jelas dan terukur. Kadang, kepentingan para aktor dapat berubah-ubah sesuai dengan dinamika yang terjadi. Misalnya, aktor tidak langsung dalam kategori 1 bisa berpindah menjadi kategori 2 atau lainnya.

Sigi Faktor Sengketa

Berdasarkan Perdirjen PSKL P.6/PSKL/SET/PSL.1/5/2016, faktor konflik terjadi saat 2 pihak atau lebih meyakini bahwa kepentingan mereka tidak sejalan, mengekspresikan sikap permusuhan atau mengambil tindakan yang merusak kapabilitas pihak lain untuk memenuhi kepentingan mereka. Ada 3 elemen utama dalam melakukan analisis terhadap faktor-faktor konflik yang terjadi pada suatu wilayah, yaitu: akar konflik (faktor struktural), Pemicu Konflik dan Akselerator Konflik, atau yang biasa disingkat A.P.A.

Akar Konflik atau Faktor Struktural (A) adalah faktor-faktor atau situasi yang menciptakan sebuah kondisi awal terhadap kemungkinan terjadinya sebuah konflik. Akar konflik atau faktor struktural adalah sumber konflik yang sebenarnya dan paling mendasar. Contoh: Perbedaan kepentingan, perbedaan nilai, perbedaan struktur, Pembiaran dalam waktu lama, Hak tenurial kawasan hutan.

Pemicu Konflik (P) adalah kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa biasa yang bisa menyebabkan terjadinya konflik. Pemicu konflik juga seringkali diidentifikasi sebagai faktor yang muncul tiba-tiba dalam kejadian konflik. contoh: Penyerobotan lahan, Penggusuran, Penangkapan, Pembakaran rumah dinas, Penganiayaan oleh petugas Operasi kayu.

Akselerator Konflik atau Faktor Pemercepat (A), adalah faktor-faktor atau peristiwa-peristiwa yang dapat mempercepat terjadinya konflik atau mempercepat meluasnya konflik. contoh: Kebijakan yang diskriminatif, Pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM.

Dalam kajian yang dilakukan ini, konsep A.P.A sangat relevan untuk digunakan. Setiap kasus konflik tenurial yang terjadi memenuhi unsur Akar Konflik, Pemicu Konflik dan Akselerator Konflik.

Selanjutnya, Perdirjen PSKL P.6/PSKL/SET/PSL.1/5/2016 memperdalam hal-hal yang berkaitan dengan analisa dan pelaporan. Dalam konteks resolusi konflik, peraturan ini juga menjabarkan mengenai Tantetara, Tawaran Tertinggi dan Tawaran Terendah. Untuk menghasilkan Tantetara, maka dibutuhkan identifikasi pihak-pihak yang mewakili masyarakat dalam proses penanganan konflik dan advokasi masyarakat.

Riset lapangan dan pengalaman lapangan para penulis, mencoba menyerdehanakan. Pemetaan faktor konflik juga dapat dimulai dengan *mengidentifikasi situasi nyata yang dilihat dan dirasakan di lapangan*. Dalam hal ini, Balai TN perlu mencatat semua akibat yang ditimbulkan oleh konflik tenurial.

Misalnya di TNBD bagian selatan, PEH di Balai TNBD dapat memetakan akibat-akibat penting yang terjadi karena adanya konflik tersebut. Akibat penting yang terjadi diantaranya: adanya aktivitas penanam kelapa sawit pada lahan bekas terbakar dalam kawasan TNBD, dan pembelaan yang berlebihan dari komunitas Orang Rimba terhadap penindakan atas kebun-kebun baru dalam kawasan TNBD yang dicurigai telah dimiliki oleh masyarakat desa transmigrasi.

Selanjutnya, penting pula *mengidentifikasi penyebab atas situasi di lapangan tersebut*. dalam hal ini, Balai TN penting mencatat penyebab-penyebab atas situasi yang dilihat di lapangan. Contoh, masifnya keberadaan kebun sawit di sekitar TNBD atau kebun kakao di TNLL yang di tunjang oleh tersedianya akses pasar dari hulu ke hilir untuk komoditi tersebut. Besarnya peluang pasar telah memaksa masyarakat melakukan penanaman komoditas tersebut dan berharap mendapat keuntungan dari proses itu. Artinya, pasar sangat berpengaruh pada pola budidaya yang dilakukan masyarakat.

Dalam konteks ini, ada dua hal yang mesti diperhatikan. Pertama, memang ada permintaan pasar yang cukup besar atas komoditi-komoditi yang disebutkan. Namun di sisi lain, ada pula keinginan kuat dari masyarakat untuk meraih keuntungan dari komoditi yang ditanamnya.

Pada tahap berikutnya, penting *mengidentifikasi faktor-faktor yang memicu terjadinya faktor utama*. Tingginya permintaan pasar misalnya, telah memicu perubahan pola budidaya masyarakat. Namun mungkin saja ada faktor lain, misalnya lemahnya penegakan hukum atau minimnya aktivitas patroli yang dilakukan Balai TN.

Pada prinsipnya, identifikasi ini mirip dengan corak identifikasi tulang ikan. Pada identifikasi bercorak tulang ikan, tulang ikan yang menghubungkan kepala dengan ekor adalah faktor utama. Sementara tulang-tulang lain yang tersambung ke tulang utama adalah pemicu.

Memetakan faktor konflik dengan cara ini mungkin akan lebih mudah. Ini juga sebanding lurus dengan model penyelesaian kasus di lapangan yang dibutuhkan. Coba bayangkan kalau tulang utamanya adalah kebijakan pemerintah dalam menetapkan Taman Nasional. Bagaimana langkah praktis menyelesaikannya? Tentu membutuhkan analisa, waktu, dan sumber daya yang lebih banyak. Oleh karenanya, tulang utama mestilah faktor-faktor yang secara langsung dapat dilihat dan dirasakan langsung di lapangan.

Jalan Keluar

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, maka resolusi konflik tenurial perlu mempertimbangkan kondisi objek, subjek dan faktor yang telah diurai pada bagian sebelumnya.

Pemahaman matang mengenai objek sangat penting karena masing-masing pihak yang berkonflik harus memastikan apa yang sedang dikonflikkan. Di banyak pengalaman, objek konflik tidak terpetakan dengan matang, sehingga pemetaan terhadap subjek juga menjadi masalah. Keduanya saling berhubungan. Dengan memahami objek konflik tenurial secara mendalam, Balai TN tentu bisa memastikan siapa pihak-pihak yang harus diajak duduk berunding.

Di kasus lain, mungkin saja yang terjadi adalah pemetaan objek sudah sangat matang, namun pemetaan subjek konfliknya justru yang bermasalah. Subjek yang dipetakan bisa saja melenceng dari kondisi konflik tenurial yang sebenarnya. Subjek yang tidak dapat mewakili pihak yang berkonflik secara langsung, tentu tidak akan mungkin dibawa berunding. Merujuk pada sistem representasi yang diungkap dalam Perdirjen PSKL P.6/PSKL/SET/PSL.1/5/2016, maka semestinya pihak Balai TN dapat memastikan pihak mana yang akan diajak berunding.

Sekali lagi, pemetaan atas objek dan subjek memang harus dilakukan dengan detail, mendalam dan fokus. Dua hal ini juga akan sangat mempengaruhi corak komunikasi di lapangan, karena komunikasi menjadi pintu yang dapat membuka ruang-ruang resolusi konflik tenurial.

Sebagai contoh, apa yang dilakukan Balai TNS bersama masyarakat Habaring Hurung. Pendekatan dan komunikasi intensif yang terus dilakukan Balai TNS, perlahan mampu membuat masyarakat Habaring Hurung untuk membuka diri dan menerima keberadaan TNS. Meskipun belum secara keseluruhan merangkul seluruh lapisan masyarakat, namun komunikasi efektif membuktikan terbukanya informasi terkait berbagai aktor dan kepentingan yang ada di Habaring Hurung. Ketika celah komunikasi sudah terbuka, maka ruang diskusi lintas sektor bisa dilakukan dengan baik.

Tantangan komunikasi formal ini sangat terasa jika dilakukan terhadap subjek konflik atau pihak-pihak yang memiliki *gap* kebudayaan yang sangat timpang. Di TNBD contohnya memaksakan komunikasi formal kepada Orang Rimba hanya akan mendatangkan ke sia-siaan. Diskusi informal mungkin bisa menjadi salah satu kegiatan yang tidak termasuk dalam mata anggaran, tapi Balai TN dituntut melakukan hal tersebut agar proses resolusi berlangsung pada jalur yang diperlukan.

Namun bagaimana komunikasi bisa berjalan dengan benar? Hal ini perlu didukung pula dengan pemahaman yang utuh terhadap situasi konflik yang terjadi. Maka dari itu, pemetaan faktor konflik turut menyumbang keberhasilan.

Faktor konflik, ketika diidentifikasi yang dengan baik akan memudahkan komunikasi. Artinya, komunikasi akan menjadi hambar bila tidak terjadi pemahaman utuh terhadap faktor konflik. Pengetahuan tentang fakta lapangan, ditambah dengan pemahaman yang utuh mengenai faktor konflik adalah senjata rahasia yang dapat dikeluarkan sewaktu-waktu.

Di sisi lain, ada pula model penyelesaian konflik yang memanfaatkan jasa mediator. Itu bisa saja terjadi, tapi catatan ini tidak mendalami hal tersebut. Jasa mediator termasuk ke dalam proses alternatif penyelesaian konflik tenurial di luar pengadilan, dalam bahasa Inggris dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR). ADR merupakan suatu perangkat penyelesaian sengketa di luar pengadilan berbasis pada kesepakatan antar pihak yang bersengketa. Ada beberapa istilah yang terkenal, misalnya: konsultasi, negosiasi, konsiliasi, maupun penilaian ahli.

Bagian 7. Langkah Revisi Zonasi (Partisipatif)

Berdasarkan hasil kajian tersebut, maka proses dan tahapan revisi zonasi memang masih mengacu pada regulasi yang tersedia, yakni:

1. Persiapan;
2. Pengumpulan dan Analisis Data, termasuk melakukan kajian-kajian ekologis, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang mencakup identifikasi nilai penting kawasan, analisa tutupan/penggunaan lahan, identifikasi para pihak;
3. Penyusunan draf rancangan rancangan zonasi berdasarkan target konservasi;
4. Konsultasi publik;
5. Perancangan;
6. Tata batas dan penetapan.

Tahapan-tahapan tersebut mestinya dapat melibatkan dan memperkuat peranserta masyarakat secara aktif. Namun dalam pelaksanaannya, pelibatan masyarakat terkendala karena minimnya kegiatan yang memfasilitasi ke arah tersebut. Kegiatan-kegiatan revisi zonasi yang dilakukan Balai TN sebatas pada kegiatan yang ada nomenklaturnya di dalam perencanaan dan mata anggaran. Karenanya, beberapa kegiatan tidak mungkin dilakukan. Padahal, kegiatan-kegiatan tersebut dapat secara luas menjangkau pelibatan masyarakat.

Tabel di bawah ini menjelaskan tahapan dan kegiatan yang dapat dilakukan oleh Balai Taman Nasional guna memfasilitasi peranserta masyarakat secara aktif dalam rangka resolusi konflik penataan ruang.

No	Tahapan	Kegiatan	Bentuk Partisipasi dan Tujuan Kegiatan Bersama Masyarakat
1	Persiapan	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat-rapat internal Balai TN, termasuk penunjukan Tim Revisi Zonasi, penyusunan perencanaan dan anggaran • Serial Sosialisasi dan dialog rencana revisi zonasi 	Masyarakat dapat terlibat memberikan data dan opini dalam sosialisasi dan dialog yang bertujuan untuk <i>menyusun rencana kegiatan rezonasi dan pembentukan tim rezonasi</i>
2	Pengumpulan dan Analisis Data, termasuk melakukan kajian-kajian ekologis, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang mencakup identifikasi nilai penting kawasan, analisa tutupan/penggunaan lahan, identifikasi para pihak	<ul style="list-style-type: none"> • Kajian Meja • Wawancara lapangan • Serial Diskusi terfokus dan dialog dengan masyarakat • Serial Pemetaan partisipatif • Serial Kunjungan lapangan dari para pihak, termasuk Pemerintah Daerah dan unit kerja pemerintah yang mungkin akan bersinggungan dengan mandate Balai Taman Nasional sebagai pengelola TN di level tapak 	<p>Masyarakat dapat terlibat memberikan data dan opini dalam wawancara lapangan, diskusi terfokus dan dialog, pemetaan partisipatif serta kunjungan lapangan. Ini bertujuan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Mengetahui usulan penataan zona dari masyarakat terkait dengan aktivitas yang telah dilakukan</i> • <i>Mengadopsi dan memadukan usulan zona masyarakat adat dengan sistem zona dari TN</i> • <i>Memvalidasi usulan zona dari masyarakat</i> • <i>Mengumpulkan data terkait ekologi, dan sosial ekonomi masyarakat untuk memadukan usulan zona masyarakat dengan TN</i>
3	Penyusunan draf rancangan rancangan zonasi berdasarkan target konservasi	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan dokumen • Serial Konsultasi dan dialog terbatas dengan para pihak • Serial Konsultasi draf dokumen revisi zonasi 	<p>Masyarakat dapat terlibat memberikan data dan opini dalam konsultasi dan dialog terbatas dan konsultasi draf dokumen revisi zonasi, bertujuan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Menyepakati perubahan zona yang mengkomodasi usulan masyarakat/adat dan target konservasi</i> • <i>Menghasilkan draf peta perubahan zonasi yang disepakati bersama</i>

No	Tahapan	Kegiatan	Bentuk Partisipasi dan Tujuan Kegiatan Bersama Masyarakat
4	Konsultasi publik	<ul style="list-style-type: none"> Serial Diskusi dan dialog Terfokus Serial Workshop / Lokakarya Publikasi dan layanan penyampaian masukan/keluhan berbasis web 	<p>Masyarakat dapat terlibat memberikan data dan opini dalam diskusi dan dialog terfokus, workshop/lokakarya dan penyampaian masukan / keluhan melalui layanan web, bertujuan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Menghimpun ragam masukan dari masyarakat untuk revisi zonasi</i> <i>Menyebarkan-luaskan informasi mengenai revisi zonasi</i> <i>Menjaring partisipasi khalayak luas untuk memberikan pandangan terhadap perubahan zonasi yang diusulkan</i>
5	Perancangan	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan dokumen final revisi zonasi Serial Konsultasi dan dialog terbatas dengan para pihak Serial Sosialisasi dan dialog rancangan revisi zonasi 	<p>Masyarakat dapat terlibat memberikan data dan opini dalam konsultasi dan dialog terbatas serta sosialisasi dan dialog rancangan revisi zonasi, bertujuan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Menyelesaikan dokumen perubahan zonasi yang disepakati bersama, untuk kemudian di sampaikan ke PIKA-KSDAE dalam rangka tinjauan akhir</i>
6	Tata batas dan penetapan	<ul style="list-style-type: none"> Serial Diskusi dan dialog Terfokus Serial Workshop / Lokakarya Tata batas lapangan Serial Sosialisasi tata batas lapangan 	<p>Masyarakat dapat terlibat memberikan data dan opini dalam diskusi dan dialog terfokus, workshop/lokakarya, tata batas lapangan dan sosialisasi tata batas, bertujuan <i>agar patok tata batas dapat dipasang di lapangan berdasarkan pengetahuan, kesepahaman dan persetujuan masyarakat.</i></p>

Kecuali enam tahapan tersebut, tahapan penting lainnya adalah melakukan Evaluasi Berkala terhadap Revisi Zonasi secara partisipatif. Kendati dalam pelaksanaannya, di Balai TN tidak terdapat nomenklatur tahapan ini. Tapi setidaknya, upaya tersebut sedang dilakukan di Taman Nasional Lore Lindu.

Sebuah lokakarya difasilitasi oleh BPSKL Sulawesi pada 3 hingga 5 November 2020. Melalui dukungan FP 3, BPSKL Sulawesi melaksanakan *Lokarya Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Adat di TNLL*. Lokakarya ini telah berhasil memetakan secara indikatif irisan zonasi dan tata ruang adat termasuk kandungan hak dan kewenangan dari sudut pandang hukum adat dan hukum negara di tiga komunitas adat; Toro, Lindu, dan Moa. Pada kesempatan ini juga telah di sepakati rencana tindak lanjut bersama antara TNLL dan Komunitas Adat pada masing-masing objek yang diidentifikasi tersebut.

BPSKL Sulawesi melalui program FP 3 telah berhasil membuka saluran komunikasi untuk penyalarsan perbedaan ini. Diharapkan ke depannya kerja multi pihak ini secara konsisten terus dilaksanakan dan melibatkan pihak-pihak lain yang juga berkepentingan misalnya pemerintah daerah dan pendamping masyarakat.

Ini sebuah langkah maju dalam resolusi konflik, dimana konflik antara masyarakat dengan Taman Nasional difasilitasi oleh BPSKL yang berada di lingkup Direktorat Jenderal berbeda dengan Direktorat Jenderal KSDAE. Pada level ini, apa yang disyaratkan Wiratno melalui cara pandang baru pengelolaan kawasan konservasi menjadi sangat relevan.

Bagian 8. Tema-Tema Lapangan

Mata Pencaharian dan Perubahan Fungsi Lahan

Masyarakat di sekitar TNLL misalnya, mereka sangat mengenal kakao. Bahkan, pasar kakao di daerah ini sudah terbentuk dengan sangat baik. Permasalahan muncul ketika kakao di usahakan di dalam kawasan taman nasional. Masalah timbul karena kakao bukan merupakan jenis tanaman kehutanan melainkan tanaman perkebunan.

Masyarakat Habaring Hurung mendapati tantangan pahit yang harus diterima bertahun-tahun untuk mengolah lahan usaha transmigrasi, karena wilayah tersebut merupakan area gambut dalam. Diperlukan teknik dan waktu bertahun-tahun untuk mengolah lahan gambut agar bisa ditanami dengan berbagai jenis komoditi pertanian. Dalam prosesnya, sebagian masyarakat akhirnya bertahan hidup dengan mencari hasil hutan dan sebagian ada juga yang membuat arang di wilayah usaha yang belakangan ditetapkan masuk kedalam kawasan TNS.

Di TNBD, perkebunan kelapa sawit sangat masif menguasai lahan-lahan di luar taman nasional. Akibatnya, lahan untuk kegiatan pertanian masyarakat semakin berkurang. Dengan demikian, kawasan TNBD dipandang sebagai alternatif yang paling mungkin dapat diakses masyarakat untuk dijadikan sebagai lahan garapan.

Pilihan komoditi pertanian yang dihasilkan oleh masyarakat di TNBD juga tidak sesuai dengan macam-macam komoditi yang dapat di usahakan dari kawasan hutan. Kelapa sawit dianggap sebagai komoditi nomor satu yang dapat memberikan keuntungan ekonomis dibanding karet (Jailani, 2020). Padahal kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan bukan tanaman kehutanan dan hal ini dilarang terdapat dalam kawasan hutan (Yusan, 2020).

Selain itu, masyarakat pendatang juga menimbulkan masalah. Lahan di luar taman nasional telah dikuasai masyarakat lokal. Pilihannya, lahan di dalam taman menjadi sasaran. Termasuk di TNLL, keberadaan masyarakat pendatang menyebabkan kebutuhan lahan untuk sumber mata pencaharian secara linier akan meningkat. TNLL di pandang oleh masyarakat dapat menyediakan lahan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Padahal secara normatif hukum, di kawasan konservasi dilarang dikelola tanpa izin.

Pergeseran dan asimilasi budaya ikut mendorong alih fungsi lahan. Misalnya antara budaya SAD dengan budaya luar (masyarakat desa) pada kasus TNBD. Telah terjadi pergeseran makanan pokok. Dahulunya SAD mengkonsumsi umbi-umbian yang dapat diperoleh dalam kawasan hutan, kini mengonsumsi beras yang hanya dapat diperoleh melalui proses jual beli. Bahkan SAD kini punya keinginan untuk memiliki handphone mupun sepeda motor. Kendati hal-hal tersebut melanggar pantangan-pantangan yang telah dibuat oleh pendahulu mereka.

Akibatnya, SAD memaksakan diri melompat dari budayanya secara ekstrim. Budayanya bergeser dari memungut hasil hutan menjadi masyarakat non agraris yang membutuhkan uang untuk membeli segala macam keinginan. Inilah yang lantas menjadi faktor banyaknya peralihan kawasan TNBD yang dimanfaatkan SAD menjadi milik masyarakat desa melalui proses jual beli bawah tangan maupun melalui sistem kontrak tanah.

Kontrak tanah dijadikan suatu cara bagi masyarakat diluar SAD untuk dapat memperoleh manfaat dari tanah yang berada dalam kawasan TNBD (Jailani, 2020). Dengan sistem ini petugas BTNBD menjadi kesulitan dalam melakukan tindakan penegakan hukum karena ketika akan dilakukan penegakan hukum

pihak yang mengontrak tanah akan menjadikan SAD sebagai pihak yang berada di barisan terdepan untuk menghadapi petugas (Wawan, 2020).

Di TNBD Mulyani (2014) menemukan, terdapat aktivitas-aktivitas Orang Rimba yang berlebihan dalam memanfaatkan ruang, terutama alih fungsi lahan menjadi kebun atau ladang. Hal tersebut membuat kondisi zona tradisional TNBD mengalami penurunan kualitas lingkungan. Aktivitas-aktivitas tersebut di antaranya adalah pembukaan lahan dengan luasan yang tidak proporsional dan jual beli lahan di dalam kawasan taman nasional dengan masyarakat luar.

Disisi lain aturan atau pedoman zonasi taman nasional sendiri secara substansi belum mengakomodasi hak-hak pemanfaatan SDA secara khusus untuk masyarakat adat baik pemanfaatan ruang maupun hayati berikut dengan bentuk pengendaliannya (Mulyani, 2014). Di TNBD, banyak program pemberdayaan dan bantuan sosial yang diberikan oleh negara terhadap SAD. Akibatnya, muncul kecemburuan sosial dari masyarakat desa sekitar. Masyarakat merasa tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah sehingga membuat masyarakat bersifat apatis terhadap persoalan-persoalan yang di hadapi oleh TNBD terkait dengan SAD (Suryadi, 2021).

Saefullah (2017) menemukan bahwa secara umum, tingkat modal sosial SAD termasuk kategori rendah dan cenderung mengarah ke minimum dengan tipe modal sosial yang mengikat (*bonding/exclusive*), hal ini disebabkan belum terpenuhinya aspek fisiologis atau kebutuhan dasar mereka. Tingkatan tersebut menunjukkan bahwa saat ini tingkat kepercayaan di antara sesama SAD rendah, norma dan nilai yang semakin longgar bahkan cenderung diabaikan, serta adanya batasan jaringan di dalam komunitas SAD.

Rendahnya tingkat modal sosial tersebut menjadi penghambat maksimalnya peran modal sosial dalam mencapai keberhasilan pemberdayaan ekonomi. Untuk itu dibutuhkan sebuah program pemberdayaan yang mampu menjawab kebutuhan percepatan perubahan kebudayaan dalam sistem mata pencaharian SAD yang sebelumnya adalah berburu dan meramu ke arah pertanian menetap yang diperbolehkan dalam ruang-ruang pengaturan kawasan hutan dan kawasan konservasi. Rendahnya modal sosial butuh perhatian khusus karena efektifitas pemberdayaan secara kelompok jika dilakukan diawal tidak akan menemukan hasil yang di harapkan. Stakeholder terkait butuh dilibatkan dalam satu program yang terintegrasi dengan program TNBD.

Keterbatasan lahan yang dapat dikelola masyarakat juga menjadi catatan penting. Lahan bagi sebagian besar masyarakat yang tinggal di sekitar taman nasional sangat dibutuhkan sebagai sumber mata pencarian, pengembangan usaha pertanian dan perkebunan. Pada akhirnya, ini menjadi tantangan yang cukup memeras tenaga, pikiran dan sumber daya pendanaan yang ada di taman nasional. Diperlukan usaha-usaha yang komprehensif dari seluruh pihak terkait untuk memaksimalkan pemanfaatan lahan, termasuk di areal APL yang memungkinkan dikelola.

Intensifikasi pertanian di lahan-lahan di luar kawasan menjadi sangat penting. Melalui intensifikasi lahan, diharapkan produktivitas lahan menjadi semakin meningkat dan meredam keinginan masyarakat merangsek masuk jauh ke dalam taman.

Di TNLL, Balai mencoba mengurai persoalan kebutuhan lahan dan penyelesaian konflik tenurial melalui pemberdayaan. Balai TNLL mendorong pembentukan Lembaga Pengelola Konservasi Desa (LPKD). Saat ini, Balai TNLL dalam tahap persiapan pembentukan kelompok LPKD di desa-desa yang berbatasan dengan kawasan.

Dalam pengembangan LPKD, Balai TNLL menggandeng program kerjasama pemerintahan Indonesia dan Jerman melalui proyek Forest Programme 3 (FP 3). Pemberdayaan LPKD juga melibatkan stakeholder

lain di luar kawasan TNLL seperti BPSKL Sulawesi, BPDAS Sulawesi Tengah dan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi tengah. Kerja ini di harapkan dapat memaksimalkan pemanfaatan lahan di luar kawasan hutan tepatnya APL agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat desa di sekitar TNLL. Dengan itu, tekanan ke kawasan TNLL secara perlahan-lahan akan semakin kecil.

Lain lagi yang dilakukan Balai TNBD. Dalam menyelesaikan persolan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan oleh SAD, Balai TNBD sedang dalam tahap penyiapan sebuah konsep implementasi teknis pemanfaatan yang memadupadankan kearifan lokal SAD dengan pengaturan hukum nasional melalui pendekatan pemanfaatan Tapak Keluarga dan Tapak Komunal SAD (Haidir, 2020).

Kedepannya akan ditentukan ruang sumber mata pencaharian untuk keluarga masing-masing SAD berdasarkan tata ruang adat yang dimiliki SAD. Ruang kelola mata pencarian keluarga ini diperuntukkan bagi pengembangan sumber mata pencaharian pokok, disebut dengan Tapak Keluarga. Untuk itu akan dilakukan pemberdayaan SAD agar mampu melakukan pemanfaatan ruang tapak keluarga untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga secara intensif dalam bingkai aturan di bidang kehutanan dan konservasi.

Tapak komunal merupakan ruang-ruang lain di luar ruang tapak keluarga yang disiapkan sebagai sumber mata pencaharian tambahan bagi SAD. Pemanfaatan ruang ini secara bersama seluruh anggota kelompok SAD dapat berupa hamparan pohon penghasil buah-buahan hutan, rotan, madu, dan lain-lain yang kepemilikannya bersifat komunal. Tapak keluarga dan tapak komunal terintegrasi kedalam zona pemanfaatan tradisional di TNBD.

Kemitraan konservasi juga menjadi salah satu pilihan penyelesaian konflik di TNBD. Terutama dilaksanakan pada wilayah-wilayah bekas kebun tua yang telah dikelola oleh masyarakat desa. Keberadaan kebun tua di dalam kawasan tentu tidak dapat dihilangkan begitu saja karena sudah ada sejak sebelum penetapan TNBD dilakukan.

Melalui pendekatan kemitraan konservasi, masyarakat desa yang memiliki kebun tua atau terlanjur berkebun dalam kawasan TNBD akan diberdayakan dalam bentuk kelompok Persatuan Desa Peladang (PDP). Kemudian akan dilakukan kerjasama dalam bentuk kemitraan konservasi untuk pemanfaatan yang sesuai dengan aturan tentang kehutanan dan kawasan konservasi. Berdasarkan identifikasi awal kebun-kebun ini telah terakomodir kedalam zona pemanfaatan tradisional di TNBD.

Laga Hak Dalam Objek Yang Sama

Pada suatu objek konflik, terdapat lebih dari satu hak. Misalnya di TNLL, masalah hadir ketika ada benturan hak antara Masyarakat Hukum Adat dengan Balai. Bagi masyarakat, jauh sebelum penetapan kawasan taman nasional, mereka sudah melakukan pengelolaan atas wilayah adatnya. Tapi kini, hal itu berlaga dengan kewenangan yang dimiliki Balai TNLL atas nama pengelola kawasan taman nasional.

Pada posisi tersebut, kedua belah pihak merasa bahwa mereka masing-masing memiliki hak atas kawasan yang disengketakan. Hadirnya 2 aturan dari otoritas yang berbeda pada kawasan TNLL menimbulkan pertentangan hak dalam pengelolaan.

Masing-masing pihak, dalam hal ini merasa paling memiliki legitimasi. Pada titik inilah komunikasi yang kalaboratif sulit terwujud. Terjadi gap yang harus dibicarakan. Hukum positif bicara tentang hitam putih,

bukti tertulis dan sebagainya. Sementara hukum berjalan lebih dinamis, bahkan sangat dinamis (Ado, 2020), sehingga dalam pelaksanaannya muncul pertanyaan tentang efektifitas dan konsistensinya.

Jurang pengetahuan antara pengaturan tata ruang adat dengan pengaturan zonasi taman nasional perlu disinkronkan. Untuk itu, diperlukan kerja-kerja kalaborasi antara komunitas adat dan taman nasional untuk mengidentifikasi dan mendiskusikan ruang-ruang perbedaan tersebut secara terus menerus.

Menariknya Balai TNLL lantas berpikir keras untuk mendorong kegiatan kolaboratif pasca revisi zonasi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengidentifikasi objek-objek persinggungan antara zonasi TNLL dengan tata ruang wilayah adat (*huaka*). Proses identifikasi dilakukan secara partisipatif dan melibatkan masyarakat. Menyamakan persepsi terhadap objek konflik merupakan sebuah syarat mutlak di awal resolusi konflik. Dukungan BPSKL Sulawesi melalui FP3 menjadi sebuah langkah maju dalam resolusi konflik ini.

Pada kasus di Habaring Hurung, dimana masyarakatnya merupakan perantau melalui program transmigrasi pada era orde baru, secara legal memiliki alas hak yang sah berupa sertifikat atas tanah pemukiman dan lahan usaha dari BPN. Sementara, penetapan kawasan TNS yang memasukkan wilayah lahan usaha dan sebagian area pemukiman ke dalam kawasan, tentu menjadi masalah tersendiri. Dalam konteks ini, kewenangan menjadi bertindih-tindihan antara KLHK maupun BPN pada objek yang sama.

Untuk itu, penting dilakukan pembicaraan yang lebih fokus mengurai persoalan-persoalan di lapangan di TNS. Para pihak mestinya tidak harus menunggu lagi, siapa yang harus mulai duluan. BPN dapat saja berinisiatif, atau bahkan Pemerintah Kota Palangka Raya sebab masyarakat yang bermukim di Habaring Hurung adalah warganya. Kendati perjalanan ke arah tersebut sudah dimulai, tapi fokusnya masih pada revisi zonasi TNS, belum mencerminkan kemauan pihak lain – di luar TNS – untuk sama-sama berkontribusi mengurai konflik yang ada.

Persoalan yang mirip terjadi di TNBD. Orang Rimba yang menjadi titik fokus pengembangan TNBD telah mempraktikkan tatanan hidup tradisional dengan mengumpulkan bahan alam dan meramu. Walaupun perkembangan memaksa Orang Rimba hidup dalam tekanan modernisasi, tapi tata cara penghidupan mereka masih banyak yang merujuk pada cara nenek moyang mereka memanfaatkan hasil alam.

Termasuk pula cara hidup yang semi nomaden, membuat Orang Rimba dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya dalam waktu yang berdekatan. Budaya *melangun*, berpindah akibat terjadinya wabah atau bencana, masih bertahan di beberapa *rombong*.

Sebagai catatan *rombong* adalah komunitas-komunitas kecil yang dikepalai oleh seorang *Temenggung*, atau pemimpin *rombong*. Biasanya, *rombong* terdiri dari keluarga-keluarga dekat yang memutuskan hidup dalam satu komunitas kecil yang solid. *Rombong* dapat terpecah bila terjadi pertentangan di internal mereka, tapi kebanyakan mereka terpisah karena hubungan kawin mawin dengan komunitas atau *rombong* lainnya.

Kebanyakan, komunitas *rombong* kini justru sudah banyak yang hidup menetap di desa. Tata cara hidup mereka-pun sudah mulai meninggalkan kebiasaan hidup lama yang mengumpulkan bahan alam dan meramu.

Di dalam kawasan taman nasional, komunitas *rombong* kadang tidak memiliki pemahaman utuh terhadap batas kawasan. Kondisi ini membuat Balai TNBD harus bekerja cukup ekstra menjaga kawasan agar tidak terjadi klaim sepihak oleh Orang Rimba. Jika ini terjadi, maka memungkinkan konflik lahan akan muncul. Dimana kewenangan Balai TN akan berbenturan dengan klaim wilayah hidup Orang Rimba.

Memperkecil Kesenjangan

Lagi dalam konteks ini, ada jurang pengetahuan dan pemahaman yang harus dikomunikasikan. Komunikasi, titik tolak kesuksesan dari resolusi konflik adalah komunikasi yang efektif antara semua pihak. Berdasarkan pengalaman lapangan petugas TNBD mengungkapkan komunikasi menjadi tantangan terbesar dalam berinteraksi dengan SAD.

Kerja bersama ini diharapkan akan memunculkan komunikasi yang semakin baik sehingga ego dari masing-masing pihak dari perasaan sebagai pihak yang paling berwenang dapat direduksi. Komunikasi yang baik juga akan membangun diskusi-diskusi tentang solusi bukan tentang siapa yang benar siapa yang salah.

Di TNLL, upaya ke arah kalaborasi dalam memperkecil jurang pengetahuan dan pemahaman ini sudah dimulai. TNLL melibatkan pihak lain sebagai pihak netral dalam penyelesaian kebuntuan resolusi konflik. Diharapkan ke depannya kerja multi pihak ini secara konsisten terus dilaksanakan dan melibatkan pihak-pihak lain yang juga berkepentingan misalnya pemerintah daerah dan pendamping masyarakat.

Terkait proses penegakan hukum, masalah pelik muncul ketika Polhut harus berhadap-hadapan langsung dengan aktor konflik tenurial di lapangan. Polhut yang terbiasa tegas dituntut untuk melakukan sosialisasi secara persuasif. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri karena selama ini para Polhut banyak dibenci oleh masyarakat yang pernah ditindak secara hukum, baik yang telah sampai pada proses pengadilan, maupun yang tertangkap tangan sedang melakukan pelanggaran hukum di lapangan, bahkan mereka yang tidak tertangkap tapi terganggu oleh keberadaan Polhut. Untuk itu, diperlukan strategi khusus dan secara perlahan merubah pandangan masyarakat terhadap Polhut yang selama ini dikenal galak dan tidak bisa kompromi.

Dalam upaya zonasi TNS, perubahan-perubahan kebijakan pemerintah kerap menjadi tantangan bagi pihak Balai TNS dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat di sekitar kawasan. Di Kelurahan Habaring Hurung, kebijakan pemerintah tentang perubahan zona yang terjadi beberapa kali membuat masyarakat merasa frustrasi terhadap pemerintah. Akibatnya, staf TNS di lapangan terkadang merasa tidak nyaman dan canggung bila berhadapan langsung dengan masyarakat. Seringkali upaya diskusi bersama para pihak menemui jalan buntu.

Polhut di Resot Habaring Hurung, Yunus, memilih strategi lain. Dia melakukan pendekatan kepada generasi muda di kampung. Alih-alih melakukan tindakan tegas, justru Yunus memilih mengajak pemuda pemudi di Habaring Hurung menggalakkan olah raga. Para pemuda diajak dan diajari bermain sepak bola dan bola voli. Tujuannya, agar Yunus dapat leluasa menyampaikan informasi sambil bermain di lapangan. Sementara rekan Yunus, Adi, melakukan strategi dengan masuk ke komunitas bapak-bapak yang mempunyai hobi sabung ayam. Strategi ini cukup efektif, karena dengan pendekatan ini, Polhut kembali diterima dengan baik.

Bagian 9. Pungkas

Saluran Peraturan

Konflik Tenurial Hutan adalah berbagai bentuk perselisihan atau pertentangan klaim penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan penggunaan kawasan hutan. Pada awalnya konflik harus dilihat sebagai solusi, maka apabila kemudian solusi yang lain dianggap perlu untuk diketengahkan setelah konflik berkembang tak terkendali, ketika itulah hadir konsep "resolusi konflik".

Terdapat berbagai pilihan cara dalam resolusi konflik yaitu konsultasi, negosiasi, mediasi, rekonsiliasi, dan pendapat ahli, pilihan cara ini dapat di implementasikan secara kombinasi sehingga dalam resolusi konflik tidak adat istilah kaku dan baku dalam pemilihan cara penyelesaian, melainkan harus disesuaikan dengan perkembangan situasi yang dihadapi.

Di wilayah Taman Nasional, setidaknya ada ruang regulasi yang terbuka untuk menyelesaikan konflik lahan; kemitraan konservasi dan revisi zona kawasan konservasi. namun hal itu tentu tidak dapat berdiri sendiri.

Di TNLL dan di TNBD kedua solusi ini jika tidak boleh disebutkan telah diimplementasikan, tapi sekurang-kurangnya pada saat ini telah dalam tahap proses implementasi melalui program revisi zonasi TNLL tahun 2018, dan TNBD tahun 2019. Ada pula tahap persiapan kemitraan konservasi melalui LPKD di TNLL dan melalui PDP di TNBD. Namun tidak dapat dipungkiri tantangan penyelesaian konflik tenurial di kedua kawasan ini tetap ada.

Balai TNLL dihadapkan pada tantangan pemenuhan kebutuhan lahan untuk sumber mata pencaharian masyarakat desa di sekitarnya. Ada pula *gap* antara kewenangan menurut hukum adat yang di pegang oleh masyarakat hukum adatnya dengan kewenangan Balai TNLL menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Lain halnya dengan TNBD, selain dari tantangan soal kebutuhan lahan untuk sumber mata pencaharian masyarakat sekitar kawasan TNBD, terdapat persoalan mendasar tentang *gap* kebudayaan yang mempengaruhi sistem sosial dan sistem mata pencaharian SAD dengan kebudayaan masyarakat sekitarnya. Hal ini berdampak kepada kerentanan terhadap kerusakan dan peralihan fungsi lahan di kawasan TNBD termasuk peralihan illegal kepemilikan lahan di kawasan TNBD.

Upaya rezonasi TNS menjadi prioritas dalam upaya resolusi konflik dengan melibatkan semua pihak. Beberapa kali telah dilakukan diskusi dan peninjauan tapal batas bersama para pihak. Meskipun proses yang sedang berjalan masih menemui kendala dan tantangan di lapangan, namun dengan proses ini semakin memperjelas siapa saja sebenarnya aktor konflik dan kepentingannya, dan siapa pula oknum-oknum yang memanfaatkan momentum ini demi keuntungan pribadi.

Di TNBD, Pemerintah Daerah Sarolangun melalui Kecamatan Air Hitam telah berkontribusi dalam memenuhi hak sipil SAD. Dengan terdaftarnya SAD ke dalam sistem kependudukan, maka SAD telah dapat mengases kebutuhan dasar seperti bantuan sosial, layanan kesehatan, dan pendidikan. Sehingga secara tidak langsung juga berperan dalam mengurangi tekanan terhadap TNBD.

Ruang regulasi lain yang masih menunggu proses penelaahan adalah kerjasama antara para pihak dengan Balai Taman Nasional. TNLL misalnya, telah membuka jalan itu lewat kerjasama dan dukungan antar Direktorat. Seterusnya, bagaimana inisiatif-inisiatif ini dapat diformulasikan ke dalam bentuk kerjasama

antar pihak di internal pemerintah seperti yang terjadi di TNLL. Harapannya, kerjasama antar direktorat dapat meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat yang hidup di seputar kawasan taman nasional.

Saluran Kerjasama Antar Pihak

Komunikasi yang baik merupakan titik awal dan tujuan akhir untuk penyelesaian konflik tenurial. Pengalaman lapangan menunjukkan komunikasi baik sebagai poin penentu dalam interaksi untuk memecah kebuntuan penyelesaian konflik tenurial di taman nasional. Misalnya, Sekolah Alam di Toro yang diinisiasi oleh Said, dan Budidaya Anggrek kelompok Anggrek Vuri di desa Karunia, efektif memainkan peran untuk mentransfer kecintaan kepada lingkungan sehingga menggerakkan inisiatif untuk melindungi kawasan hutan khususnya TNLL.

Di TNLL penerapan hukum adat atas pelanggaran terhadap kawasan konservasi yang berhimpitan dengan wilayah adat lebih di kedepankan dibandingkan penerapan hukum positif. Pada prinsipnya masyarakat adat tetap di lindungi dan mempunyai hak untuk mengelolah sumber daya hutan di TNLL, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diakui keberadaannya (Abdullah, 2015).

Fakta lapangan membuktikan bahwa masyarakat hukum adat di sekitar TNLL masih memiliki keleluasan menerapkan hukum adatnya atas pelanggaran-pelanggaran pada wilayah adatnya. Penerapan hukum adat lebih dinamis, hukum acara dalam peradilan adat berdasarkan kearifan lokal sangat kental dengan nuansa kekeluargaan. Musyawarah untuk mufakat adalah model beracaranya. Model beracara inilah yang disebut sebagai resolusi konflik. Dengan diakomodirnya penerapan hukum adat atas pelanggaran-pelanggran yang terjadi dalam kawasan hutan, hal ini telah berkontribusi cukup banyak dalam menurunkan tensi konflik antara masyarakat adat dengan TNLL.

Andreas (2020) mengungkap, mulanya masyarakat adat Toro sangat terintimidasi atas keberadaan TNLL lantaran petugas Balai TNLL selalu menggunakan pendekatan hukum positif. Namun sekarang, ada upaya lebih maju dengan lebih mendahulukan penerapan hukum adat Toro atas pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dalam kawasan TNLL. Hebatnya lagi, pada sidang-sidang adat terkait dengan itu, Balai TNLL selalu mengirimkan petugasnya untuk mengikuti jalannya sidang dan tidak melakukan intervensi terhadap segala keputusan adat yang diambil. Masyarakat adat Toro sangat mengapresiasi hal tersebut, dengan ini masyarakat hukum adat merasa dihargai dan merasa menjadi tuan di tanah sendiri.

Kondisi ini sebenarnya selain berdampak kepada penurunan eskalasi konflik, juga berdampak kepada turunya beban kerja petugas Balai TNLL dalam melakukan penegakan hukum atas pelanggaran pelanggaran minor di lapangan. Hal ini memungkinkan dalam mengurangi gesekan lapangan antara petugas dengan masyarakat sekitar.

Selain itu, sebagian komunitas adat yang berada di Lore Lindu juga aktif melakukan penjagaan atas wilayah adatnya dari ancaman pengambilan kayu dan perburuan binatang yang tidak sesuai dengan aturan adat. Pada titik ini, *Tondo Ngata* telah menjadi garda terdepan masyarakat adat dalam melakukan penjagaan wilayah adat. Di desa Toro, *Tondo Ngata* secara rutin dan sukarela tetap melakukan penjagaan wilayah adat walau dengan beragam keterbatasannya.

Peran resot Air Hitam di TNBD, tidak melulu bekerja soal penjagaan kawasan. Tapi lebih jauh berperan dalam interaksi humanis dengan SAD. Hal ini telah mendorong terciptanya keterikatan emosional

antara SAD dan TNBD. Ini adalah menjadi modal besar dalam sinergi pemanfaatan kawasan TNBD oleh SAD sesuai dengan mandat dan tujuan penetapan TNBD itu sendiri.

Balai TNBD sebagai pemangku kawasan telah menghormati penerpan hukum adat SAD dalam kawasan TNBD. Sampai-sampai petugas TNBD pun tidak luput dari subjek yang dikenakan sanksi adat. Sudah tidak terhitung lagi sudah berapa orang dan berapa kali petugas TNBD yang diberikan sanksi adat berupa denda kain atas pelanggaran hukum adat SAD di kawasan TNBD (Wawan, 2020).

Langkah yang lebih maju dalam mengakomodir penerpan hukum adat ini dilakukan TNBD pada revisi zonasi tahun 2019. Di tahun itu, TNBD menerbitkan dokumen Zonasi / Tata Ruang Adat Pengelolaan Taman Nasional Bukit Duabelas Provinsi Jambi. Di dalamnya telah memuat padanan zona-zona sesuai dengan peraturan zona dalam peraturan kehutanan dengan tata ruang adat sesuai dengan pengaturan hukum adat SAD/Orang Rimba (BTNBD, 2019). Tindak lanjut dari ini juga telah di tanda tangani kesepakatan dalam bentuk prasasti *Menyamokan Aturon Adat Urang Rimba/Suku Anak Dalam dengan Aturon Taman Nasional* (Menyamakan Aturan Adat Orang Rimba / Suku Anak Dalam dengan Aturan Taman Nasional).

Personil di Resot Habaring Hurung menyadari tantangan dalam sosialisasi rezonasi kawasan. Sadar bahwa komunikasi dengan masyarakat *golongan tua (bapak-bapak)* sangat sulit dilakukan, tidak menyurutkan semangat mereka untuk menemukan strategi di lapangan. Dimulai dari membuka kelas bahasa inggris gratis bagi anak-anak di Habaring Hurung, perlahan personil resot juga memberikan pengetahuan tentang pentingnya pelestarian alam kepada generasi muda.

Hal ini memberikan pengaruh positif kepada anak-anak dan ternyata cukup efektif, karena mereka menceritakan apa yang dipelajari untuk disampaikan kepada orangtuanya di rumah. kegiatan olah raga seperti yang disampaikan sebelumnya juga makin beragam jenis yang coba digalakkan. Kelompok ibu-ibu disasar untuk mengikuti kegiatan senam jasmani setiap akhir pekan. Pihak resot bahkan mendatangkan instruktur dari Palangka Raya, dengan imbalan hasil pertanian dari masyarakat setiap kali selesai berlatih senam. Perlahan upaya pendekatan seperti ini juga bisa masuk kepada golongan bapak-bapak meski dengan cara yang berbeda dan belum semua terlibat. Program yang disusun untuk golongan bapak-bapak di antaranya adalah budidaya ikan air tawar (lele, nila) dan ternak sapi.

Memang kerja resolusi konflik bukanlah kerja sekali jadi, kerja resolusi konflik adalah kerja terus-menerus secara berkelanjutan, karena konflik berbicara soal manusia yang secara kodratnya terus berkembang dan berubah.

Rambu-Rambu

Ada tiga hal penting lainnya yang harus diperhatikan dalam menentukan/membagi zonasi, yaitu: jenis zona yang dibutuhkan, luas masing-masing zona, dan lokasi zona. Untuk merumuskan hal tersebut, pengkajian dan pemahaman terhadap sumber daya alam hayati dan ekosistem kawasan taman nasional dengan seluruh unsur yang ada di dalamnya mutlak diperlukan. Penetapan zonasi taman nasional tidak bersifat permanen serta dapat dilakukan penyesuaian dan perubahan sesuai dengan perkembangan dan kepentingan pengelolaan TN, kondisi potensi sumber daya alam dan ekosistemnya, serta kepentingan interaksi dengan masyarakat. Dimungkinkan setiap tiga tahun sekali dilakukan evaluasi terhadap perkembangan dan efektivitas zonasi (Moira Moeliono, 2010).

Berbasis perkembangan di lapangan, maka ditemukan delapan rambu-rambu yang harus diperhatikan Balai Taman Nasional dalam rangka revisi zonasi, berikut meresolusi konflik tenurial.

Pertama, bahwa rezonasi memang diperlukan sebagai upaya mengakomodir keterlanjuran pengelolaan yang telah dilakukan oleh pihak-pihak di luar taman nasional. Hal ini menjadi kenyataan yang tidak dapat dihindarkan. Keterlanjuran mungkin akan dapat dicegah di kemudian hari lewat upaya revisi zonasi. Pembatasan pengelolaan wilayah nasional bagi masyarakat yang telah terlanjur merangsek ke dalam kawasan menjadi penting. tapi pembatasan saja tidak cukup, hal ini perlu diiringi dengan upaya komunikasi yang terus-menerus.

Kedua, baiklah ada keterlanjuran, namun sejauh mana revisi zonasi tersebut selaras dengan tujuan-tujuan konservasi kawasan. Karena, penting juga memikirkan sejauh mana upaya-upaya berbasis keilmuan dan konservasi dapat diselaraskan dengan tujuan revisi zonasi. Hal ini penting agar fungsi taman nasional sebagai kawasan konservasi tetap dapat dipertahankan.

Ketiga, sejauh mana revisi zonasi mampu memberikan jalan keluar atau solusi atas konflik tenurial yang sedang berlangsung. Bahwa revisi bukan hanya diperlukan sebagai bentuk 'mundur selangkah' dari pengelolaan kawasan konservasi yang dilakukan Negara, tapi revisi adalah penetapan 'daya lenting' atas pengelolaan kawasan konservasi di masa depan. Revisi zonasi ibarat menarik anak panah pada busurnya, dengan zonasi yang tepat dan sesuai, diharapkan anak panah akan meluncur tepat sasaran.

Keempat, revisi zonasi merupakan suatu bentuk perlindungan hak masyarakat adat yang secara turun temurun telah bermukim dalam kawasan konservasi yang memang wajib dilindungi sebagaimana amanat konstitusi negara. Hutan bagi masyarakat adat merupakan identitas atau jati diri mereka selain itu hutan juga merupakan sumber mata pencaharian utamanya.

Kelima, revisi zonasi merupakan bagian dari upaya untuk memudahkan tugas-tugas pengelola (Balai taman nasional). Melalui proses ini, pengelola taman nasional dapat lebih mengarahkan dan memfokuskan sumber daya yang terbatas untuk menyelesaikan persoalan-persoalan penting.

Keenam, Balai Taman Nasional sepertinya masih terjebak pada tahapan revisi zonasi kawasan yang disesuaikan dengan nomenklatur mata anggaran. Karenanya, kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan tahapan tersebut belum begitu berkembang. Padahal, kegiatan-kegiatan yang dilakukan dapat membuka peluang terlibatnya masyarakat dalam revisi zonasi. Namun hal ini kemudian berdampak pada lamanya pengerjaan revisi zonasi dan jumlah ketersediaan dana yang mampu membiayai rangkaian kegiatan dimaksud.

Ketujuh, adanya kesenjangan aspirasi antara Pemernitah Desa dan para tokoh di level desa dengan masyarakat desa itu sendiri. Biasanya, aspirasi yang identifikasi dan dirangkum oleh Balai Taman Nasional terbatas pada aspirasi Perangkat Pemerintahan Desa dan para tokoh di level desa. Padahal, aspirasi tersebut belum tentu menjadi bagian dari aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Penjaringan aspirasi lebih banyak terjebak pada proses formal di level desa tanpa melibatkan pihak-pihak yang marginal. Dengan demikian, pendekatan inkulsif tidak dapat dihindarkan dalam konteks ini. hal ini sejalan dengan apa yang pernah diungkap Wiratno, *no one left behind*.

Kedelapan, adanya *Free Rider* dalam proses revisi zonasi taman nasional mesti mendapat perhatian khusus. Para *free rider* ini akan terus berupaya memanfaatkan proses revisi zonasi taman nasional untuk melancarkan kepentingannya. Misalnya, para *free rider* yang berkeinginan kuat melakukan jual-beli lahan di TNBD, maupun mereka yang melakukan klaim adat terhadap TNS.

Rambu-rambu tersebut penting menjadi bagian tidak terpisahkan dari strategi implementasi lapangan. Satu sisi, silang sengkabut memang harus diselesaikan. Tapi di sisi lain, silang sengkabut ini diharapkan tidak menimbulkan masalah prinsip yang baru.

Apa itu masalah prinsip? misalnya, tidak menciderai keterlibatan aktor-aktor utama seperti masyarakat lokal. Prinsip *free, prior and informed consent* (FPIC) atau Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) menjadi penting sebagai acuan di tahap permulaan. Untuk itu, dalam pelaksanaan revisi zonasi taman nasional, prinsip ini tidak mungkin dinegasikan.

Kecuali itu, revisi zonasi mestinya juga menjadi acuan awal atas kontribusi para pihak untuk konservasi kawasan hutan, utamanya taman nasional. Secara teknis, kontribusi ini tentu dipimpin oleh pemangku kawasan, namun hal itu dilakukan dengan masukan positif dari para pihak. Dalam konteks ini, *extended family* yang diurai oleh Dirjen KSDAE menemukan jalan.

Lampiran-Lampiran

I. Tentang USAID BIJAK

Bangun Indonesia Jaga Alam untuk Keberlanjutan terdengar seperti kalimat jargon. Ini seperti pula jargon-jargon lain semisal *hutan terjaga masyarakat sejahtera*, atau *selamatkan hutan demi anak cucu kita*. Tapi dengan kekayaan hutan tropis yang kaya dan beragam, Indonesia patut menganut jargon tersebut.

Lepas dari itu semua, *Bangun Indonesia Jaga Alam untuk Keberlanjutan* (BIJAK) sejatinya adalah judul sebuah program dari United States Agency for International Development (USAID). Uang yang dikumpulkan dari pajak orang Amerika, dikelola USAID dan dijadikan proram-proram pembangunan untuk negara-negara berkembang seperti Indonesia. Bagi Pemerintah Amerika Serikat, USAID telah menjadi agen pembangunan internasional yang kredibel. Ditambah lagi, USAID bekerja dengan lembaga-lembaga independen seperti Chemonics International.

Setidaknya 30 juta orang Indonesia bergantung langsung pada hutan negara, dan jutaan lainnya bergantung pada keanekaragaman hayati ekosistem untuk udara, tanah yang subur, air yang dapat diminum, dan pendapatan tetap. Kemakmuran ekonomi yang berkelanjutan bagi Indonesia dan mitra dagangnya terkait erat dengan konservasi ekosistem yang rapuh dan penting secara global ini (BIJAK, 2016).

I.1. Melestarikan Keanekaragaman Hayati dan Mengurangi Emisi

Bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia, USAID BIJAK, yang berarti 'bijaksana' dalam bahasa Indonesia, meningkatkan pengelolaan hutan dan kawasan konservasi Indonesia, memperkuat perlindungan hukum bagi satwa liar yang terancam dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Untuk mendukung konservasi keanekaragaman hayati, USAID BIJAK memfasilitasi koordinasi antara Pemerintah Indonesia dan organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat undang-undang, peraturan, serta perangkat dan sistem pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, BIJAK USAID berkoordinasi dengan mitra lokal untuk mengadaptasi pendekatan lokal yang inovatif untuk meningkatkan pengelolaan dan konservasi untuk digunakan di seluruh negeri.

I.2. Kegiatan Program

BIJAK memfasilitasi kolaborasi antara Pemerintah dan mitra lainnya untuk menyempurnakan peraturan perundang-undangan, serta perangkat dan sistem manajemen. Upaya BIJAK berfokus pada bidang-bidang masalah berikut:

1. Meningkatkan Pengelolaan Area Konservasi

Jaringan kawasan konservasi Indonesia mencakup 54 taman nasional dan mencakup 27 juta hektare - luas gabungan kira-kira seukuran Colorado. USAID BIJAK bekerja untuk meningkatkan dan melindungi jaringan ini dengan:

- I.1. Membantu mitra pemerintah mengawasi kawasan konservasi dengan menggunakan kebijakan dan peraturan berbasis data yang lebih efektif, termasuk kebijakan untuk mencegah perkebunan kelapa sawit dari perambahan secara ilegal ke taman nasional; dan
- I.2. Memperkuat rasa bangga dan tanggung jawab masyarakat Indonesia terhadap taman nasionalnya, sehingga mendorong permintaan untuk konservasi yang lebih baik.

2. Meningkatkan Pengelolaan Hutan

Tutupan hutan di wilayah yang dikelola pemerintah telah sangat menderita karena pengawasan, perencanaan dan pengelolaan yang tidak memadai. USAID BIJAK memperkuat kemampuan pemerintah untuk mengawasi hutan yang dikelola pemerintah, yang mencakup 64 persen lahan Indonesia, dengan cara:

- 2.1. Memperkuat upaya reformasi Indonesia dengan membantu Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) untuk lebih melestarikan ekosistem hutan yang rapuh sambil memenuhi tuntutan manusia yang terus meningkat atas hutan;
- 2.2. Memperluas penggunaan strategi pendanaan inovatif untuk membuat konservasi dan pembangunan rendah emisi lebih menarik bagi pengembang dan investor; dan
- 2.3. Melindungi kawasan hutan perawan yang masih utuh yang belum dikelola pemerintah.

3. Meningkatkan Perlindungan Spesies Kunci

Perdagangan satwa liar merusak keamanan, supremasi hukum dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hilangnya spesies ikonik mengurangi prospek Indonesia untuk pariwisata berbasis alam dan perikanan berkelanjutan. USAID BIJAK memerangi perdagangan satwa liar dengan:

- 3.1. Mendukung Pemerintah Indonesia dalam memperkuat komitmennya terhadap Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Terancam Punah, atau CITES;
- 3.2. Bekerja sama dengan mitra sektor publik dan swasta untuk mengganggu kegiatan perdagangan satwa liar di sektor transportasi domestik; dan
- 3.3. Mendukung kampanye untuk mengurangi permintaan domestik akan satwa liar dan produknya, termasuk hiu dan burung liar, seperti rangkong helm yang terancam punah.

2. Catatan dari Lapangan

2.1. Tata Zona Sebangau Rancak

Sebangau adalah salah satu taman nasional dengan keunikan yang tiada banding. Bersumber dari Statistik Taman Nasional Sebangau (TNS) tahun 2014, menyebut TNS merupakan taman nasional ke 49 yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. SK.423/ Menhut-II/ 2004 Tanggal 19 Oktober 2004. Secara administratif kawasan TNS terletak di 3 (tiga) wilayah Kabupaten/Kota, yaitu: Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah. Sebelum ditetapkan menjadi taman nasional, status kawasan hutan Sebangau adalah kawasan hutan produksi (HP) dan Hutan Produksi Konversi (HPK) yang dikelola oleh beberapa perusahaan HPH sekitar awal tahun 1970-an hingga pertengahan tahun 1990-an. Setelah perusahaan HPH berhenti beroperasi, kegiatan illegal logging marak terjadi.

Hal ini mengakibatkan fungsi hidrologis kawasan hutan Sebangau menjadi rusak dan fungsinya sebagai daerah resapan air (*water catchments area*) juga terganggu. Dampaknya apabila terjadi kekeringan pada musim kemarau akan mudah menyebabkan kebakaran. Tercatat di Kawasan Sebangau telah terjadi beberapa insiden kebakaran besar sebelum penunjukkan TNS, yaitu pada tahun 1992, 1994, 1997, 2002, 2009 dan 2014 (TNS, 2014).

Mengingat akan kerusakan dan potensi alam yang berada di kawasan Sebangau, World Wildlife Fund (WWF) mengusulkan Sungai Sebangau dan Sungai Katingan menjadi kawasan perlindungan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/ Kota dan Provinsi Kalteng pada pertemuan terbatas, tanggal 14 Desember 2002 (TNS, 2014).

Ditambahkan, di sekitar kawasan TNS terdapat 8 (delapan) Kecamatan dan 48 (empat puluh delapan) Desa. Kecamatan-kecamatan tersebut mayoritas masyarakatnya bermatapencaharian utama dari hasil perikanan dan pertanian berupa tanaman padi dan palawija. Desa-desa yang terletak di sepanjang tepi Sungai Kahayan dan Sungai Sebangau mayoritas merupakan desa nelayan, sedangkan desa-desa yang merupakan daerah transmigrasi mayoritas merupakan desa pertanian.

Jenis komoditi unggulan di desa pada umumnya adalah karet dan padi. Disamping itu ada komoditas lain yang dikembangkan oleh masyarakat seperti sengon, semangka, sawit, dan sayuran. Desa-desa yang dekat dengan Taman Nasional Sebangau ada bermata pencaharian perikanan tangkap dan menghasilkan ikan segar dan ikan kering (FIELD Foundation, 2015).

Laporan FIELD Foundation (2015) juga menyebut aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat yang masuk ke dalam TNS termasuk mencari burung menggunakan alat tangkap berupa getah kayu yang dipasang pada ranting kayu (*Nyambulut*). Jenis burung yang ditangkap oleh masyarakat adalah Cicak hijau (Burung Bakung). Masyarakat juga mencari ikan dengan cara memasang *buwu*, *rempa*, *banjur* dan jaring. Jenis ikan yang didapat seperti: gabus, tapah, kakapar, betok dan lele.

Transmigrasi dan Sengketa Zona

Data statistik TNS (2014) juga menyebut penduduk yang mendiami desa-desa disekitar TNS mayoritas adalah suku Dayak, selain itu terdapat pula suku Banjar dan Jawa yang merupakan pendatang. Di Kecamatan Sebangau, Katingan Hilir, Tasik Payawan, Kamipang, Katingan Hulu mayoritas etnis yang mendiami kawasan tersebut adalah suku dayak sedangkan di kecamatan Bukit Batu, Sebangau Kuala dan Mendawai mayoritasnya adalah suku Jawa dan Banjar.

Perpaduan suku dengan latar budaya berbeda tersebut dimungkinkan karena dilaksanakannya program transmigrasi. Secara umum, sebagian wilayah TNS telah menjadi tujuan transmigrasi selama beberapa dekade belakangan.

Penyelenggaraan transmigrasi di Indonesia berawal dari jaman kolonisasi, yaitu pada tahun 1905 ditandai dengan penempatan pertama sebanyak 155 Kepala Keluarga (KK) dari Kedu, Jawa Tengah ke Gedong Tataan Provinsi Lampung. Istilah transmigrasi sendiri pertama kali dikemukakan oleh Bung Karno pada tahun 1927 dalam harian Soeloeh Indonesia. Selanjutnya dalam Konferensi Ekonomi di Kaliurang Yogyakarta, bersamaan dengan Rapat Panitia Siasat Ekonomi tanggal 3 Februari 1946, Wakil Presiden Bung Hatta menyebutkan pentingnya transmigrasi untuk mendukung pembangunan industrialisasi di luar Jawa (Direktorat Bina Potensi Kawasan Transmigrasi, 2015).

Semenjak tahun 1986 telah dianjurkan pula rencana parit komunikasi dan drainase dengan jalan raya di samping dari Teluk Sebangau ke Kerang Benkirai dan Palangka Raya sejauh hanya 110 km tanpa menyeberang sungai-sungai besar, dengan membangun pelabuhan laut di Teluk Sebangau dan pelabuhan *coaster* di Kareng Bankirai yang dapat dilaksnaakan dalam jangka waktu lebih pendek. Daerah sebelah hilir dan sekitar Palangka Raya, mengandung potensi sumber daya alam luar biasa di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan dan energi (Sri-Edi Swasono & Masri Singarimbun, 1986).

Kedatangan gelombang transmigrasi ini telah membuka ruang kelola bagi masyarakat untuk memanfaatkan lingkungan sekitar daerah tujuan. Sementara, kebijakan penunjukkan TNS dilaksanakan tahun 2004. Kondisi yang demikian memicu berbagai persoalan di lapangan. Salah satunya adalah konflik dengan wilayah kelurahan Kelurahan Habaring Hurung, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya. Kelurahan ini merupakan kelurahan eks Program Transmigrasi Pengembangan Desa Potensial (Transbangdep) Tumbang Tahai, tahun 1992.

“Dulu saat pertama kali datang, kami tidak langsung bisa mengolah lahan. Disini lahan gambut, jadi rawan kebakaran kalau kemarau. Di musim hujan, kami terkena banjir,” ungkap warga eks transmigrasi, Suroto.

Masyarakat sangat kesulitan pada masa itu dalam mengolah lahan untuk bercocok tanam. Bantuan bibit tanaman dari pemerintah yang coba ditanam banyak yang tidak tumbuh. Sehingga keadaan ini membuat banyak keluarga tidak betah dan kembali ke pulau Jawa. Mereka yang kembali ke Jawa menjual lahan pekarangan dan lahan usaha jatah transmigrasi kepada keluarga yang masih bertahan di Habaring Hurung. Keluarga-keluarga transmigrasi yang masih bertahan hanya mengandalkan jatah bulanan program jaminan hidup (jadup), dari pemerintah melalui Kementerian Transmigrasi. Sebagian masyarakat yang lain juga mulai mencari pekerjaan alteratif untuk pemenuhan ekonomi keluarga. Banyak masyarakat yang masuk ke hutan untuk bekerja mencari hasil hutan seperti kulit kayu gemor, getah meranti, dan membuat arang (Suroto, 2020).

Mulanya, kelurahan Kelurahan Habaring Hurung adalah bagian dari Kelurahan Tumbang Tahai. Pada 2002, kedua kelurahan memisahkan diri berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 32 Tahun 2002. Di Habaring Hurung terdapat 2 Rukun Warga dengan 7 Rukun Tetangga, yang menempati wilayah seluas sekitar 7.344,12 Ha.

Seperti pada umumnya program transmigrasi, warga binaan transmigrasi menerima pembagian lahan 2 hektare yang terdiri atas lahan pekarangan seluas 0,25 ha, Lahan Usaha I seluas 0,75 ha, dan Lahan Usaha II seluas 1 ha. Pada 2001, setiap warga transmigrasi mendapatkan Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Pemerintah Kota Palangka Raya.

Setelah bertahun-tahun mendiami wilayah tersebut, sebut Suroto, masyarakat dihadapkan pada kenyataan bahwa sebagian wilayah kelurahan Habaring Hurung masuk ke dalam wilayah TNS. Berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor SK 529/Menhut-II/2012 terdapat area pencadangan transmigrasi yang masuk ke dalam Kawasan TNS seluas ± 766,20 Ha, yakni berupa fasilitas umum seperti area pemakaman, pekarangan dan pemukiman, serta Lahan Usaha I dan Lahan Usaha II.

Di level masyarakat, berkembang isu bahwa pihak Balai TNS mengklaim sepihak wilayah yang selama ini dianggap sebagai bagian dari kelurahan mereka. Terutama dalam penetapan zona pengelolaan taman. Menurut Suroto, penetapan zona ini berubah-ubah pada beberapa waktu, sehingga banyak masyarakat yang merasa dipermainkan.

Pihak Balai TNS sendiri mengungkapkan, lokasi pemukiman transmigrasi dan lahan usaha berada di Zona Khusus dan sebagian dari LU II berada di Zona Rimba. Sebagian besar LU II berada di HPK dengan tutupan lahan berupa semak, dan hutan rawa.

“Sebagian masyarakat kami membuat arang di wilayah yang bermasalah itu. Mereka sering terkena patroli penertiban yang dilakukan taman nasional. Tak jarang penertiban mengakibatkan bentrok antara masyarakat dan staf dari Balai TNS. Akibatnya, masyarakat merasa tersakiti. Masyarakat juga merasa dipermainkan dan betul-betul tidak diperhatikan oleh pemerintah,” adu Suroto.

Menteri Kehutanan melalui SK 423/Menhut-II/2004 menyatakan bahwa wilayah Habaring Hurung berada di dalam kawasan hutan. Kemudian pada SK Menteri Kehutanan No. 292/Menhut-II/2011, menyatakan Kelurahan Habaring Hurung tidak masuk di dalam kawasan TNS. Statusnya berubah dari kawasan hutan menjadi Area Penggunaan Lain (APL). Namun, berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor SK 529/Menhut-II/2012 wilayah Habaring Hurung kembali dinyatakan berada di dalam kawasan. Menurut Peta Indikatif TORA edisi revisi, lokasi transmigrasi Habaring Hurung ini sebagian masuk dalam peta indikatif, namun hingga akhir tahun 2011 belum dilakukan peninjauan oleh tim Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PTKH) (Ningsih, Wawancara, 2020).

Suroto menjelaskan, dalam persoalan lahan tersebut, tercium adanya indikasi permainan penguasaan lahan. Banyak kelompok yang terlibat, termasuk masyarakat asli yang mengklaim penguasaan ulayat yang luasnya melebihi lahan usaha transmigrasi.

“Kelompok-kelompok ini dikendalikan oleh oknum-oknum pejabat pada Pemerintahan Kota Palangka Raya. Oknum pejabat tersebut punya aset di wilayah ini, hasil jual beli dengan masyarakat setempat. Nah, karena itu, ada upaya untuk mengeluarkan aset tersebut dari kawasan TNS. Dalam hal ini, terjadi adu kepentingan antara orang asli, masyarakat eks transmigrasi, oknum pejabat dan Balai TNS,” ungkap Suroto.

Berbagai musyawarah lintas pihak pernah diinisiasi oleh pihak Kelurahan, Balai TNS, hingga Pemerintah Kota Palangka Raya bersama instansi terkait seperti BPN Kota Palangka Raya dan DPRD Kota Palangka Raya. Namun dengan segala kepentingan yang berkaitan didalam area tersebut, hingga saat ini belum ditemukan keputusan yang menguntungkan para pihak (Suroto, 2020).

Suroto mungkin hanya mewakili sebagian orang yang masih menginginkan kejelasan zonasi. Proses zonasi partisipatif tentunya tidak mungkin melibatkan semua orang. Balai TNS, sudah memulai zonasi partisipatif jauh-jauh hari.

Pada 15 Desember 2017, bertempat di Hotel Noe Palangka Raya, Balai TNS melakukan sosialisasi puncak terhadap zonasi TNS. Kegiatan tersebut dihadiri oleh SOPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah,

SOPD Pemerintah Kota Palangka Raya, SOPD Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, SOPD Pemerintah Kabupaten Katingan, UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan lingkup Provinsi Kalimantan Tengah, Mitra Kerja, Perguruan Tinggi dan Forum Masyarakat (Susana, Suyoko dan Hidayat Turrahman, 2017).

Seperti dilansir <http://ksdae.menlhk.go.id/>, serangkaian kegiatan sosialisasi zonasi TNS telah dilaksanakan sejak awal bulan Desember 2017. Zonasi disosialisasikan dari tingkat desa yang berbatasan dengan kawasan TNS di masing-masing wilayah administratif kabupaten dan kota hingga tingkat Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan sosialisasi zonasi dilaksanakan sebanyak enam kali di beberapa lokasi. Di antaranya di Desa Tumbang Bulan dan Desa Mekar Tani Kecamatan Mendawai serta Desa Baun Bango Kecamatan Kamipang yang merupakan bagian dari wilayah administratif Kabupaten Katingan. Kemudian dilaksanakan juga di Desa Sebangau Mulya Kecamatan Sebangau Kuala yang masuk ke dalam wilayah Kabupaten Pulang Pisau. Sedangkan di wilayah Kota Palangka Raya, sosialisasi zonasi dilaksanakan di Kelurahan Kereng Bangkirai.

Proses panjang penyusunan dokumen zonasi TNS hingga disahkannya melalui Surat Keputusan Dirjen KSDAE Nomor SK. 97/KSDAE.0/3/2016 Tentang Zonasi Taman Nasional Sebangau serta SK 261/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Dirjen KSDAE Nomor SK. 97/KSDAE.0/3/2016 Tentang Zonasi Taman Nasional Sebangau, Provinsi Kalimantan Tengah. Zonasi pada TN Sebangau terdiri dari ; 1). Zona Inti; 2). Zona Rimba; 3). Zona Pemanfaatan; 4). Zona Tradisional; 5). Zona Rehabilitasi; 6). Zona Religi, Budaya dan Sosial serta 7). Zona Khusus.

Sosialisasi zonasi yang telah dilaksanakan di tingkat desa dan kelurahan umumnya mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Terutama masyarakat yang sebagian besar bermatapencaharian sebagai nelayan yang ingin mengetahui batas kawasan taman nasional dengan kampung atau tempat tinggal mereka, agar ketika mereka beraktifitas tidak memasuki kawasan atau melakukan pelanggaran. Secara keseluruhan masyarakat menerima dengan baik sosialisasi zonasi, terlebih zonasi dalam TNS menyediakan ruang bagi masyarakat yang diakomodir dalam zona tradisional dan zona pemanfaatan, namun tetap mengutamakan kaidah konservasi demi kelestarian alam.

Kegiatan sosialisasi zonasi dilaksanakan sebagai bentuk keterbukaan informasi pengelolaan TNS. Selain itu merupakan ajang menyampaikan informasi pada masyarakat terutama yang berbatasan dengan kawasan dan beraktifitas disekitar kawasan TNS. Pada kesempatan ini Balai TNS juga menyerahkan Peta Zonasi kepada masing-masing Kepala Desa atau Kelurahan. Semoga dengan tersosialisasikannya zonasi TNS dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, pemerintah daerah dan stakeholder terkait (Susana, Suyoko dan Hidayat Turrahman, 2017).

Kendati demikian, proses ini tentunya masih menyisakan pekerjaan rumah yang cukup runyam. Tipis kemungkinan untuk memuaskan semua orang tentunya. Tapi setidaknya, proses di lapangan telah melibatkan berbagai perwakilan pihak-pihak.

Ekowisata Rawa

Pekerja media mongabay.co.id, Junaidi Hanafiah melakukan perjalanan menembus rawa-rawa di TNS pada Juli 2018. Bila anda berkunjung ke Palangka Raya, Kalimantan Tengah, tulisnya, sempatkanlah melihat rawa gambut Sebangau. Sensasi menelusuri rawa gambut ini akan makin terasa bila anda menyewa perahu mesin atau yang biasa disebut *kelotok* dari dermaga Kereng Bangkirai.

Di kiri kanan Sungai Sebangau, akan terlihat rasau (*Pandan helicopus*) atau sejenis pandan yang biasa tegak di tepian sungai atau danau kawasan rawa gambut. Selain itu, perahu mesin tak jarang harus dikurangi kecepatannya saat lintasan sungai menyempit akibat tertutupi tumbuhan ini (Hanafiah, 2018).

Sepenggal kisah tersebut memberikan gambaran umum tentang bagaimana perjalanan menembus sungai Sebangau. Kawasan rawa yang kaya sumber daya alam ini menjadi andalan utama bagi TNS menarik minat wisatawan.

Keelokan TNS bahkan buncah di mancanegara. Raja dan Ratu Belanda, Willem Alexander dan Maxima Zorreguieta Cerruti beserta rombongan berencana mengunjungi Sebangau pada 12 Maret 2020. Namun kecelakaan perahu cepat, senin, 9 Maret 2020, membuat rencana kunjungan ini dibatalkan. Indonesia berduka karena kehilangan orang-orang terbaik, termasuk duka mendalam di jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Keadaan TNS kini tentu berbeda dengan keadaan lampau. Dulunya, kawasan ini adalah lokasi pembalakan yang melibatkan banyak pihak, termasuk masyarakat.

Pada dekade tahun 90'an, di kawasan Sebangau masih banyak beroperasi perusahaan dengan ijin Hak Pemanfaatan Hutan (HPH). Sebelum tren HPH muncul, Kelurahan Kereng Bangkirai merupakan sebuah kampung kecil yang mayoritas masyarakatnya adalah nelayan tradisional (Yulianty, 2020).

Kehidupan sebagai nelayan tradisional membuat masyarakat memiliki pengalaman yang cukup untuk menjalankan usaha perikanan. Pada November 2013, WWF mengeluarkan laporan akhir tentang Studi Penilaian Kebutuhan Pengembangan Kapasitas Bagi Kelompok Mata Pencaharian Berkelanjutan Program Pengembangan Sosial Dan Ekonomi Sebangau, Kalimantan Tengah. Laporan ini menarik sebagai salah satu rujukan dalam melihat perkembangan kehidupan sosial ekonomi di desa-desa di seputar TNS.

Laporan tersebut menyatakan, sebagian besar kelompok usaha yang telah terbangun sudah berhenti proses produksi rutinnya karena kendala kurangnya permintaan pasar. Potensi perikanan desa pada wilayah layanan sangat menjanjikan, baik budidaya kolam atau keramba/jaring apung. Perlu dilakukan analisis yang lebih rinci untuk mengetahui keseimbangan antara kapasitas produksi dengan kebutuhan pasar (*balance of supply and demand*) sehingga kelompok-kelompok usaha tersebut mempunyai rencana yang lebih realistis dalam kegiatan produksinya.

Hampir semua penerima manfaat/*beneficiaries* merasa senang dan mendapatkan manfaat dari sarana yang telah dibangun sehingga mereka menggunakannya, namun karena pendampingan yang kurang intensif menimbulkan kesan bahwa bantuan yang diterima hanya hibah biasa. Perlahan-lahan telah terjadi pergeseran pola pengelolaan aset, sarana/prasarana kelompok menjadi usaha perseorangan (WWF, 2013).

Merujuk laporan tersebut, beberapa kasus dimana kegiatan kelompok yang sedang berjalan ditemukan berbagai hambatan/kendala yang membutuhkan pembenahan secara insentif. Sistem kerja pengembangan produk yang tidak ada standar menyebabkan kelompok usaha kesulitan untuk menyesuaikan dengan spesifikasi/kebutuhan konsumen. Terdapat pula kendala transportasi yang berbiaya tinggi dan berdampak langsung terhadap harga pemasaran yang kurang kompetitif. Kondisi dimana kurangnya pendampingan teknis di lapangan menjadi penyebab utama kesulitan kelompok dalam mengembangkan usahanya ketika membutuhkan nasihat yang memadai, bahkan ada kelompok-kelompok usaha yang sudah menghentikan proses produksinya.

Hampir tujuh tahun pasca WWF mengeluarkan laporan, di Kelurahan Kereng Bangkirai kini sudah berjalan kelompok ekowisata. Saat ini sudah terbentuk kelompok Nelayan Tradisional dan Kelompok Getek yang didampingi langsung oleh SPTN Wilayah I Balai TNS. Hampir seluruh masyarakat yang tergabung di dua kelompok ini dahulu berprofesi sebagai *illegal logger*.

Jumadi adalah ketua Kelompok Getek. Dulunya dia pelaku pembalakan liar. Kegiatan pembalakan yang dilakukan Jumadi semata-mata untuk mengisi perut. Sumber pendapatan masyarakat di wilayahnya adalah hutan, baik untuk diambil kayunya, maupun dari jenis bukan kayu.

“Dulu saya menentang keberadaan taman nasional,” ungkapnya.

Bagi Jumadi, keberadaan taman nasional justru hanya akan menghambat usaha ekonomi yang dilakukan masyarakat. Keberadaan taman nasional dia khawatirkan akan menjadi sumber persoalan baru di Sebangau.

Apa yang dikhawatirkan Jumadi terbukti. Dia mengeluhkan soal kelakuan personil Balai TNS yang melakukan penegakan hukum. Menurutnya, pihak Balai TNS terus berupaya melarang masyarakat masuk mengambil apapun di wilayah taman nasional.

“Pihak taman nasional dulu tahunya hanya penegakan hukum dan melarang. Tanpa solusi,” tandas Jumadi.

Keluhan Jumadi secara tak langsung didengar pihak Balai TNS. Pendekatan lain kemudian mulai ditempuh.

Hal ini membuat penyuluh dari SPTN wilayah I melakukan pendekatan khusus untuk proses resolusi konflik. Upaya penegakan hukum yang dilakukan selama ini dirasakan semakin membuat jarak antara Balai TNS dengan masyarakat di Kereng Bengkirai (Jumadi, 2020).

Tim SPTN wilayah I merubah pola di lapangan dengan melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan Balai TNS. Hal ini dimulai dengan menyewa perahu getek milik masyarakat untuk setiap aktifitas patroli kawasan. Perlahan kemudian Balai TNS mendorong terbentuknya Masyarakat Mitra Polhut (MMP) untuk kegiatan patroli bersama.

Upaya ini dirasa sangat efektif oleh pihak Balai TNS dalam memperbaiki hubungan dengan masyarakat di Kereng Bengkirai. Perlahan persepsi masyarakat mulai berubah terhadap keberadaan taman nasional. Selain pelibatan masyarakat di berbagai program konservasi, Balai TNS juga secara berkala melakukan sosialisasi dan diskusi terkait pentingnya kolaborasi dalam pengelolaan kawasan dan penguatan ekonomi masyarakat. Secara perlahan masyarakat mulai terbantu dari segi ekonomi, pemahaman masyarakat terhadap konservasi di kawasan Sebangau juga semakin tinggi (Yulianty, 2020).

Dari proses panjang yang dibangun oleh Balai TNS bersama masyarakat, didoronglah program pemberdayaan masyarakat di sektor ekowisata. Hal ini tentu dengan melihat potensi besar untuk pengembangan ekowisata.

Saat ini sudah terbentuk satu Kelompok Getek dan satu Kelompok Nelayan Tradisional dibawah bimbingan SPTN Wilayah I Balai TNS. Pada dua kelompok ini terdiri masyarakat Kelurahan Kereng Bengkirai baik bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda dan pemudi.

Kawasan TN Sebangau menyuguhkan panorama alam menakjubkan bagi penikmat wisata alam, wisata minat khusus, dan selain itu juga wilayah TNS merupakan lokasi penelitian gambut yang dikelola oleh Center for International Cooperation on Sustainable Management of Tropical Peatlands (CIMTROP) sejak tahun 1998. Wilayah ini diklaim sebagai pusat penelitian gambut terbesar di dunia (Jeti, 2020).

Untuk menikmati wisata minat khusus, wisatawan akan diantar oleh perahu getek milik kelompok untuk menikmati susur sungai di jalur Sungai Rokan. Setelah itu wisatawan bisa melakukan *trekking* sembari menikmati keindahan flora fauna endemik, jika beruntung bisa melihat orang utan secara langsung.

TNS merupakan rumah bagi 808 jenis flora, 35 jenis mamalia, 182 jenis burung, dan 54 spesies ular. Bagi wisatawan yang mempunyai hobi memancing, di TNS terdapat beberapa lokasi memancing terbaik. TNS merupakan habitat ikan jenis kerandang, toman, dan haruan (gabus), selain itu juga banyak terdapat udang air tawar. Wisatawan bisa mengikuti aktifitas Kelompok Nelayan Tradisional untuk menikmati wisata memancing ini. Bahkan jika wisatawan ingin bermalam, telah dibangun oleh pihak Balai TNS beberapa pondok/pos patroli yang bisa difungsikan sebagai tempat menginap. Jadi jika ingin memancing ikan selama beberapa hari, wisatawan tidak perlu lagi khawatir.

Dermaga Kereng Bengkirai merupakan pintu gerbang untuk masuk ke kawasan TNS, disini terdapat wisata kuliner dan wahana air dengan menyewa perahu bebek serta café terapung. Dinas Pariwisata Kota Palangka Raya juga turut berperan dalam mendukung program wisata dermaga Kereng Bengkirai, dengan membangun kembali dermaga dan fasilitas seperti *food court*, tribun penonton arena dayung, *spot* foto, dan panggung kesenian. Upaya ini diakui masyarakat sangat membantu perekonomian seiring meningkatnya jumlah wisatawan yang datang ke Kereng Bengkirai.

2.2. Berbagi Relung Lore Lindu

Pada 2001, masyarakat dari empat desa yakni Kamarora B, Rahmat, Kadidia, dan Kamarora A mulai masuk ke Dongi-Dongi yang saat itu menjadi bagian dari Taman Nasional Lore Lindu. Masyarakat keempat desa tersebut merupakan masyarakat Suku Kaili Daa Pegunungan Kamalisi dan Orang dari dataran tinggi Kulawi yang direlokasi oleh pemerintah melalui Departemen Sosial pada tahun 1970-an. Pemerintah memukimkan mereka di tanah penuh tekanan yang hanya seluas 0,7 Ha dan berbatasan langsung dengan TNLL (Dhika, 2016).

Dhika melanjutkan, masyarakat pindah untuk bertani, demi kelanjutan kehidupan keluarga dan anak-anak. Di tahun awal, mereka menderita karena pertanian belum menghasilkan, masyarakat menghidupi keluarga dari mencari rotan dan damar. Selama sekitar 15 tahun, Dongi-Dongi kemudian dilepaskan menjadi *enclave* di Taman Nasional Lore Lindu pada 2014.

Walaupun pada tahun 2014 Dongi-Dongi telah di lepaskan dari TNLL menjadi APL, namun tekanan masyarakat dari keempat desa tersebut di bagian Timur laut TNLL masih terus terjadi sampai dengan saat ini. Sementara itu sebagian besar desa-desa yang berbatasan dengan TNLL menganggap bahwa lepasnya Dongi-Dongi dari TNLL merupakan sebuah keberhasilan masyarakat Dongi-Dongi dan menjadi motivasi bagi mereka untuk juga memperoleh hak atas tanahnya yang semestinya juga di berikan kepada masyarakat-masyarakat desa lain yang berbatasan dengan TNLL, yang juga masuk dan mengelola tanah di dalam kawasan TNLL (Abal, 2020).

Dirjen KSDAE KLHK, Ir. Wiratno, M.Sc menyambangi masyarakat Dusun Dongi-Dongi pada Jumat, 2 Agustus 2019. Kedatangan itu sekaligus menjadi ajang dialog terbuka bagi kedua pihak.

“Masyarakat Dongi-Dongi mulai sekarang saya anggap saudara, sesama saudara kita harus bekerjasama” ujar Wiratno.

Akhir dari dialog disepakati beberapa butir hasil rumusan bersama, yakni: 1) BBTNLL bersama masyarakat Dongi-Dongi berkomitmen untuk membangun wilayah Dongi-Dongi dan mendukung pengelolaan TNLL secara kolaboratif; 2) BBTNLL bersama masyarakat Dongi-Dongi melalui FPM bersepakat melestarikan kawasan hutan TNLL dan melakukan penutupan/penghentian aktivitas

pertambahan di sekitar wilayah Dongi-Dongi; 3) Dirjen KSDAE dan BBTNLL bersama FPM bersepakat mengakomodir wilayah Dongi-Dongi menjadi Zona Khusus dan Zona Tradisional seluas 5.640 ha sesuai peta partisipatif yang dibuat oleh FPM; 4) Dirjen KSDAE dan BBTNLL bersama FPM mendukung dan mengawal proses usulan penetapan Dusun Dongi-Dongi menjadi Desa Definitif Katuvua Dongi-Dongi seluas 1.531 ha dimana 200 ha berada di Kabupaten Sigi dan 1.331 ha berada di Kabupaten Poso, sedangkan 5.640 ha sebagai wilayah kelola dari masyarakat di luar batas desa usulan dikelola dengan skema Kemitraan Konservasi dengan mendorong percepatan penetapan zona tradisional menjadi wilayah kemitraan konservasi sesuai Perdirjen No. 6 Tahun 2018; 5) Kemitraan Konservasi yang akan dibangun meliputi pengembangan wisata Danau Tauji, wisata minat khusus Ex- PETI, pemberdayaan kelompok perempuan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (damar, rotan, anggrek) dan pemulihan ekosistem berupa tanaman dengan jenis tanaman enau, kemiri, damar dan durian (Balai Besar TNLL, 2019).

Zona Kelola Lore Lindu

Mungkin bagi sebagian pihak, pelepasan menjadi dusun *enclave* itu adalah sebuah kemenangan. Namun banyak pihak menilai, pelepasan itu justru menjadi boomerang bagi pemerintah. Ini menimbulkan preseden negatif, bahwa negara dengan mudah menetapkan status *enclave*. Hal senada disampaikan Tokoh Masyarakat Desa Toro, Andreas.

Masyarakat kemudian beramai-ramai mengusulkan penetapan hutan adat. Maksudnya, supaya negara – melalui Pemerintah – mau melepaskan kawasan hutan untuk dikelola sebagai hutan hak. Tapi ini tentu tidak mudah. Proses panjang harus ditempuh, apa lagi Hutan Adat kini sudah menjadi salah satu mekanisme dalam lingkup Perhutanan Sosial (Andreas, Wawancara Lapangan, 2020)

“Karena itu, penting duduk bersama antar para pihak. Termasuk masyarakat, Balai TNLL serta jajaran pemerintah di level kabupaten dan provinsi. Hasilnya tentu diserahkan pada mekanisme aturan yang telah ada. Rezonansi partisipatif TNLL dapat menjadi salah satu pilihan, selain hutan adat,” ungkapnya.

Masyarakat yang bermukim di sekitar TNLL memandang penting sumberdaya hutan di wilayah TNLL. Penilaian masyarakat terhadap hutan bervariasi yang bergantung pada manfaat hutan dalam memenuhi kebutuhan mereka. Menurut Massiri, dkk (2016), di TNLL motivasi atas dasar kebutuhan tersebut tidak hanya dari kebutuhan material yang tinggi, tetapi juga memiliki motivasi sosial yang tinggi dan bahkan motivasi moral yang sangat tinggi. Namun kebutuhan mereka ini terkadang tidak sejalan dengan kegunaan hutan yang ditetapkan oleh negara, di titik inilah konflik tenurial itu terjadi.

Dibagian tengah TNLL terdapat kecamatan Lindu yang terdiri dari lima desa yaitu Desa Puroo, Langko, Tomado, Anca dan Olu. Kelimanya berada di tepi danau Lindu yang cukup terkenal akan keindahannya. Wilayah Kecamatan ini merupakan satu kesatuan wilayah masyarakat hukum adat yaitu Masyarakat Adat Ngata Lindu. Dari kelima desa tersebut empat desa merupakan desa asli Masyarakat Hukum Adat Lindu, satu desa lainnya yaitu desa Olu, masyarakatnya merupakan masyarakat pendatang dari wilayah selatan (Sulawesi selatan) dan wilayahnya dahulu merupakan wilayah adat desa Tomado (Nurdin, Wawancara, 2020).

“Konflik tenurial yang terjadi di daerah ini adalah pertentangan pengelolaan secara adat, khususnya pada wilayah yang menurut hukum adat merupakan *pangale*, yaitu bekas kebun-kebun yang saat ini belum perlu di kelola. *Pangale* berada dalam kawasan TNLL,” ungkap Nurdin.

Walaupun dalam tingkat eskalasi yang rendah, konflik tenurial secara horizontal juga terjadi antara masyarakat asli (masyarakat hukum adat Lindu) khususnya masyarakat desa Tomado dengan masyarakat pendatang di Desa Olu. Hal ini di sebabkan oleh semakin sempitnya wilayah-wilayah yang dapat dikelola

oleh masyarakat Desa Tomado di sisi Barat Danau Lindu dan habisnya wilayah adat di sisi timur Danau Lindu dikelola oleh masyarakat Desa Olu (Nurdin, Wawancara, 2020).

Di bagian selatan TNLL, di Kecamatan Kulawi Selatan juga terjadi konflik tenurial, yaitu pertentangan antara klaim pengelolaan berdasarkan hukum adat dengan pengelolaan menurut hukum negara pada kawasan konservasi. Desa Toro contohnya merupakan desa yang masyarakatnya merupakan komunitas masyarakat hukum adat *Ngata Toro*, yang secara turun temurun memiliki kearifan lokal dalam pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian wilayah adat, merasa terbatasi dengan pengelolaan kawasan konservasi oleh Balai Besar TNLL (Andreas, Wawancara Lapangan, 2020).

Menurut Andreas persoalan mendasar adalah kurangnya konsultasi dan diskusi tentang sinergi pengelolaan menurut adat dengan pengelolaan yang diperbolehkan menurut hukum negara di kawasan TNLL. Lebih lanjut Andreas mengatakan bahwa sebenarnya di wilayah *Wana* dan *Wana Ngkiki* menurut hukum adat merupakan kawasan yang dilindungi. Jika wilayah tersebut memang berada dalam zona rimba dan zona inti TNLL sebenarnya sudah *clear* dan tidak jadi soal.

Persoalan banyak terjadi di kawasan *Oma*, *pangale* dan lain-lain yang berupa kebun. Menurut masyarakat hukum adat, wilayah ini boleh di buka dan di kelola. Sementara menurut TNLL, wilayah tersebut berada dalam kawasan TNLL dan tidak boleh dikelola masyarakat. “Disitulah terdapat masalahnya,” ungkap Andreas.

Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) menyebut, wilayah adat Ngata Toro terdiri dari beberapa peruntukan. *Wana Ngkiki*, merupakan kawasan hutan primer di puncak gunung yang sebagiannya didominasi oleh rerumputan, lumut dan perdu. Kawasan ini dianggap amat penting sebagai sumber udara segar (*winara*), dan tidak boleh dijamah aktivitas manusia. Dalam kawasan Wana Ngkiki ini tidak terdapat hak.

Wana, merupakan hutan primer, berada di bagian bawah (secara topografi) *Wana ngkiki* yang merupakan habitat hewan dan tumbuhan langka, dan sebagai kawasan tangkapan air. Karena itu, di area ini dilarang membuka lahan pertanian karena bisa menimbulkan bencana alam. *Wana* hanya boleh dimanfaatkan untuk kegiatan berburu dan mengambil getah damar, bahan wewangian dan obat-obatan, serta rotan. Kepemilikan pribadi (*Dodoha*) di dalam kawasan ini hanya berlaku pada pohon damar yang penentuannya tergantung pada siapa yang pertama kali mengolahnya. Sementara sumber daya alam yang selebihnya merupakan hak penguasaan kolektif sebagai bagian ruang hidup dan wilayah kelola tradisional masyarakat (*Huaka*).

Pahawa pongko, merupakan campuran hutan semi-primer dan sekunder merupakan hutan bekas kebun yang telah ditinggalkan selama sekitar 25 tahun atau lebih sehingga sudah menyerupai *pangale*. Pohonnya sudah besar, jadi untuk menebangnya sudah harus menggunakan *pongko* (pijakan yang terbuat dari kayu) yang cukup tinggi agar dapat menebangnya dengan mudah. Penebangan pada tempat yang agak tinggi ini dimaksudkan agar tunggulnya bisa bertunas kembali (karena itu disebut *pahawa* yang berarti pengganti). Seperti halnya *pangale*, kawasan ini juga tidak tercakup dalam hak pemilikan pribadi terkecuali pohon damar.

Oma, merupakan hutan belukar yang terbentuk dari bekas kebun yang sengaja dibiarkan untuk diolah lagi dalam jangka waktu tertentu menurut masa rotasi dalam sistem perladangan bergilir. Oleh karena itu, pada kategori ini sudah melekat hak kepemilikan pribadi (*Dodoha*) dan tidak berlaku lagi kepemilikan kolektif (*Huaka*) karena lahan ini merupakan areal yang dipersiapkan untuk diolah lagi menurut urutan pergilirannya.

Urutan pergiliran ini membentuk tiga kategori Oma terdiri dari, pertama, *Oma ntua*, apabila lahan ini dibiarkan selama 16 hingga 25 tahun, mengingat usianya, jenis ini sudah tua sehingga tingkat kesuburan tanahnya sudah pulih dan dapat diolah. Kedua, *Oma ngura*, yaitu kategori yang lebih muda karena dibiarkan selama 3 hingga 15 tahun. Lahan ini didominasi rerumputan dan belukar. Pohon-pohon yang tumbuh masih kecil sehingga masih bisa ditebas memakai parang tanpa banyak kesulitan. Ketiga, *Oma nguku* adalah bekas kebun belum sampai 3 tahun ditinggalkan. Lahan ini masih di dominasi oleh rerumputan, ilalang dan semak perdu.

Balingkea, yakni bekas kebun yang sudah berkurang kesuburannya dan sudah harus di istirahatkan. Meskipun begitu, lahan ini masih bisa diolah untuk tanaman palawija seperti jagung, ubi kayu, kacang-kacangan, cabe, dan sayuran. *Balingkea* sudah termasuk hak kepemilikan pribadi (*Dodoha*).

Terakhir, *Pangale*, yaitu kawasan hutan semi-primer yang dulu sudah pernah diolah menjadi kebun namun telah ditinggalkan selama puluhan tahun sehingga telah menghutan kembali. Kawasan ini dalam jangka panjang dipersiapkan untuk lahan kebun, sedangkan datarannya untuk dijadikan sawah. *Pangale* juga dimanfaatkan untuk mengambil rotan dan kayu untuk bahan rumah dan keperluan rumah tangga, pandan hutan untuk membuat tikar dan bakul, bahan obat-obatan, getah damar dan wewangian (BRWA, 2012).

Berdasarkan observasi lapangan, kebutuhan material atas ruang-ruang dan sumber daya alam yang berada dalam TNLL sangat di pengaruhi oleh komoditi yang mendatangkan keuntungan ekonomis bagi masyarakat. Di TNLL bagian tengah dan selatan contohnya, selain kebutuhan kayu, tekanan perluasan kebun kakao yang menjadi komoditi unggulan di sekitar kawasan TNLL memiliki peranan yang besar dalam memengaruhi keinginan masyarakat. Sedangkan di timur laut TNLL, tambang emas menjadi salah satu faktor pemicu yang mengancam keberadaan TNLL.

Zonasi TNLL adalah upaya menata kawasan ke dalam zona pengelolaan sesuai peruntukannya dan pengendalian terhadap pemanfaatannya. Zonasi didasarkan hasil inventarisasi potensi kawasan, pertimbangkan prioritas pengelolaan kawasan, kondisi sosial ekonomi di sekitarnya. Pendekatan dalam penentuan zona menggabungkan tehnik spasial, FGD (*Focus Group Discussion*) baik di tingkat internal pengelola, bersama stakeholder, dan pembahasan di tingkat pusat (BBTNLL, 2018).

Sekolah Alam Toro

Bagaimana menuju rumah Said?

Dia berada di Desa Toro, kata kepala seksi di TNLL, Marcel. Staf TNLL, Feri Padli mengantarkan untuk bertemu Said. Perjalanan dengan Feri pada pagi hari, 8 Desember 2020 melambungkan banyak pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan bagai menggantung, berputar dan berkicau-kicau. Terbayang bagaimana 10 ekor burung sempit berputar-putar menjatuhkan tiap pertanyaan.

Perjalanan menuju Toro mengingatkan akan perjalanan yang ditempuh Hazen Audel. Dia adalah presenter TV, ahli biologi, seniman dan pengrajin pemandu sejarah alam. Dia sukses sebagai presenter pada serial *Survive the Tribe* yang disiarkan National Geographic. Dia juga mendokumentasikan *Primal Survivor*, kisah-kisah petualangannya tinggal bersama dan bekerja bersama penduduk asli di daerah terpencil di dunia.

Berikut bayangan tentang naturalis asal inggris yang juga pernah berdiam di Sulawesi, Alfred Russel Wallace. Berabad lalu, Wallace telah mengidentifikasi bahwa ada keunikan flora dan fauna di Sulawesi. Mereka berbeda dengan hewan yang dapat dijumpai di Jawa, Sumatra dan Kalimantan. Tetapi mereka juga tidak sama dengan hewan yang dapat di jumpai di Papua dan Australia. Anoa contohnya kerbau mungil

nan gesit yang bisa memanjat rapuhnya bebatuan bukit di dalam TNLL. Wallace juga menceritakan tentang babi rusa Si Buruk Rupa.

Babi Rusa menjadi buruk sedemikian rupa mungkin disebabkan karena kerasnya tekanan alam Sulawesi Tengah yang dilalui oleh beberapa patahan. Patahan ini salah satunya adalah patahan Palu Koro, yang 2 tahun lalu menggeliat dan meluluh lantakkan Teluk Palu dari Pesisir Donggala sampai ke pedalaman Sigi.

Feri tersenyum sepanjang perjalanan menuju Toro. Dia menggambarkan secara jelas dan ringkas tentang interaksi yang terbangun antara TNLL dan Masyarakat hukum adat Toro.

Menurut Feri, komunikasi satu kata yang jamak di dengar di ruang-ruang pelatihan resolusi konflik menjadi suatu kata yang rumit dilaksanakan di lapangan. Berdasarkan kearifan lokalnya, masyarakat Toro pada hakekatnya selalu menjaga kelestarian hutan. Di wilayah Wana dan Wana ngkiki, haram bagi komunitas ini untuk mengambil sumber dayanya. Hal ini sejalan dengan zonasi TNLL, dimana Wana dan Wana ngkiki Toro berada pada zona rimba dan zona inti.

Perbedaan persepsi itu memang ada, aku Marcel. Di situlah pentingnya komunikasi tersebut tetap di jaga dan di jalankan.

Kepala Balai TNLL, Jusman menyambut pengakuan Marcel. Dalam sebuah diskusi sebelumnya, Jusman mengatakan jangan takut dengan konflik.

“Karena konflik adalah pintu silaturahmi, jika tidak ada konflik mana mungkin kita dapat bertemu. Maka kedepankanlah komunikasi yang baik agar konflik dapat dijadikan upaya kalaboratif para pihak,” tandas Jusman.

Perjalanan ke Toro berseling dengan santapan kuliner yang sedap. Menjelang siang, sajian ikan mas berkuah bening menemani perjalanan Feri. Di sebuah tikungan usai itu, kendaraan yang ditumpangi Feri berhenti sejenak. Pamandangan di depan layak mendapat perhatian, sawah membentang berpetak-petak di dampingi oleh kebun kakao dan jagung. Lorong-lorong perumahan warga tampak membelah jalan utama dengan sesekali Gereja Kriten Bala Keselamatan hadir di pojok kampung.

Said belum juga bertemu. Dia tinggal di ujung kampung.

Mobil berhenti di ujung jalan memutar di sudut terkahir kampung di Desa Toro. Desa itu bagai disekap oleh kungkungan pemandangan bukit. Jejeran bukit bagai penjaga alam Toro dari berbagai bahaya. Di antara bebukitan, air jernih mengalir tanpa putus, menjadi pelipur dahaga dan memenuhi kebutuhan warga. Di ujung kampung, tak lagi ada jalan untuk kendaraan yang tersisa, Feri harus menempuh perjalanan kaki menyeberangi titian. Beberapa meter dari ujung titian, dua unit bangunan dari kayu telah menanti. Masyarakat menyebut bangunan itu dengan sebutan *Lobo*, balai adat, tempat dilaksanakannya sidang adat di sekitar Lore Lindu. Di bangunan itu Said menanti.

Said berperawakan kecil. Di pinggangnya tersampir parang. Dia mengajak langsung menuju pondok terbuat dari bambu.

“Inilah pondok anggrek saya, baru saya bangun, ingin saya penuh dengan berbagai jenis anggrek yang ada di sekitaran Desa Toro ini,” ungkap Said.

Penerima penghargaan Kalpataru ini sama sekali tak terlihat seperti petualang *Hanze Audel*. Dia berkisah panjang tentang Sekolah Alam.

Said merupakan bekas ketua *Tondo Ngata* yaitu sekelompok orang dari masyarakat Toro yang memiliki tugas melakukan pengamanan pada setiap jengkal wilayah adatnya. Tugas itu dia lakukan secara sukarela, tidak ada yang namanya insentif, apalagi gaji. Kesadaran akan pentingnya alam menjadi satu-satunya alasan bagi Said mengemban tugas tersebut.

3 tahun lalu Said pensiun sebagai anggota *Tondo Ngata*. Tapi dia tak surut melakukan patroli rutin. Menurutnya, patroli dilakukan untuk menjaga kawasan hutan agar tidak dirusak. Dia ingin memastikan agar kawasan hutan di sekitar Desa Toro tetap terjaga dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

“Saya prihatin terhadap generasi penerus Toro. Mereka sudah mulai tidak memerhatikan alam,” ungkap Said.

Dalam keyakinannya, Said beranggapan bahwa alam akan menghukum siapa saja yang tidak sopan. Dari sekolah alam ini dia berharap anak-anak yang belajar dapat berbaur dengan alam dan merasa memiliki alam.

“Rasa memiliki itu akan tumbuh menjadi cinta. Rasa cinta inilah sebagai satu motivasi yang ampuh bagi manusia untuk selalu menjaga alam,” katanya.

Hari ini, lanjut Said, anak-anak tidak sekolah karena Sekolah Alam sedang libur. Sejauh ini, anak-anak senang berkegiatan di Sekolah Alam.

Kendati dihancurkan gempa pada 2018, Rumah Said dibangun kembali berikutan dengan Sekolah Alam. Dia masih bersedih karena piala Kalpataru miliknya ikut hancur tertimpa bangunan. Tapi Said tetap bersemangat, karena di sini, pelajaran tentang pentingnya alam dan lingkungan akan tetap dia ajarkan. Dia berharap agar generasi Toro kembali pada cita-cita luhur mempertahankan alam sekitarnya.

Kelompok Anggrek Vuri

Di belahan utara TNLL, Sardin (35) bergiat membudidayakan anggrek di rumahnya, di Desa Karunia Kecamatan Palolo, Sigi. Kendati mudah ditemui di dalam hutan, Sardin berpandangan jika terus menerus diambil, maka anggrek akan habis. Karena itu, budidaya menjadi penting. Menurutnya, membudidayakan anggrek harus dengan rasa cinta.

Anggrek merupakan tanaman rambat yang telah menjadi ikon Sulawesi Tengah. Anggrek hidup menempel pada tanaman pohon lain, bunga ini bukanlah parasit karena bunga ini mampu hidup secara mandiri tidak ketergantungan pada tanaman yang di tumpanginya. Peneliti Univ Tadulako, Palu, Sri Ningsih mengatakan, TNLL memiliki sekitar 100 jenis tanaman anggrek. Dari sekitar 100 jenis anggrek tersebut, ada beberapa di antaranya yang endemik di TNLL. Ia mengatakan masih banyak lagi tanaman anggrek yang ada di dalam kawasan itu yang hingga kini belum diteliti dan bahkan belum diberi nama (Masa, 20218).

“Di hutan memang masih banyak, tapi kalau diambil terus kan bisa punah. Saat ini, untuk mendapatkan anggrek musti berjalan lebih jauh ke dalam hutan, padahal dulu sebelum tahun 2004 masih banyak terdapat di pinggiran kampung. Jenisnyapun bermacam-macam. Anggrek yang diambil langsung dari hutan tidak akan bertahan lama jika tidak ditangani dengan baik. Setiap jenis anggrek punya karakter tersendiri dan punya media tanam tersendiri tidak bisa sembarang tanam,” papar Sardin.

Di khawatirkan anggrek yang diambil langsung dari hutan hanya bertahan beberapa hari, lalu mati. Pada saat itu, tentu anggrek akan diambil lagi.

“Disitulah kelangkaan terjadi. Lama-lama punah,” tandasnya.

Sejak 2004 hingga 2010, Sardin mengaku sangat kesulitan untuk menerangkan pentingnya budidaya anggrek kepada masyarakat sekitar. Menurutnya, masyarakat belum banyak yang memahami betapa berharganya anggrek.

Untuk itu, Sardin merangkul Sekolah Menengah Atas (SMA) 6 Sigi. Dia mengintroduksi keterampilan budidaya anggrek menjadi salah satu mata pelajaran muatan lokal. Gayung bersambut pihak sekolah menyetujui usulan Sardin. Dia diangkat menjadi guru lepas untuk mata pelajaran tersebut.

Alumni SMA 6 Sigi yang pernah belajar budidaya anggrek dengan Sardin banyak yang terlibat membudidayakan anggrek. Mereka membudidayakan di rumah masing-masing. Ini menyebabkan efek yang baik. Kini masyarakat mulai sadar pentingnya anggrek sebagai salah satu penggerak ekonomi rumah tangga.

“Saya lihat banyak lokasi budidaya anggrek, terutama karena alumni SMA 6 tinggal menyebar di kecamatan Palolo. Kaum ibu mulai secara sukarela untuk melakukan budidaya. Karena itu, saya mendirikan Kelompok Anggrek Vuri. Tugasnya mensupervisi para pembudidaya lain di Sigi,” paparnya.

Secara tidak langsung, Sardin sesungguhnya tengah berupaya menjaga alam TNLL. Melalui anggrek, dia menyebarkan kecintaan akan hutan.

Menurut Sardin, anggrek bukan sekedar bunga yang indah di pandang mata, anggrek merupakan tanaman yang dapat dijadikan indikator untuk melihat tutupan hutan.

“Kan anggrek menempel di pohon. Kalau pohon tidak ada, maka anggrek pasti juga tidak ada,” katanya.

Selain itu, anggrek berkebutuhan pencahayaan yang berbeda. Tiap jenis memerlukan pencahayaan matahari yang relatif tidak sama. Ada yang memerlukan 70% cahaya, ada juga yang hanya butuh 50 % cahaya.

“Artinya tanaman ini butuh tutupan hutan yang baik untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Jika hutan terbuka dan cahaya masuk lebih dari 70 % maka dapat dipastikan anggrek tidak akan bisa hidup,” tandasnya.

2.3. Dilema Orang Rimba Bukit Duabelas

Pada 23 Agustus 2000, Menteri Kehutanan dan Perkebunan, Nur Mahmudi Ismail menandatangani surat nomor 285/Kpts-II/2000 tentang Kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD) seluas 60.500 ha. Menariknya, penunjukkan taman nasional ini dimandatkan sebagai ruang penghidupan bagi Orang Rimba.

Orang Rimba dikenal juga dengan sebutan Suku Anak Dalam (SAD), atau Orang Kubu. Ketiga bentuk penyebutan ini tentunya berbasis pada pandangan ‘orang luar’ terhadap komunitas masyarakat yang masih hidup semi-nomaden ini. Disebut sebagai Orang Rimba, merujuk pada pengistilahan yang sering di gunakan oleh Organisasi Masyarakat Sipil yang berkerja di sekitaran TNBD. Sementara, Suku Anak Dalam merujuk pada istilah yang seiring digunakan oleh instansi pemerintah khususnya oleh Kementerian Sosial dan Daerah Tertinggal. Dan istilah yang jamak adalah Kubu, merujuk pada penyebutan komunitas melayu yang maknanya cenderung diskriminatif. Istilah Kubu juga sesungguhnya sudah digunakan lebih dari seabad lampau ketika Orang Eropa menyebut dalam ragam catatan mereka.

Sesungguhnya, bagi komunitas semi-nomaden ini, penyebutan tidak menjadi masalah besar. Justru kadang 'orang luar' yang cenderung memberikan pemaknaan berlebihan.

Mulanya, Orang Kubu hidup di bagian timur Provinsi Palembang (Sumatra Selatan), di sebelah utara Jambi. Mereka hidup di tanah alluvial Sungai Batang Hari dan dibatasi oleh Sungai Musi. Wilayah hidup mereka terpotong berbentuk segitiga dimana bagian lebarnya menghadap ke laut (pantai timur Sumatra), dan ujung bagian barat langsung berada di lereng perbukitan Sumatra bagian tengah (Hagen, 1908).

Hagen menyebut, wilayah orang Kubu di hulu berbatasan langsung dengan Tembesi dan anak-anak sungainya, dan di Rawas dengan anak sungai Rupit yang mengalir ke arah sungai Musi. Secara keseluruhan, Orang Kubu menempati wilayah rawa yang cukup luas sekitar 30 hingga 40 ribu kilometer persegi, berikutan dengan zona pantai yang tidak bisa dihuni karena selalu ada banjir. Jaringan air (sungai) tersebar halus di area ini. Mereka juga hidup di Sungai Batang Tungkai, Batang Lalan, dan anak sungai Sungai Bahar.

Hagen juga menukil pendapat para penulis sebelum dia; Boers, van Hasselt, dan Valette. Mereka beranggapan bahwa Orang Kubu adalah penduduk tertua di Sumatra. Pendapat ini sepenuhnya sesuai dengan tradisi Rakyat Rawas – dimana penduduk aslinya adalah Kubu – yang tak terjadi pembatasan wilayah ketika berbaur dengan orang-orang berbahasa Jawa dari Majapahit dan para imigran Rawas yang berasal dari Minangkabau, sementara ada pula desakan dari Rejang, daerah Musi dan perbatasan Jambi.

Boers mengatakan, kata Hagen, satu-satunya petunjuk ialah saat penakluk dari Jawa menetap di Palembang (Sumatra Selatan). Mungkin mereka (Orang Kubu) melarikan diri dan menjalani kehidupan yang tidak stabil dan menyedihkan. Secara bertahap, Orang Kubu kehilangan standar hidup sehingga keadaan mereka menjadi merosot.

Sementara Hasselt percaya, mereka mungkin adalah keturunan orang-orang yang kini (masa itu) adalah penganut Hindu. Tapi tidak dapat dipastikan dari mana mereka berasal. Cara hidup nomaden membuktikan perkembangan mereka yang bersifat pemalu (Hagen, 1908).

Valette, lanjut Hagen, juga mencurigai pengaruh Hindu dan belakangan Muhammadanisme (Islam) telah menggeser adat istiadat dan kebiasaan umum yang berlaku pada Orang Kubu. Karena itu, Orang Kubu menarik diri ke Sungai Musi dan Batanghari. Semakin jauh populasi mereka menyebar, maka semakin jauh mereka mudur ke dalam hutan-hutan dan membuat diri mereka terpendam. Oleh karenanya, Orang Kubu hanya ditemukan di sebagian Sumatra. Valette bahkan meramalkan ras Kubu akan segera punah, atau larut dalam sisa populasinya, terutama karena penduduk sudah semakin banyak di bagian (perbukitan) di sebelah barat.

Winter-Rookemaaker, lanjut Hagen, berasumsi bahwa aslinya orang Kubu adalah pelarian dari kerajaan-kerajaan di Jambi dan Palembang. Kubu tertekan selama berabad-abad dari pengaruh luar kerajaan-kerajaan ini, sehingga mereka melarikan diri ke pedalaman hutan untuk melepaskan diri dari pengaruh budaya luar tersebut. Dengan (pelarian) itu, Kubu semakin sulit dijangkau dan terbebas dari perbudakan.

Riset terbaru tentang Orang Kubu atau Orang Rimba dilakukan Adi Prasetijo (2015). Menurutnya sebagian besar Orang Rimba hidup di Provinsi Jambi, Riau dan Sumatra Selatan. Jambi dianggap sebagai tempat populasi Orang Rimba yang terbesar di Sumatra. Orang Rimba yang tinggal di Jambi tersebar di tiga wilayah ekologi yang berbeda; (1) kawasan hutan dataran rendah yang mengelilingi Taman Nasional Bukit Duabelas, (2) wilayah selatan Provinsi Jambi yang terletak di kawasan sekitar jalan raya yang membelah Provinsi Jambi hingga Provinsi Sumatra Selatan, Daerah Provinsi Sumatra Barat dengan Jambi dan Sumatra Selatan dan (3) wilayah utara sekitar Taman Nasional Bukit Tigapuluh, yakni wilayah

perbatasan antara provinsi Jambi dan Riau. Setiap kelompok Orang Rimba yang tinggal di daerah tersebut memiliki karakter ekologi yang berbeda dan gaya hidup yang sangat bergantung pada karakteristik wilayah dimana mereka berada.

Kehidupan Orang Rimba sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial politik, baik di tingkat lokal maupun nasional. Sejarah mereka dan keberadaannya sebagai kelompok etnis minoritas dipengaruhi oleh dinamika politik lokal dan nasional. Pada dasarnya kehidupan mereka tidak banyak berubah antara masa kesultanan Islam dan penjajahan Hindia Belanda, dan kemudian berlanjut ke masa kemerdekaan selama era Soeharto (Orde Baru) sampai dengan era Reformasi saat ini (Prasetijo, 2015).

Prasetijo melanjutkan, Taman Nasional Bukit Duabelas merupakan pusat geografis terbesar dimana konsentrasi Orang Rimba tinggal di lanskap tersebut. Ini berbeda dengan kondisi Orang Rimba di selatan Provinsi Jambi tempat mereka tinggal di tempat terpisah.

Berlatar keinginan pemerintah Kabupaten untuk menjadikan kawasan hutan Bukit Duabelas sebagai kawasan lindung dan Cagar Biosfir, pada 7 Februari 1984, Bupati Sarolangun Bangko menandatangani surat usulan bernomor 522/182/1984. Dalam surat bupati, dicantumkan bahwa cagar biosfir dimaksudkan sebagai tempat hidup bagi Orang Rimba yang sejauh ini telah tinggal di wilayah itu.

Kepala Sub Balai Perlindungan dan Pelesterian Alam (PPA) Jambi lantas bersurat kepada Menteri Kehutanan. Pada 25 April 1984, surat usulan bernomor 522.52/863/84 dilayangkan ke Jakarta. Intinya, Pemerintah Jambi mendukung usulan agar kawasan Bukit Duabelas dijadikan cagar Biosfir seluas 28.707 ha.

Pemerintah Jambi beralasan bahwa, kawasan tersebut merupakan habitat berbagai satwa liar dilindungi yang semakin terdesak habitatnya. Selain itu, kawasan hutan Bukit Duabelas dihuni oleh sekitar 900 jiwa Orang Rimba (Suku Anak Dalam) yang kehidupannya sangat tergantung pada hutan Bukit Duabelas. Lalu, topografi pengunungan Bukit Duabelas agak curam dengan kelerengan 0-20% dan jenis tanah podsolik yang sangat peka terhadap erosi. Pegunungan Bukit Duabelas juga merupakan hulu-hulu suagai yang termasuk dalam sub DAS Batang Tembesi dan Batang Tabir yang bermuara di DAS Batanghari. Sehingga untuk kepentingan tata air perlu dipertahankan. Selanjutnya, kehidupan masyarakat Orang Rimba dan kekayaan keanekaragaman hayati merupakan potensi yang bagus bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian kebudayaan (TNBD, 2017).

KKI Warsi bekerja di wilayah itu sejak 1997. Berbagai kajian dan pendampingan bagi komunitas Orang Rimba dilakukan. KKI warsi lantas merekomendasikan agar areal PT Inhutani V dan PT Sumber Hutan Lestari yang terletak di sisi luar bagian utara Cagar Biosfer masuk sebagai kawasan hidup Orang Rimba. Rekomendasi ini ditangkap Menteri Kehutanan dan Perkebunan sebagai peluang, sehingga membentuk tim terpadu kajian mikro di kawasan Bukit Duabelas.

Upaya meningkatkan status kawasan ini berlangsung terus menerus. KKI Warsi getol melakukan dialog dan menyampaikan hasil kajian kepada pemerintah. Puncaknya adalah pada 23 Agustus 2000, Menteri Kehutanan dan Perkebunan, Nur Mahmudi Ismail menandatangani surat nomor 285/Kpts-II/2000 tentang Kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD) seluas 60.500 ha. Dalam surat ini, Menhutbun juga menegaskan bahwa Taman Nasional Bukit Duabelas merupakan tempat hidup bagi Orang Rimba.

Secara normatif, dengan mandat yang seperti itu, sudah seharusnya konflik tenurial antara SAD dengan Pemangku kawasan TNBD (BNTBD) tidak terjadi. Namun pada kenyataannya konflik itu tetap terjadi. Hal ini disebabkan oleh adanya *gap* antara pengelolaan wilayah yang dilakukan oleh SAD dengan pengelolaan menurut hukum negara untuk kawasan konservasi.

Orang Rimba mempersepsikan dirinya sebagai (1) orang yang tinggal di hutan; (2) memiliki pola hidup yang sesuai dengan lingkungan hutan, seperti hanya memakai cawat untuk laki-laki dan kemben (kain dada) untuk wanita; (3) hidup nomaden, tidak menetap; (4) percaya agama yang diajarkan oleh nenek moyang mereka; (5) memiliki model mata pencaharian yang sesuai dengan lingkungan hutan, seperti berburu, mengumpulkan dan membudidayakan; dan (6) mengkonsumsi semua makanan yang tersedia di hutan (Prasetijo, 2015).

Orang Rimba, lanjut Prasetijo, juga menganut pantangan. Pantangan berfungsi untuk pelindung keteraturan antara Orang Rimba dengan Orang Terang atau orang di luar komunitas mereka. Di sisi lain, pantangan juga berfungsi sebagai pembatas antara etnis mereka dan Orang Terang. Pantangan-pantangan itu terkait dengan makanan dan tempat tinggal.

Makanan berfungsi sebagai tanda kehidupan Orang Rimba yang sesungguhnya sesuai dengan kehidupan mereka di hutan dan menjaganya dari pengaruh dan kontaminasi dunia 'luar'. Makan terlarang bagi Orang Rimba termasuk memakan hewan peliharaan – seperti peliharaan kebanyakan orang Melayu atau 'orang luar' –, misalnya ayam, telur, kambing, sapi dan susu. Makanan seperti itu melambangkan kehidupan dan dunia Orang Terang (Prasetijo, 2015).

Seiring perkembangan waktu, Orang Rimba juga berubah. Kebudayaan mereka yang mulanya berburu dan meramu, kini mulai ditambah dengan perubahan sistem mata pencarian. Interaksi yang cukup kuat antara mereka dengan orang luar mengakibatkan sistem mata pencarian juga berkembang seiring waktu. Bahkan Orang Rimba kini juga sudah banyak yang memiliki kebun. Termasuk pula kedatangan teknologi dimana mereka terus dibombardir dengan tontonan tivi serta saluran yang mereka dapati di dunia maya, internet.

Mantan Tumenggung SAD, H. Jailani kini menetap di luar taman nasional. Kehidupannya sudah menyatu dengan kebanyakan orang Melayu di luar Taman. Menurutnya, kebanyakan SAD masih memiliki kebiasaan berburu dan meramu. Kebiasaan ini menyebabkan SAD selalu merasa bahwa alam akan selalu ada untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dampaknya ketika SAD membangun kebun seperti masyarakat desa, mereka tidak sabar untuk segera mendapatkan hasil dari kebun tersebut, sehingga sebelum kebun tersebut dapat memberikan hasil, maka dapat dengan mudahnya berpindah tangan ke masyarakat desa di sekitar kawasan TNBD (Jailani, 2020).

Akibatnya, jual beli lahan tidak dapat dihindarkan. Selain secara internal, SAD sendiri yang berniat menjual lahan. Namun secara eksternal hal ini juga kerap dimanfaatkan 'orang luar' sebagai modus untuk mendapatkan lahan.

Diperparah lagi kebun yang dibangun dalam kawasan TNBD oleh SAD senantiasa mengikuti tren kebun di sekitarnya. Seperti saat ini terjadi tren pembukaan kebun sawit, mau tidak mau SAD dalam kawasan TNBD juga banyak yang membangun kebun sawit. Padahal menurut pengaturan negara, untuk kawasan hutan tidak dibolehkan menanam sawit. Apa lagi kalau itu ditanam di kawasan konservasi seperti taman nasional.

Selain itu, penetapan TNBD pada tahun 2000 tersebut juga memasukkan kebun-kebun tua masyarakat desa sekitar TNBD ke dalam kawasan TNBD. Kebun-kebun tua ini dicirikan dengan adanya tanaman durian dan langsung yang tentunya sudah berumur tua dan ditanam sebelum penetapan TNBD. Jika ingin membedakan kawasan kebun yang dikelola SAD dengan kebun yang dikelola masyarakat sekitar, lihatlah keberadaan kelompok pohon durian dan langsung. Hal tersebut dikonfirmasi oleh salah satu Temenggung SAD, Bebayang dan masyarakat desa Lubuk Jering, Yusan (2020). Pada kebun-kebun tua masyarakat desa inilah objek konflik tenurial lainnya terjadi di TNBD.

Konflik yang terjadi di TNBD terjadi akibat adanya perubahan hirarki pengelolaan hutan dari rakyat ke negara. Konflik yang terjadi di TNBD meliputi: (1) konflik yang berkaitan dengan penataan kawasan; (2) konflik yang berkaitan dengan pemanfaatan kawasan; (3) konflik yang berkaitan dengan perubahan sosial budaya; (4) konflik yang berkaitan dengan kepentingan kekuasaan/penggunaan wewenang; dan (5) konflik yang berkaitan dengan internal pengelolaan (Herawati, 2011).

Revisi Zonasi TNBD merupakan bagian dari agenda bersama yang memadukan aturan adat Orang Rimba/SAD dan aturan negara. Keseluruhan proses dibangun secara partisipatif melibatkan 13 Temenggung, 4 LSM Pendamping, dan unsur pemerintah setempat. Mulai dari tahapan perencanaan, sensus Orang Rimba/SAD, survey lapangan, perpaduan ruang adat dan ruang zona (BTNBD, 2019).

Menurut TNBD (2019), faktor-faktor yang menjadi pendorong dilakukannya revisi zonasi adalah munculnya keberatan dari Orang Rimba Makekal Hulu yang menganggap zonasi TNBD belum mengakomodir ruang adat mereka. Salah satu penyebabnya adalah kekhawatiran komunitas tersebut terhadap perubahan pola hidup dan naiknya populasi Orang Rimba yang mengancam eksistensi mereka sebagai komunitas adat.

TNBD (2019) juga menjelaskan, faktor lainnya adalah pengakuan terhadap ruang adat. Pengakuan ini merupakan upaya untuk mempertahankan adat dan budaya Orang Rimba yang dianggap sudah mulai luntur. Kecuali itu, faktor lain juga termasuk adanya aktivitas wisata pada beberapa zona yang tidak sesuai peruntukannya, dan adanya keterlanjuran perladangan berupa kebun-kebun karet masyarakat desa yang saat ini dialokasikan pada zona khusus.

Resot Kami Rumah Kami

TNBD mestinya adalah singkatan untuk Taman Nasional Bukit Duabelas. Tapi bagi Resot Air Hitam justru TNBD merupakan singkatan *Taman Nasional Bandung Deui*. Guyonan ini menjadi biasa karena hampir semua staf di resot itu berasal dari Jawa Barat.

“Kami seperti berada di Jawa Barat saja,” seloroh Kepala Resot Air Hitam, Wawan sambil tertawa.

Kantor itu terasa akrab dengan celetukan berbahasa Sunda. Di bawah supervisi Kepala Seksi Wilayah, Saefullah, Resot Air Hitam bergiat dengan berbagai upaya konsevasi TNBD.

Resot Air Hitam dapat di tempuh lebih kurang 2 jam perjalanan dari Kota Sarolangun, Provinsi Jambi. Terdapat dua pilihan jalan dari Kota Sarolangun yang di tempuh menuju resot ini. Pertama, melalui jalur Lintas Tengah Sumatra kearah Bangko, Kabupaten Merangin. Kedua, melalui jalur Lintas Provinsi Sarolangun-Jambi mengambil arah ke kiri di Simpang Empat Pauh.

Sebagian besar jalan kedua arah tersebut cukup mulus, namun sekitar 20 km dari sebelum resot, akan melalui jalan aspal yang hancur akibat dari kendaraan yang tonasenya tidak sesuai dengan beban jalan. Hal ini tidak dapat di hindari karena hampir sepanjang hari banyak truk bermuatan sawit yang diisi melebihi batas berat tertinggi.

Kecuali soal plesetan TNBD, di resot ini ada pula Si Merah. Ini adalah sebuah kendaraan roda empat dengan bak terbuka khusus untuk lapangan. Si Merah dilengkapi dengan sistem penggerak di keempat rodanya. Disebut Si Merah karena memang catnya berwarna merah.

Menurut Wawan, sebenarnya Si Merah diperuntukkan untuk pemadam kebakaran hutan. Namun dengan kapasitas tangki air yang hanya 1 ton dan keterbatasan kemampuan untuk memasuki lanskap TNBD yang berbukit, maka Si Merah kerap tidak digunakan untuk pemadaman api di dalam kawasan.

Sehari-hari Resot Air Hitam TNBD tidak melulu urusannya sebatas operasional penjagaan kawasan hutan saja. Bayak interaksi sosial yang terjadi di luar bayangan umum. Salah satunya, tidak ada istilah jam kerja ataupun hari kerja.

“Setiap waktu adalah jam kerja, setiap hari adalah hari kerja. Tidak peduli hari minggu, hari besar maupun hari-hari libur layaknya di kota,” ungkap Wawan.

Sewaktu-waktu ada saja masyarakat SAD yang datang, mulai dari datang berkunjung untuk sekedar bermain dan duduk-duduk di halaman resot, sampai dengan datang membawa berbagai persoalan yang mereka hadapi di dalam TNBD. Mulai dari persoalan remeh temeh soal keluhan sakit gigi, sampai dengan persoalan-persoalan berat seperti perselingkuhan, sakit parah, kematiang, dan perkawinan.

Di sebagian persoalan inilah peran Si Merah bekerja. Sebagai satu-satunya kendaraan operasional roda empat, Si Merah menjadi kendaraan multi fungsi.

Untuk kendaraan sekolah misalnya, budaya *melangun* memaksa anak-anak SAD untuk berpindah-pindah mengikuti orang tua di sehamparan TNBD, untuk mendukung kelancaran anak-anak SAD mengikuti program sekolah yang di kelola oleh BTNBD maka mau tidak mau anak-anak yang berpindah mengikuti orang tua terpaksa untuk di jemput antar ke sekolahnya.

Melangun adalah istilah untuk perpindahan tepat tinggal sementara waktu. Bagi komunitas Orang Rimba, ada kepercayaan bahwa jika di wilayah yang biasa mereka tempati ada orang yang meninggal dunia atau wabah penyakit, maka dipercaya bahwa tempat itu sudah dikuasai roh jahat, dan mereka harus segera meninggalkan tempat tersebut. Wilayah yang ditinggalkan itu mungkin akan didatangi lagi, tapi dalam waktu yang cukup lama. Perpindahan tempat tinggal ini dilakukan secara berkelompok, tak ada yang tersisa.

Namun belakangan, budaya ini sudah mulai tergerus. *Melangun* hanya dilakukan untuk sementara waktu dan tidak terlalu lama. Hal ini disebabkan karena lokasi pindahpun sudah banyak yang dikuasai oleh *orang luar* dan perkebunan. Artinya, tidak banyak tempat bagi Orang Rimba untuk memulai kehidupan baru di wilayah yang baru.

“Saban hari Si Merah selalu siap sedia menjalankan tugas antar jemput,” kata Wawan.

Resot Air Hitam adalah rumah solusi segala persoalan SAD, termasuk urusan kesehatan. Padahal, Puskesmas hanya sejauh 3 galah saja berada di depan kantor Resot Air Hitam.

“Jika ada salah seorang anggota SAD ada yang sakit parah, maka ke resotlah mereka akan mengadu. Di situlah Si Merah berfungsi lagi,” ucap Wawan sambil tersenyum.

Si Merah lantas menjelma menjadi ambulance darat darurat untuk mengantarkan si pasien ke Rumah Sakit terdekat. Ada banyak lagi tugas Si Merah, seperti mengantarkan keluarga mempelai SAD yang mau menghadiri acara pernikahan sanak keluarga.

“Ini Kang Asep juga hampir tiap sebentar HPnya bunyi. Urusannya macam-macam. Kebanyakan telepon dari SAD. Walau posisinya PEH yang tugas utamanya untuk urusan pemulihan ekosistem di dalam kawasan TNBD. Tapi kalau sudah urusan SAD, Kang Asep siap jalan,” ujar Wawan.

Resot Air Hitam ingin menciptakan kader-kader SAD yang memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang persoalan kelestarian hutan. Kini, setidaknya ada 2 orang remaja SAD telah masuk dan bersekolah di SKMA Pekanbaru.

Camat Rajo SAD

“Kalau mau informasi tentang segala sesuatu soal SAD di TNBD hubungi saja Pak Iyed,” ujar seseorang di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarolangun.

Iyed, nama lengkapnya Suryadi. Dia adalah mantan Camat Air Hitam yang saat ini bertugas di Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sarolangun. Hobinya mengendarai sepeda *motor cross*. Orangnya suka tersenyum.

Mungkin semua orang sekecamatan Air Hitam mengenal Iyed. Apa lagi jika yang ditanya adalah SAD di TNBD, bagi mereka Iyed adalah Pak Camat dari dulu sampai sekarang. Gelar Pak Camat tetap melakat pada namanya, bukan sekedar panggilan.

Menurut warga, walaupun Iyed adalah mantan camat, tapi hingga kini dia tetap memberikan perhatiannya untuk masyarakat Air Hitam khususnya SAD yang bermukim di selatan kawasan TNBD.

Ini bukan hasil dari kerja sahari dua hari, bukan pula hasil kerja rutinitas asal untuk menyelesaikan kewajiban, ini adalah hasil kerja sepenuh hati. Banyak cerita tentang inovasi untuk mendobrak birokrasi kerja pemerintahan dia lakukan.

Misalnya untuk penerbitan KTP (Kartu Tanda Kependudukan) SAD. Ketika menjabat sebagai camat, Iyed secara luar biasa mengakomodir hak sipil SAD yang bermukim di kawasan TNBD tersebut.

Padahal jika di teliti lebih lanjut, sesungguhnya orang-orang SAD yang dia fasilitasi itu sebagian besar berdomisili di Kabupaten Batang Hari. Namun karena akses terdekatnya adalah ke Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun, maka Iyed tanpa ragu memperjuangkannya.

Belum lagi urusan pengisian kolom agama pada berkas kependudukan. Bagi masyarakat SAD yang masih menganut kepercayaan animisme, mereka tentu tidak bisa memilih salah satu dari 5 agama besar yang disediakan pada dokumen kependudukan. Iyed mengakomodir mereka.

Dalam dokumen kependudukan juga mensyaratkan nama orang tua. Bagi masyarakat SAD, penyebutan nama orang tua yang telah meninggal dunia adalah pantangan, mereka tidak bersedia. Pada poin ini, Iyed juga melakukan terobosan.

Dengan sabar, Iyed meminta setiap ketua kelompok SAD menyebutkan nama-nama anaknya, setelah itu masing-masing anak-anak tersebut menyebutkan nama anak-anak mereka sampai seterusnya. Iyed mencatat dengan teliti, hingga daftar anggota kelompok SAD berikut nama-nama anggota keluarganya tersusun secara lengkap. Iyed mendorong menerbitkan Kartu Keluarga dan KTP untuk anggota-anggota kelompok yang telah memenuhi syarat.

Dengan penerbitan KTP, masyarakat SAD yang belum melengkapi data segera diminta melengkapi. Ini menjadi dorongan tersendiri agar mereka segera melengkapi data-data, sehingga Iyed bisa menerbitkan

KTP. Identitas kependudukan ini memberikan manfaat kepada SAD, karena dengan adanya KTP mereka dapat mengakses seluruh layanan dasar yang di sediakan oleh negara seperti bantuan sosial, kesehatan dan pendidikan dasar.

Saban hari, Iyed berkendara motor berkeliling kecamatan Air Hitam. Dia mendatangi warga, mengajak mereka berdiskusi, berikut membina mereka untuk meningkatkan derajat kehidupan Orang Rimba Air Hitam.

Salah satu aset alam yang kerap didiskusikan Iyed adalah air terjun. *Talun* merupakan sebutan masyarakat desa setempat terhadap air terjun. Terdapat tiga *talun* yang tersebar di wilayah kerja Resot Air Hitam I dan II. Tepatnya talun di Desa Jernih dan talun di desa Lubuk Jering. Kondisinya masih relatif alami dan belum dikelola secara profesional sebagai objek wisata.

Talun yang tedapat di Desa Jernih dapat ditempuh dengan menggunakan motor dari batas desa masuk ke dalam kawasan selama kurang lebih 45 menit. *Talun* yang tinggi kurang lebih 2 meter tersebut kondisi airnya sangat jernih dan berbatu-batu. Sedangkan untuk *talun* di desa Lubuk Jering dapat ditempuh dengan motor kurang lebih 1 jam, dan 2 jam jalan kaki dari batas jalan aspal. Sedikit berbeda dengan kondisi talun Desa Jernih, *talun* di Desa Lubuk Jering ini kondisinya lebih menantang karena medannya bertingkat dan berbatu-batu. Terdapat 3 tingkat dan jaraknya kurang lebih 10 meter.

“Menumbuh-kembangkan potensi pariwisata merupakan kerja kalaborasi, bukan kerja sendiri sendiri,” kata Iyed.

Semua pihak, lanjutnya, harus bekerjasama dengan TNBD sebagai pemangku kawasan. Termasuk pula masyarakat desa dan SAD sebagai pepemanfaat langsung sumber daya, dan juga pemerintah daerah.

Iyed berharap agar potensi wisata ini memberikan manfaat kepada semua orang, terutama masyarakat desa dan SAD di sekitarnya.

“Jika TNBD tidak memberikan akses ke dalamnya, masyarakat desa dan SAD tidak menjaga alamnya dan pemerintah daerah tidak memiliki program yang tepat untuk mengembangkannya, maka tindakan-tindakan ini akan menjadi boomerang bagi semua pihak. Kinerja TNBD akan terganggu akibat rusaknya kawasan hutan, masyarakat desa dan SAD akan kehilangan potensi pendapatan tambahan dan pemerintah daerah akan buruk kinerjanya dalam mensejahterakan masyarakatnya,” Iyed mengingatkan.

Atas kerja-kerja yang sebagian besar dapat dikatakan sebagai kerja sosial, Iyed dihargai dengan sebutan sebagai *Rajo* oleh SAD. *Rajo* itu adalah *Tumenggung* (Pemimpin Adat) kami di Sarolangun kata orang-orang SAD.

3. Tentang Penulis

3.1. Syafrizaldi 'Aal' Jpang

Syafrizaldi 'Aal' Jpang dalam tahun 2020 mempublikasikan 2 buku sekaligus. Buku **Talang Mamak di Tepi Zaman**, dia tulis sepanjang awal tahun dan diterbitkan secara digital pada Maret 2020 oleh AsM Law Office. Buku terbarunya berjudul **Khazanah Sembilang Dangku** (KSD) juga terbit di Maret 2020 melalui dukungan Hutan Kita Institut di Palembang. KSD sendiri merupakan pembelajaran penanganan konflik tenurial di lanskap Sembilang – Dangku, Sumatra Selatan. Buku tersebut diluncurkan secara online pada 15 September 2020.

Pada Oktober 2019, Syafrizaldi 'Aal' Jpang bersama Diah Suradiredja meluncurkan buku berjudul **Perempuan di Singgasana Lelaki**. Buku ini diterbitkan Gramedia Pustaka Utama (GPU) pada Septmeber 2019. Melalui dukungan The Ford Foundation, dia menggarap kisah-kisah inspiratif para pemimpin politik perempuan, termasuk di antaranya Bupati Luwu Utara (Indah Putri Indriani), Walikota Surabaya (Tri Rismaharini), Gubernur Jawa Timur (Khofifah Indar Parawangsa) dan sederet nama lainnya.

Aal merupakan *storyteller*, penulis, fasilitator dan fotografer yang telah terlibat menulis berbagai buku terkait konservasi, anak, pengelolaan sumber daya alam, ekonomi dan perempuan. Dia berpengalaman 20 tahun bekerja di bidang konservasi sumber daya alam, kebencanaan, perubahan iklim, perhutanan sosial. Sepanjang pengalamannya, dia berkiprah sebagai aktivis gerakan masyarakat sipil, sosial dan lingkungan. Dia pernah bekerja pada lembaga internasional seperti Developemnt Alternative Inc. dan Fauna Flora International. Sebagai konsultan jangka pendek, dia juga pernah bekerja untuk proyek-proyek USAID, Uni Eropa, GIZ, Kemitraan, Yayasan Kehati, Samdhana Institute, Tropical Forest Alliance dan lainnya. Di level nasional, dia pernah bekerja untuk Walhi, KKI Warsi dan FIELD Foundation.

Dalam beberapa tahun belakangan memutuskan fokus mengembangkan SMART Branding untuk berbagai kepentingan sosial, bisnis dan personal. Aal pernah aktif menjadi kontributor tulisan di berbagai media, diantaranya: Majalah National Geographic Indonesia Traveler, Majalah Kartini, Majalah Intisari, Majalah Mutiara Biru, Harian The Jakarta Post, jurnalistravel.com, travelnatic.com, kompas.com, tribunnews.com, Harian Koran Tempo dan lainnya.

Selain dua buku yang telah disebut di awal, buku-buku lain yang pernah ditulis: 1) **Kepak Punai**, tentang perjuangan tanah ulayat oleh masyarakat adat Melayu, diterbitkan GPU tahun 2018. 2) **Langkas Jenggala**, berkisah tentang Perhutanan Sosial, diterbitkan oleh GPU tahun 2018. 3) **4 Sisi**, mengisahkan kondisi peri kehidupan dan konservasi di sekitar TNKS, diterbitkan oleh GPU pada 2017. 4) **Namaku Dahlia**, tentang para perempuan di Lubuk Beringin yang berdaya secara ekonomi, diterbitkan GPU pada, 2015. 5) **Namaku Dahlia**, tentang para perempuan di Lubuk Beringin yang berdaya secara ekonomi, diterbitkan Pundi Sumatra dan Partnership pada 2014. 6) **Riak Mendesau**, buku yang mengulas testimoni para pihak di Sumatra dalam Pengelolaan Hutan Lestari dan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu, diterbitkan Pundi Sumatra dan Multi Stakeholder Forest Program (MfP), Aliansi Pemantau Independen Kehutanan Sumatra (APIKS) dan Yayasan Kehati pada 2012. 7) **Mimpi Hutan Desa**, buku pembelajaran pengembangan hutan desa, diterbitkan Pundi Sumatra dan Partnership pada 2010. 8) **Lentera Kampung Hutan**, buku pembelajaran pengembangan energi listrik di desa-desa sekitar kawasan TNKS, diterbitkan Pundi Sumatra, MfP Phase 2 dan The Partnership for Governance Reform-Indonesia pada 2010. 9) **Parak: Sosial Forestry Ala Masyarakat Kotomalintang**, sebuah jurnal yang diterbitkan oleh Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat di Bogor 2004.

Sebagai editor dan kontributor tulisan, Aal terlibat dalam buku-buku: 1) **Langgam Salindia**, kisah tentang perjuangan konservasi di Sumatra bagian tengah dan selatan, diterbitkan Pundi Sumatra dan Tropical Forest Conservation Action (TFCA) Sumatra pada 2018. 2) **Bait Satria Andalas**, kisah-kisah

perjuangan konservasi di Sumatra bagian Utara, diterbitkan TFCA dan Leuser Conservation Partnership pada 2018. 3) **Seharum Tanah Wana**, buku tentang inisiatif masyarakat Wana Posangke dalam mengelola sumber daya alam, diterbitkan Yayasan Merah Putih di Palu pada 2018. 4) **Detak Konservasi Sumatra**, buku berkisah tentang berbagai inisiatif konservasi di hutan Sumatra, diterbitkan oleh GPU pada 2017. 5) **Tumbuh di Era Digital**, buku yang bercerita tentang perkembangan anak di era digital, diterbitkan oleh Aliansi Jurnalis Independen Indonesia dan UNICEF Indonesia di Jakarta pada 2016. 6) **Plan C**, buku tentang Metodologi Pengorganisasian Masyarakat berbasis Lanskap, diterbitkan Pundi Sumatra dan TFCA Sumatra pada 2016. 7) **Buku Saku Pendamping Lembaga Keuangan Mikro**, diterbitkan Pundi Sumatra dan TFCA Sumatra pada 2015. 8) **Menyemai Siaga di Lereng Malalak**, sebuah buku foto tentang kesiap-siagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam, dipublikasikan Yayasan FIELD Indonesia dan Muslim Aid di Padang pada 2010. 9) **Watershed Management Toolkits**, sebuah buku tentang pengelolaan daerah aliran sungai, diterbitkan oleh USAID's ESP, kementerian Kehutanan dan BAPPENAS di Jakarta pada 2009. 10) **Potret Hutan Jambi**, sebuah buku tentang kondisi hutan di Provinsi Jambi, dipublikasikan KKI Warsi, Jambi 2005. 11) **Obrolan Lapau-Obrolan Rakyat**, buku tentang potret pergulatan kembali ke nagari di Sumatra Barat, diterbitkan Studio Kendil, Institut Hukum Sumberdaya Alam dan KKI Warsi, Bogor 2004. 12) **Parak-Mutiara Di Tepi Danau**, booklet tentang pengelolaan hutan berbasis masyarakat, dipublikasikan KKI Warsi pada 2002.

Bersama Pundi Sumatra, Aal telah menjadi Sekretaris Badan Pengurus sejak lembaga ini didirikan pada 2006. Sebagai bagian organ organisasi, dia memberikan nilai tambah pada daya dongkrak pengelolaan organisasi. Mimpinya adalah mendorong Pundi Sumatra sebagai lembaga yang moderen, tangguh, dan memiliki durabilitas tinggi atas terkaman zaman. Kini, Aal aktif berkegiatan bersama Global Mata Angin (GMA). GMA merupakan sebuah perusahaan yang dia dirikan dalam mendukung isu-isu keberlanjutan, inklusi dan konservasi untuk memberikan warisan terbaik bagi generasi masa depan.

3.2. Alqaf Afandi

Alqaf memiliki pengalaman 10 tahun di bidang hukum tenurial, pengelolaan sumber daya alam, dan resolusi konflik, mediasi konflik tenurial, serta masalah keuangan dan perbangkan. Selama bertahun-tahun, berpengalaman untuk bekerja dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan termasuk hukum dan hak adat, hak asasi manusia, memfasilitasi penyelesaian konflik sumber daya alam, kehutanan sosial, pengelolaan kawasan lindung, dan bisnis yang berkelanjutan.

Alqaf aktif di beberapa lembaga profit maupun nirlaba. Dari tahun 2014 sampai sekarang sebagai Koordinator Program dan Peneliti di **AsM Law Office** sebuah kantor hukum dengan visi untuk mempromosikan kebijakan dan hukum yang membawa keberlanjutan, kemakmuran, dan keadilan. Pada tahun 2020 menjadi pelatih dan fasilitator pada **Global Mata Angin** sebuah perusahaan yang didirikan dalam mendukung isu-isu keberlanjutan, inklusi dan konservasi untuk memberikan warisan terbaik bagi generasi masa depan. Dan dari tahun 2017 sebagai Ketua **Yayasan Hutan Kemasyarakatan Lestari**, yang merupakan sebuah organisasi kemanusiaan yang aktif dalam advokasi dan mendorong perlindungan hak-hak rakyat atas sumber daya alam, terutama tanah dan hutan.

Sebagai peneliti dan penulis melalui AsM Law Office, Alqaf telah mempublikasi beberapa buku diantaranya; 1) **Penghormatan Hak Tenure Masyarakat Adat atau Masyarakat Lokal oleh Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia Tahun 2019**, pada tahun 2019; 2) **Uji Coba Pedoman Sukarela VGGT – Standar Interlaken di Sektor Industri Kehutanan dan Perkebunan Kelapa Sawit**, tahun 2018; 3) **Studi Kelayakan Sertipikat Hak Komunal di Sumatra Barat**, tahun 2018; 4) **Modul Pelatihan Implementasi Panduan Interlaken – VGGT**, tahun 2018; 5) **Comparative Study on Rights Recognition and Permits Procedures in Forest areas* for Communities and Companies* for forest resources and forest area utilization**, tahun 2017; 6) **Human Rights Responsibility of Oil Palm Plantation Companies in Indonesia: Case Study at**

Kubu Raya District, tahun 2017; dan 7) **Modul Pelatihan Bisnis dan Hak Asasi Manusia**, tahun 2016.

Sebagai fasilitator dan pelatih khususnya dalam resolusi konflik, Alqaf setidaknya pada tahun 2020 telah terlibat dalam banyak pelatihan diantaranya; 1) Narasumber dan Fasilitator **Coaching Clinic Laporan Asesmen Konflik Tenurial Kawasan Hutan**, BPSKL Sulawesi proyek Forest Programme 3 (REDD+), Sulawesi Tengah, Palu 01 – 03 Desember 2020; 2) Narasumber dan Fasilitator **Lokakarya Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Adat**, BPSKL Sulawesi proyek Forest Programme 3 (REDD+), Sulawesi Tengah, Palu 02 – 05 November 2020, 3) Narasumber dan Fasilitator **Local Champions**, BPSKL Sumatra proyek Forest Programme 2 (REDD+), Jambi, Muaro Bungo 14 – 15 Oktober 2020; 4) Narasumber dan Fasilitator **Pembuatan Direktori Konflik Tenurial Kawasan Hutan II**, BPSKL Sumatra proyek Forest Programme 2 (REDD+), Jambi, Muaro Bungo 13 – 14 Oktober 2020; 5) Narasumber dan Fasilitator Pelatihan **Resolusi Konflik Tenurial Kawasan Hutan Berbasis Pelatihan Lokasi II**, BPSKL Sumatra proyek Forest Programme 2 (REDD+), Jambi, Muaro Bungo 09 – 12 Oktober 2020; 6) Narasumber dan Fasilitator Pelatihan **Resolusi Konflik Tenurial Kawasan Hutan Berbasis Pelatihan Lokasi I**, BPSKL Sumatra proyek Forest Programme 2 (REDD+), Jambi, Muaro Bungo 05 – 08 Oktober 2020; 7) Narasumber dan Fasilitator Pelatihan **Pembuatan Direktori Konflik Tenurial Kawasan Hutan**, BPSKL Sumatra proyek Forest Programme 2 (REDD+), Jambi, Muaro Bungo 01 – 03 Oktober 2020; 8) Narasumber dan Fasilitator Pelatihan **BIMTEK Paralegal Asesmen Konflik Tenurial Kawasan Hutan**, BPSKL Sulawesi proyek Forest Programme 3 (REDD+), Sulawesi Tengah, Palu 16 – 17 September 2020.

3.3. Fajar Septyono

Fajar terlibat aktif pada riset sosial dan budaya sejak tahun 2013. Sebagai alumni dari **Universitas Riau jurusan Sosiologi**, Fajar telah akrab pada berbagai riset sosial dan budaya sejak aktif menjadi mahasiswa dengan membentuk kelompok kajian isu sosial **Agent of Change Community** dan **Komunitas Riset Sosial dan Budaya** yang sampai hari ini masih aktif dengan nama **Enumerator Riau**. Sejak tahun 2013 hingga saat ini, bersama beberapa orang dalam kelompok-kelompok tersebut, Fajar aktif melakukan riset dan pengumpulan data. Fokus riset yang dilakukan selama ini mulai dari riset sosial, ekonomi, lingkungan, dan riset kebudayaan. Beberapa riset yang pernah dilakukan antara lain; **Riset Sosial Suku Melayu Petalangan di Kabupaten Pelalawan** (University of Malaya) pada tahun 2013, **Riset Sosial Ekonomi Masyarakat di sekitar Bukit Betabuh** (Australian National University) tahun 2014, **Riset Sosial Ekonomi dan identifikasi desa-desa di sekitar kawasan Taman Nasional Tesso Nilo** (WWF Indonesia- Regional Riau) tahun 2014, **Riset Sosial Ekonomi masyarakat di desa-desa sekitar kawasan Bukit Betabuh** (WWF Indonesia- Regional Riau) tahun 2014, **Riset pengembangan kelompok tani swadaya kelapa sawit** (International Finance Corporation) tahun 2016, dan beberapa kegiatan riset lain pada isu lingkungan hingga saat ini.

Selain aktif dalam kegiatan riset dan pengumpulan data, Fajar juga terlibat di beberapa *Non-Governmental Organization* (NGO) yang fokus pada isu sumber daya alam di Provinsi Riau. Sejak tahun 2014 hingga pertengahan tahun 2016, Fajar tergabung pada tim riset dan tim investigasi di **WWF-Indonesia** wilayah kerja Riau, Jambi, dan Sumatra Barat. Selanjutnya sejak akhir tahun 2016 hingga saat ini, Fajar tergabung di **Perkumpulan Scale Up**, sebuah lembaga non profit yang aktif pada isu resolusi konflik. Selama di Perkumpulan Scale Up aktif melakukan proses pendampingan dalam penyelesaian konflik di sektor sumberdaya alam melalui jalur mediasi. Beberapa kasus konflik yang terlibat penyelesaiannya antara lain Konflik Masyarakat Adat Kampung Patomuan dan PT PSPI di Kabupaten Kampar, Kelompok Nelayan dengan RER di Semenanjung Kampar, Kelompok 14 petani dengan PT. Arara Abadi di Kabupaten Pelalawan. Sejak 2019, Fajar telah mengikuti sertifikasi **mediator professional** melalui lembaga sertifikasi mediator Impartial Mediation Network (IMN) yang terakreditasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selain itu, selama di Scale Up Fajar juga terlibat dalam beberapa kali kegiatan Monitoring Dampak Aktifitas Perusahaan Hutan Tanaman Industri terhadap

masyarakat di sekitar Kawasan Ekosistem Semenanjung Kampar (Desa Kuala Panduk, Tanjung Air Hitam, dan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan-Riau) bersama HaKI pada tahun 2018. Dan kegiatan monitoring isu konflik di sektor sumberdaya alam khususnya di Provinsi Riau.

Hingga saat ini, selain berkegiatan di Perkumpulan Scale Up, Fajar juga tergabung di Global Mata Angin sejak tahun 2020. Sebuah perusahaan yang didirikan dalam mendukung isu-isu keberlanjutan, inklusi dan konservasi untuk memberikan warisan terbaik bagi generasi masa depan.

Daftar Pustaka

- KBBI Daring*. (2016). Retrieved Desember 20, 2020, from KBBI Daring: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konflik>
- Abal. (2020, Desember 6). Wawancara. (A. Afandi, Interviewer) Palu, Sulawesi Tengah.
- Abdullah, V. (2015). Perlindungan Hukum Hak-hak Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan di Taman Nasional Lore Lindu. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 5, Volume 3*, 1-10.
- Ado, M. Y. (2020). *Koordinasi dan Komunikasi Kunci Sinergi dan Harmoni Pengelolaan Taman Nasional Lore Lindu (Catatan Pengalaman Lapangan Kepala Seksi Pengelolaan TN Wilayah II Gimpu Tahun 2017 – 2020)*. Palu.
- Amir Mahmud, A. S. (2015). Zonasi Konservasi untuk Siapa? Pengaturan Perairan Laut Taman Nasional Bali Barat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada*, 239-240.
- Andreas. (2020, November 3). Wawancara. (S. Jpang, Interviewer)
- Andreas. (2020, 12 8). Wawancara Lapangan. (A. Afandi, Interviewer) Sulawesi Tengah, Sigi.
- Balai Besar TNLL. (2019, Agustus 3). <http://ksdae.menlhk.go.id/>. Retrieved Desember 2, 2020, from Dirjen KSDAE Bertemu Masyarakat Dongi-dongi Kawasan Taman Nasional Lore Lindu: <http://ksdae.menlhk.go.id/info/6426/dirjen-ksdae-bertemu-masyarakat-dongi-dongi-kawasan-taman-nasional-lore-lindu.html>
- Balai Taman Nasional Sebangau. (2014). *Potensi Kawasan Taman Nasional Sebangau*. Retrieved Februari 2, 2021, from tnsebangau.com: <https://www.tnsebangau.com/potensi-kawasan/>
- BBTNLL. (2018). *Revisi Zonasi Pengelolaan Taman Nasional Lore Lindu Provinsi Sulawesi Tengah*. Palu.
- Bebayang. (2020, 12 17). (A. Afandi, Interviewer) Jambi, Air Hitam, Sarolangun.
- BIJAK, U. (2016). *USAID BIJAK*. Retrieved Januari 22, 2020, from USAID BIJAK: <https://bijak-indonesia.org/about-us>
- BRWA. (2012). *Wilayah Adat Ngata Toro*. Retrieved Desember 2, 2021, from BRWA: <https://www.brwa.or.id/wa/view/NTFRLWRhQIZvSFU>
- BTNBD. (2019). *Zonasi Tata Ruang Adat Pengelolaan TNBD Provinsi Jambi*. Sarolangun: TNBD.
- Dhika, A. (2016, April 2016). <https://www.mongabay.co.id/>. Retrieved Desember 2, 2020, from Potret Kehidupan Warga Dongi-dongi (Bagian I): <https://www.mongabay.co.id/2016/04/09/potret-kehidupan-warga-dongi-dongi-bagian-1/>
- Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Katingan. (2016). *blhkatingan.com*. Retrieved Maret 12, 2021, from Taman Nasional Sebangau: <https://blhkatingan.com/page/taman-nasional-sebangau.html>

- Direktorat Bina Potensi Kawasan Transmigrasi. (2015). *Transmigrasi Masa Doeloe, Kini dan Harapan Kedepan*. Jakarta: Ditjen PKP2Trans Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Dunggio, I., & Gunawan, H. (2009, April). Telaah Sejarah Kebijakan Pengelolaan Taman Nasional Di Indonesia. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 6 No 1, 43 - 56.
- FIELD Foundation. (2015). *Laporan Kajian Pemilihan Desa Prioritas untuk Pengelolaan Kebakaran Terpadu di Lanskap Katingan - Kahayan*. Jakarta: USAID LESTARI program.
- Gunggung Senoaji, Guswarni Anwar, Muhamad Fajrin Hidayat, dan Iskandar. (2020). Tipologi dan Resolusi Konflik Tenurial dalam Kawasan Hutan Konservasi Taman Wisata Alam Pantai Panjang-Pulau Baai di Kota Bengkulu. *JURNAL ILMU LINGKUNGAN Volume 18 Issue 2*.
- Hagen, B. (1908). *Die Orang Kubu auf Sumatra*. Frankfurt: Joseph Baer&Co.
- Haidir. (2020, 12 15). (A. Afandi, Interviewer)
- Hanafiah, J. (2018, Juli 22). *mongabay.co.id*. Retrieved November 30, 2020, from Sensasi Sebangau, Wisata Air Nuansa Gambut: <https://www.mongabay.co.id/2018/07/22/sensasi-sebangau-wisata-air-nuansa-gambut/>
- Herawati, I. (2011). *Konflik Lingkungan dan Resolusinya di Taman Nasional Bukit Duabelas Provinsi Jambi*. Yogyakarta: UGM.
- IUCN. (2008). *World Heritage and protected areas*. IUCN, Gland, Switzerland.
- Jailani, H. (2020, 12 21). Wawancara. (A. Afandi, Interviewer) Jambi, Air Hitam, Sorolangun.
- Jeti, R. (2020, Desember 9). Wawancara. (F. Septyono, Interviewer)
- Jpang, S. (2020). *Khazanah Sembilang Dangku*. Palembang: Matakamera untuk Hutan Kita Institut.
- Jumadi. (2020, Desember 7-9). Wawancara. (F. Septyono, Interviewer)
- Kartodihardjo, H. (2007). *D Balik Kerusakan Hutan Dan Bencana Alam*. Jakarta: Kehati Foundation.
- Kosmaryandi, N., Basuni, S., Prasetyo, L. B., & Adiwibowo, S. (2012, Agustus). Gagasan Baru Zonasi Taman Nasional: Sintesis Kepentingan Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Kehidupan Masyarakat Adat. *JMHT, Vol. XVIII, (2)*, 69 - 77.
- Larson, A. (2013). *Hak Tenurial dan Akses ke Hutan: Manual Pelatihan untuk Penelitian*. Bogor: CIFOR.
- Lektur.id. (n.d.). *6 Arti Kata Tenure di Kamus Bahasa Inggris Terjemahan Indonesia*. Retrieved November 29, 2020, from Lektur.id: <https://lektur.id/arti-tenure/#:~:text=Tenure%20masuk%20ke%20dalam%20bahasa,umum%20digunakan%20di%20seluruh%20dunia.>

- Mahmud, A., Satria, A., & Kinseng, R. (2015, Maret). Zonasi Konservasi untuk Siapa? Pengaturan Perairan Laut Taman Nasional Bali Barat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 18, Nomor 3*, 237-251.
- Masa, A. (20218, April 18). <https://sulteng.antaranews.com/>. Retrieved Desember 2, 2020, from <https://sulteng.antaranews.com/: https://sulteng.antaranews.com/berita/40682/peneliti-kawasan-tnll-miliki-100-tanaman-anggrek>
- Meliala, A. (2001, Juli 18-21). Konflik, Resolusi dan Keadilan Alternatif. Padang, Sumatera Barat. Retrieved 12 25, 2020, from <https://simposiumjai.ui.ac.id/wp-content/uploads/20/2020/03/8.1.2-Adrianus-Meliala.pdf>
- Moira Moeliono, G. L. (2010). *Meretas kebuntuan Konsep dan Panduan Pengembangan Zona Khusus bagi Taman Nasional di Indonesia*. Indonesia: Center for International Forestry Research (CIFOR).
- mongabay.co.id. (2014, Desember). *Permasalahan Tenurial dan Konflik Hutan dan Lahan*. Retrieved November 29, 2020, from Mongabay situs berita lingkungan: <https://www.mongabay.co.id/permasalahan-tenurial-dan-konflik-hutan-dan-lahan/>
- Mulyani, W. (2014). *Interpretasi Konflik Pemanfaatan Ruang oleh Orang Rimba di Taman Nasional Bukit Duabelas, Jambi*. Bandung: Institut Teknologi Bandung.
- Myrna A. Safitri (Koordinator), Muayat Ali Muhshi, Mumu Muhajir, Muhammad Shohibuddin Yance Arizona, Martua Sirait, Grahat Nagara, Andiko, Sandra Moniaga, Hasbi Berliani, Emila Widawati, Siti Rakhma Mary, Gamma Galudra, Suwito, Andri Santosa, Hery Santoso. (2011). *Menuju Kepastian dan Keadilan Tenurial*. Jakarta: Epistema Institute.
- N. Mark Collins; Jeffrey A. Sayer; Timothy C. Whitemore. (1991). *The Conservation Atlas of Tropical Forest Asia and the Pacific*. London and Basingstoke: Macmillan Press Ltd.
- Ningsih, Y. (2020, Desember 11). Wawancara. (F. Septyono, Interviewer)
- Ningsih, Y. (2020, Desember 10-11). Wawancara. (F. Septyono, Interviewer)
- Nurdin. (2020, 12 9). Wawancara. (A. Afandi, Interviewer) Sulawesi Tengah, Sigi.
- Nurdin. (2020, 12 9). Wawancara. (A. Afandi, Interviewer) Sulawesi Tengah, Sigi.
- P.13. (2017, Februari 16). P.13/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017. *Permen LHK P.13/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Pembinaan Jabatan Fungsional PEH*. Jakarta, DKI: KLHK.
- P.6. (2016, Mei 26). Perdirjen PSKL P.6/PSKL/SET/PSL.1/5/2016. Jkaarta, DKI, Jakarta: PSKL-KLHK.
- P.76. (2015, Desember 16). P.76/Menlkh-Setjen/2015. *KRITERIA ZONA PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL DAN BLOK PENGELOLAAN CAGAR ALAM, SUAKA MARGASATWA, TAMAN HUTAN RAYA DAN TAMAN WISATA ALAM*. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia: KLHK.

- P.84. (2015). Permen LHK P.84/Menlhk-Setjen/2015. *Permen LHK P.84/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan*. Jakarta: Kementerian LHK.
- Prasetijo, A. (2015). *Orang Rimba; True Custodian of the Forest*. Jakarta and Jambi: ICSD and KKI Warsi.
- Purwanto, S. A. (2005). Taman Nasional, Hak-hak Masyarakat Setempat dan Pembangunan Regional. *ANTROPOLOGI INDONESIA, Vol. 29, No. 3, 269-288*.
- Purwawangsa, H. (2017). Instrumen Kebijakan untuk Mengatasi Konflik di Kawasan Hutan Konservasi. *Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan Vol 4 No. 1, April*.
- QS. Ali Imran: 140. (n.d.).
- Rachman, M. (2012). Konservasi Nilai dan Warisan Budaya. *Indonesian Journal of Conservation, 1 No. 1, 30 - 39*.
- Rukminda, G., Soekmadi, R., & Adiwibowo, S. (2020, April). Perspektif Masyarakat Terhadap Program Kemitraan Kehutanan Sebagai Solusi Konflik Tenurial Di Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Rinjani Barat. *Media Konservasi, 25 No. 1, 17 - 25*.
- Saefullah. (2020, Desember 20). Pengembangan Dokumen Pembelajaran tentang Penanganan Konflik Tenurial dan Panduan Rezonasi Partisipatif Berbasis Pembelajaran dari Lapangan. (A. Afandi, Interviewer)
- Saputra, A. (2020, Desember 7-11). Wawancara. (F. Septyono, Interviewer)
- Siahaan, J. F. (2020, Desember 5-11). Wawancara. (F. Septyono, Interviewer)
- Simbaulga. (2020, Desember 09). Pengembangan Dokumen Pembelajaran tentang Penanganan Konflik Tenurial dan Panduan Rezonasi Partisipatif Berbasis Pembelajaran dari Lapangan. (A. Afandi, Interviewer)
- Sri-Edi Swasono & Masri Singarimbun. (1986). *Transmigrasi di Indonesia 1905-1985*. Jakarta: UI-Press.
- Suhardono, W. (2015). Konflik dan Resolusi. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*.
- Suharno. (2020). *Kebijakan Publik Berbasis Politik Rekognisi*. Surakarta: CV. Indotama Solo.
- Suliswati, R., Prihatinningsih, P., & Mulyadi. (2018). REVISI ZONASI TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA SEBAGAI UPAYA KOMPROMI PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM. *Seminar Nasional Geomatika 2018: Penggunaan dan Pengembangan Produk Informasi Geospasial Mendukung Daya Saing Nasional* (pp. 713-724). Semarang: Balai Taman Nasional Karimunjawa.
- Suroto. (2020, Desember 10 dan 11). (F. Septyono, Interviewer)
- Suroto. (2020, Desember 10 dan 11). (F. Septyono, Interviewer)

- Suryadi, I. (2021, 12 14). Pengembangan Dokumen Pembelajaran tentang Penanganan Konflik Tenurial dan Panduan Rezonasi Partisipatif Berbasis Pembelajaran dari Lapangan. (A. Afandi, Interviewer) Sarolangun, Jambi.
- Susana, S. H. (2017, Desember 22). *Zonasi Taman Nasional Sebangau Disosialisasikan Dari Tingkat Desa Hingga Provinsi*. Retrieved Maret 10, 2021, from <http://ksdae.menlhk.go.id/>: <http://ksdae.menlhk.go.id/info/2368/zonasi-taman-nasional-sebangau-disosialisasikan-dari-tingkat-desa-hingga-provinsi.html#:~:text=Zonasi%20pada%20TN%20Sebangau%20terdiri,Zona%20Pemanfaatan%3B%204>).
- Susana, Suyoko dan Hidayat Turrahman. (2017, Desember 22). <http://ksdae.menlhk.go.id/>. Retrieved Desember 1, 2019, from Zonasi Taman Nasional Sebangau Disosialisasikan Dari Tingkat Desa Hingga Provinsi: <http://ksdae.menlhk.go.id/info/2368/zonasi-taman-nasional-sebangau-disosialisasikan-dari-tingkat-desa-hingga-provinsi.html>
- Takandjandji, M., & Kwatrina, R. T. (2011). PENGELOLAAN CAGAR ALAM PULAU DUA DI PROVINSI BANTEN SEBAGAI EKOSISTEM BERNILAI PENTING. *Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam*, 8 No. 1, 95 - 108.
- TNBD. (2017). <https://www.tnbukitduabelas.id/>. Retrieved Desember 1, 2020, from Sejarah Kawasan: <https://www.tnbukitduabelas.id/profile/sejarah-kawasan>
- TNS. (2014). *Statistik TN Sebangau*. Palangka Raya: TNS.
- UU 41. (1999, September 30). UU 41/1999. *Kehutanan*. Jakarta, DKI: Presiden Republik Indonesia.
- Wawan. (2020, 12 21). Pengembangan Dokumen Pembelajaran tentang Penanganan Konflik Tenurial dan Panduan Rezonasi Partisipatif Berbasis Pembelajaran dari Lapangan. (A. Afandi, Interviewer) Jambi, Air Hitam, Sarolangun.
- Wiratno. (2017, November 30). *Paradigma Baru Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia*. Bogor: KLHK.
- Wiratno. (2018). *Sepuluh Cara Baru Kelola Kawasan Konservasi di Indonesia: Membangun Organisasi Pembelajar*. (B. Sya'bani, Ed.) Jakarta: Ditjen KSDAE KLHK.
- Wiratno, Indriyo, D., Syarifudin, A., & Kartikasari, A. (2001). *Berkaca di Cermin Retak; Refleksi Konservasi dan Implikasi bagi Pengelolaan Taman Nasional*. FOReST Press, The Gibbon Foundation, dan PILINGO Movement.
- Working Group Tenure. (2012). *Resolusi Konflik di KPH (Pembelajaran dari KPH Register 47 & Rinjani Barat)*. (M Syukur, Ed.) Bogor: Working Group Tenure.
- WWF. (2013). *Studi Penilaian Kebutuhan Pengembangan Kapasitas Bagi Kelompok Mata Pencaharian Berkelanjutan Program Pengembangan Sosial Dan Ekonomi Sebangau, Kalimantan Tengah*. WWF.

Yogaswara, H. (2021). *Meneruskan Hidup Setelah Kerusuhan: Ingatan Kolektif dan Identitas Etnis Madura Pasca Kekerasan Antar Etnis di Kota Sampit, Kalimantan Tengah*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Yulianty, L. (2020, Desember 7). Wawancara. (F. Septyono, Interviewer)

Yusan, M. (2020, 12 17). Wawancara. (A. Afandi, Interviewer) Jambi, Air Hitam, Sarolangun.